



SEMINAR SEJARAH NASIONAL V

**SUBTEMA
PENGAJARAN SEJARAH**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA

1990

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan



SEMINAR SEJARAH NASIONAL V

**SUBTEMA
PENGAJARAN SEJARAH**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1990**

Penyunting:
Anhar Gonggong

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Depdikbud. dalam program kerjanya tahun 1990/1991 telah menyelenggarakan Seminar Sejarah Nasional V di Gedung APDN Semarang pada tanggal 27–30 Agustus 1990. Seminar ini diselenggarakan dalam rangka "Pengkajian Sejarah 45 Tahun Indonesia Merdeka," dengan tema : "Sumbangan Sejarah Dalam Pembinaan Bangsa Menghadapi Era Tinggal Landas".

Kesadaran akan arti pentingnya sejarah sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa tidak terhenti dengan tercapainya kemerdekaan yang telah dinyatakan pada 45 tahun (1945 – 1990) yang lalu. Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sejarah tercermin dengan lahirnya pelbagai lembaga di kalangan masyarakat yang bertujuan untuk mengkaji, menanamkan dan mengukuhkan nilai-nilai kesejarahan. Demikian pula pelbagai lembaga pendidikan dan penelitian ilmiah juga telah meningkatkan kegiatan mereka di bidang penulisan sejarah. Tidak ketinggalan penulis dan peneliti yang mandiri melakukan kegiatan mereka dengan berbagai macam alasan dan tujuan.

Di lain pihak pesatnya pembangunan pada masa Orde Baru telah meningkatkan kebutuhan akan usaha pembinaan kesadaran sejarah bangsa Indonesia. Tanpa diduga terlebih dahulu, keberhasilan pembangunan nasional itu telah merangsang proses

pembaharuan dalam segala sektor kehidupan bangsa. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran pimpinan dan wakil-wakil rakyat akan lunturnya semangat persatuan dan kesatuan yang terdesak oleh semangat bersaing dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Sementara itu jika dilihat dari jarak waktu pelaksanaan Seminar Sejarah IV yang diadakan pada tahun 1985 di Yogyakarta (1985-1990), telah terbentang jarak waktu selama lima tahun. Suatu rentang waktu yang cukup memadai untuk menyelenggarakan suatu Seminar yang berskala nasional. Dalam rentang waktu tersebut tentu para sejarawan telah banyak berusaha dan berhasil melakukan penelitian di dalam pelbagai peristiwa sejarah. Hasil penelitian itu seharusnya disebarikan pada sejarawan lain serta masyarakat pada umumnya. Untuk itulah maka Seminar Sejarah Nasional V ini merupakan forum yang dapat mempertemukan hasil kajian/studi para sejarawan dari seluruh Indonesia, untuk dibahas dan disebarluaskan pada masyarakat.

Dalam seminar ini telah dibicarakan berbagai masalah kesejarahan yang terbagi atas : 1. Sejarah Perjuangan, 2. Pengajaran Sejarah, 3. Penulisan Sejarah, 4. Sejarah Kesenian dan, 5. Sejarah Industrialisasi.

Materi-materi kesejarahan tersebut berasal dari berbagai penjuru tanah air yang merupakan pusat-pusat pemikiran kesejarahan, antara lain seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Ujung Pandang, Medan, Riau dan lain-lain. Makalah-makalah tersebut merupakan hasil penelitian ilmiah yang orisinal, berskala nasional ataupun lokal dan belum pernah dipublikasikan.

Pada akhirnya dengan diterbitkannya hasil Seminar Sejarah Nasional V ini diharapkan kesadaran sejarah pada masyarakat luas menjadi meningkat.

Jakarta, Nopember 1990

**PROYEK INVENTARISASI DAN
DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL**

SAMBUTAN DIREKTUR SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PADA PEMBUKAAN SEMINAR SEJARAH NASIONAL V

Hadirin yang saya hormati,

Perkenankanlah saya mengutip beberapa rujukan yang melandasi 3 kegiatan Seminar Sejarah Nasional, Pameran Perkembangan Kebudayaan dan Seminar Pendahuluan yang mulai hari ini kita selenggarakan di Semarang dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan.

Pertama-tama, ialah amanat GBHN 1988 yang antara lain menyatakan bahwa "Hakekat pembangunan nasional ialah pembangunan yang berbudaya".

Rujukan yang kedua ialah seruan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang "Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan Sedunia" yang di Indonesia telah dicanangkan secara resmi oleh Bapak Presiden pada tanggal 28 Oktober 1988 yang lalu. Dalam Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan Sedunia itu kita diharapkan untuk, antara lain : Memperhatikan dimensi kebudayaan dalam pembangunan, memperkuat identitas budaya bangsa dan memperbesar peran serta masyarakat dalam kegiatan budaya.

Amanat GBHN 1988 maupun seruan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan Sedunia itu tidak disusun tanpa alasan dan

bukan sekedar pemanis kata rangkaian pernyataan untuk didengar telinga.

Sebagaimana kita maklum, masyarakat dan peradaban manusia khususnya di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini, sedang mengalami perkembangan yang amat pesat. Baik kekuatan dari dalam masyarakat sendiri maupun terutama kekuatan dari luar dengan kuatnya merangsang penyesuaian tata susunan masyarakat dan pergeseran nilai budaya serta norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dinamika masyarakat dalam menanggapi tantangan zaman, baik yang dipacu oleh peralihan generasi maupun kemajuan teknologi itu, dapat menyebabkan proses akulturasi yang tidak terkontrol apabila tidak diimbangi dengan pembinaan dan pengembangan kebudayaan secara terarah dan berkesinambungan.

Perluasan kesempatan pendidikan untuk mempersiapkan generasi muda mengambil alih peran-peran sosial dari generasi terdahulu, telah merangsang pemikiran yang lebih luas cakupannya.

Karena itu bukan hal yang mustahil, kalau kurangnya pembinaan budaya di kalangan generasi muda dapat menyebabkan pendangkalan penghayatan budaya bangsa. Demikian pula pesatnya perkembangan industrialisasi yang didukung ilmu dan teknologi moderen yang berorientasi pada keuntungan materi, telah menggeser nilai-nilai budaya luhur dan menggantikannya dengan nilai-nilai ekonomi yang lebih kuat relevansinya dengan kehidupan masyarakat industri.

Sementara itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi dan transportasi, telah memacu dan meningkatkan intensitas kontak-kontak budaya antar bangsa. Walaupun kontak-kontak budaya itu diperlukan sebagai kekuatan luar yang dapat merangsang perkembangan kebudayaan yang terlibat, akan tetapi tanpa kesiapan masyarakat, yang bersangkutan dapat mengakibatkan perkembangan kebudayaan atau akulturasi yang terlepas dari akar budaya bangsa yang bersangkutan.

Atas dasar kenyataan tersebut, kiranya sudah pada tempatnya kalau dengan sungguh-sungguh dilakukan usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa sejalan dengan amanat GBHN 1988 dan seruan PBB tentang Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan Sedunia. Dalam rangka usaha tersebut, pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan, menyelenggarakan 3 rangkaian kegiatan sekaligus di Semarang dalam rangka 3 rangkaian kegiatan ini besar yang dimulai sejak tanggal 21 Agustus yaitu Peringatan 100 tahun Penemuan Fossil Pithecanthropus Erectus di Solo disusul dengan Sidang-sidang Indo Pacific Prekisforic Association di Yogyakarta dan kini di Semarang kita selenggarakan Seminar Sejarah Nasional V serta Pameran Perkembangan Kebudayaan dan Pra Seminar "Jalan Sutra".

Kalau di Solo kita dibawa kembali ke alam budaya Nusantara 1-1½ juta tahun yang lalu, yaitu awal kehidupan manusia Indonesia Purba atau jenis Pithecanthropus Erectus, di Yogyakarta kita dibawa serta menelaah kembali asal usul dan perkembangan kebudayaan di masa prasejarah. Kini di Semarang kita diajak untuk menggali, memahami dan menghayati kebudayaan bangsa dalam arti luas, di masa sejarah.

Hadirin yang saya hormati, kalau kita berpaling ke belakang dan memperhatikan sejarah tidak selalu berarti kita memuja-muja kejayaan masa lalu untuk berpuas diri. Tantangan yang dihadapi oleh nenek moyang kita di masa lampau jauh berbeda dengan apa yang kita hadapi dewasa ini. Karena itu tanggapan dan bentuk perjuangan mereka jauh berbeda dengan tanggapan dan bentuk perjuangan yang harus kita lakukan. Apa yang dapat kita warisi ialah nilai-nilai luhur, nilai-nilai kejuangan yang membawa kejayaan bangsa. Oleh karena itu dengan mengacu pada pengalaman di masa lampau, kita hadapi tantangan masa kini, untuk merencanakan hari depan yang lebih baik. Semuanya itu dapat kita lakukan dengan mengacu pada sejarah.

Rangkaian kegiatan Direktorat Jenderal Kebudayaan baik di Solo, Yogyakarta dan Semarang ini sesungguhnya mempunyai

tujuan utama untuk membangkitkan semangat perjuangan ini mencapai cita-cita bangsa tanpa harus tercabut dari akar budaya atau nilai-nilai luhur yang telah menghantar kita selama 45 tahun. Sesungguhnya masa empat puluh lima tahun itu bukan waktu yang singkat, kalau dikaitkan dengan pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi yang telah menimbulkan dampak pemikiran dan kehidupan sosial budaya masyarakat pada umumnya. Karena itu sudah pada waktunya kalau kita berpaling pada sejarah untuk mengetahui adakah perjalanan kita itu sudah tepat pada jalur yang kita tuju.

Sampai berapa jauh perjalanan itu mendekati cita-cita dan adakah perlu koreksi untuk mempercepat pencapaian tujuan.

Semuanya itu dapat diketahui dengan bercermin pada sejarah. Kalau orang-orang Eropa Barat bercermin pada masyarakat "primitive" dalam mengukur kemajuan peradaban mereka, kita harus pandai bercermin pada sejarah dalam mengukur kemajuan pembangunan yang kita capai. Sejarah, khususnya sejarah perjuangan bangsa, merupakan tolok ukur akan ketepatan arah dan keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia.

Atas dasar alasan itulah Seminar Sejarah Nasional V diselenggarakan dengan mengacu pada GBHN 1988 dan Program Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan Sedunia yang mengingatkan kita akan arti pentingnya sejarah bukan sekedar sebagai suatu disiplin ilmu melainkan sejarah sebagai suatu rangkaian informasi yang sarat dengan pesan-pesan budaya dalam arti luas. Seminar Sejarah karena itu diselenggarakan bukan semata-mata sebagai arena diskusi ilmiah yang diperlukan untuk pengembangan ilmu yang bersangkutan, melainkan juga sebagai sarana untuk memperluas cakrawala dan membina kesadaran sejarah masyarakat pada umumnya. Karena itu marilah kita simak dengan seksama uraian para pakar dan pelaku sejarah, serta khalayak ramai tentang sejarah bangsa mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya demi kejayaan bangsa. Perlu diketahui bahwa dalam rangka kerjasama kebudayaan antar bangsa, dalam Seminar akan dibicarakan topik-topik khusus tentang "Jalan Sutra" untuk menyambut program UNESCO

yang akan menelusuri jalan perdagangan sutra yang menghubungkan benua Asia dan Eropa melalui pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Napak jalan sutra yang dimulai dari Venetia itu akan singgah di pelabuhan-pelabuhan sutra Indonesia pada bulan Januari 1991 dan Seminar Internasional Jalan Sutra akan diselenggarakan di Surabaya.

Akhirnya marilah kita mulai dengan sidang-sidang pertama mendengarkan uraian tamu-tamu kita, menguraikan pemikiran, pengalaman dan saran-sarannya.

Semarang, 27 Agustus 1990

Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional

ttd.

Prof. Dr. S. BUDHISANTOSO

**SAMBUTAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
P A D A
PEMBUKAAN SEMINAR SEJARAH NASIONAL V
TANGGAL 27 AGUSTUS 1990**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
Yth. Bapak Menteri Penerangan RI;
Yth. Ibu Menteri Sosial RI;
Yth. Sdr. Ketua DPRD dan Rekan-rekan MUSPIDA Tingkat I Jawa Tengah;
Yth. Sdr. Kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah;
Yth. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
Yth. Para Sejarahwan, Budayawan dan Peminat Bidang Studi Sejarah;
Para Peserta Seminar Sejarah Nasional V, yang saya hormati dan hadlirin yang berbahagia.

1. Mengawali perjumpaan kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan taufiq dan hida-

yah-Nya, kita sekalian dapat menyertai acara Pembukaan SEMINAR SEJARAH NASIONAL V, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada kesempatan yang amat membahagiakan ini, saya pribadi dan atas nama seluruh masyarakat Jawa Tengah, menyampaikan ucapan "Selamat Datang", dan "Terima Kasih", kepada Bp. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bp. Menteri Penerangan, dan Ibu Menteri Sosial, yang telah berkenan menyisihkan waktu, untuk hadir secara pribadi pada acara ini.

Ucapan yang sama saya sampaikan pula kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Saudara-saudara sekalian, khususnya para sejarawan dan budayawan, yang telah ikut berpartisipasi mensukseskan acara ini.

2. Sebagaimana kita maklumi bersama, kegiatan Seminar Sejarah Nasional V ini mempunyai arti penting dan strategis, terutama dalam rangka mengokoh-mantapkan kedudukan ilmu sejarah nasional dalam sistem pendidikan kita. Melalui kegiatan ini wawasan "Jati Diri" kita akan semakin mantap, cakrawala pandang kita akan lebih luas; bahkan dapat meningkatkan nasionalisme dan tanggung jawab ke masa depan. Paling tidak lewat seminar ini, para cendekiawan kita di bidang ilmu sejarah, dapat memacu kreatifitas untuk menemukan pola terbaik dalam menyampaikan pelajaran sejarah bagi para pelajar, mahasiswa maupun generasi muda.
3. Seperti telah kita rasakan bersama, saat ini berkembang issue, dari hasil Temu Sejarah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah, bahwa bidang studi sejarah tidak memperoleh porsi sebagai layaknya bidang studi yang lain, bahkan sebagai "Wahana Pembinaan Bangsa", cenderung kurang mendapat perhatian. Lebih memprihatinkan lagi, bahwa kurikulum bidang studi sejarah tahun 1975 seakan tenggelam atau bahkan ditenggelamkan oleh bidang studi IPS, terutama di SLTP dan SLTA.

Memang telah ada upaya peningkatan-peningkatan kualitas pada kurikulum 1984 bidang studi ini. Akan tetapi, ini pun masih belum ada Garis Besar Program Pengajaran. Pernah bidang studi sejarah ini memperoleh porsi yang cukup mantap, yaitu pada kurikulum tahun 1988. Tapi sejak saat itu hingga sekarang belum ada tanda-tanda bidang studi ini menarik untuk diajarkan.

4. Dari indikator yang saya kemukakan tadi, maka seminar ini sangat bermanfaat, di satu pihak bermanfaat bagi pembangunan sistem pendidikan kita dan di pihak lain bermanfaat bagi pembangunan generasi muda kita di masa-masa yang akan datang. Karenanya saya mengharapkan, agar forum ini dimanfaatkan seoptimal mungkin dan dapat membuahkan hasil yang positif bagi kita semua.

Dapat saya sampaikan, bahwa di dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah, disamping ada beberapa masalah pokok pembangunan yang segera diupayakan pemecahannya, pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, merupakan salah satu bagian terpenting dari keseluruhan program pembangunan di daerah ini. Sementara itu "Pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi" merupakan satu di antara lima masalah pokok yang dihadapi Jawa Tengah; Bertemu pada hal ini, kiranya tak berlebihan jika seminar ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Jawa Tengah, khususnya dalam bidang studi sejarah di sekolah-sekolah.

Melalui teman-teman/Saudara-saudara sekalian dalam seminar ini, para guru sejarah tak lagi "Ragu-ragu" dengan profesinya.

Kiranya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memanfaatkan secara optimal hasil-hasil yang dicapai pada pertemuan ini, baik di sekolah-sekolah maupun dalam rangka pembinaan generasi muda dalam belajar sejarah nasional, agar anak-anak kita tidak "Pangling" terhadap sejarahnya sendiri.

5. Memang kita akui, bidang studi sejarah saat ini kurang diminati, baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Hal ini terbukti adanya banyak keluhan para guru sejarah kita. Sementara kita tahu, bahwa sejarah nasional mempunyai kriteria khusus dalam pembinaan watak generasi muda kita, seperti menumbuhkan kebanggaan jiwa patriotisme. Disamping itu, melalui pelajaran sejarah nasional, anak-anak kita dapat memahami arti pengorbanan para pahlawan kita dalam menegakkan kedaulatan negaranya. Melihat kenyataan ini, terasa agak memprihatinkan manakala, bidang studi ini menjadi "Samben" bagi anak-anak kita.

Hal ini tantangan bagi kita semua, terlebih bagi Saudara sekalian, yang memang sangat paham arti pentingnya belajar sejarah nasional. Untuk itulah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan harapan-harapan sebagai berikut :

Pertama, Carilah alternatif terbaik untuk merangsang minat belajar sejarah nasional bagi pelajar maupun mahasiswa. Hal ini penting artinya bagi pembinaan semangat guru sejarah.

Kedua, Manfaatkan forum ini sebagai ajang konsultasi sesama pakar bidang studi sejarah, terutama untuk menemukan sistem yang tepat menulis buku-buku sejarah nasional, sehingga menarik untuk dibaca.

Ketiga, Demikian pula saya berharap kepada guru-guru sejarah, khususnya di Jawa Tengah, hendaknya jangan cepat putus asa dalam menjalankan profesinya.

Sebab betapapun bidang studi ini kurang menarik, tapi bidang studi ini sangat besar peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian beberapa hal yang dapat saya kemukakan pada kesempatan ini. Sebelum menutup sambutan ini, perkenankanlah saya mohon kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan sambutan pengarahannya dan sekaligus membuka seminar ini.

Sekian, terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati jalannya Seminar Sejarah Nasional V ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

I S M A I L

SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dibawakan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan.

Mulai hari ini selama beberapa hari berturut-turut akan berlangsung Seminar Sejarah Nasional ke 5 dan pameran perkembangan kebudayaan Indonesia. Peristiwa ini sama pentingnya dengan sejarah apapun yang akan dibicarakan dalam Seminar serta perkembangan kebudayaan pada umumnya, karena tanpa kita sadari setiap orang, setiap waktu dan dalam setiap interaksi sosial memerlukan sejarah dan mengacu pada kebudayaan yang berlaku. Dalam hal sejarah, setiap orang memerlukannya sebagai bahan pertimbangan dalam setiap tindakan sosialnya. Namun demikian tetapi tidak setiap orang menyadari akan arti pentingnya sejarah bagi kelangsungan hidup dirinya, keluarganya, kelompok sosialnya, bangsanya, maupun umat manusia secara keseluruhan. Orang baru sadar akan arti pentingnya sejarah, kalau ia menghadapi kesulitan, seperti harus mengisi daftar riwayat hidup, mengusut asal-usul dan silsilah keluarganya, ataupun berusaha memahami pertikaian antara bangsa yang menjurus ke arah peperangan besar seperti yang terjadi di wilayah teluk di Timur Tengah dewasa ini. Orang baru berminat untuk mempelajari sejarah, kalau ada tulisan yang menyangkut baik buruknya pribadi yang bersangkutan, kelompoknya ataupun bangsanya.

Di pihak lain ada pula orang yang mempunyai kesadaran sejarah yang cukup kuat, dan senantiasa ingin membuat sejarah-

nya sendiri atau menulis "his Story" dan bukannya "history" dalam arti yang sesungguhnya. Betapapun karya tulis yang memuat catatan tentang peristiwa di masa lampau itu sangat penting artinya sebagai sumber informasi kesejarahan. Walaupun dalam cara mengungkapkan, maupun dalam cara melihat dan memahami peristiwa di masa lampau itu berbeda, semuanya itu sangat penting artinya bagi ahli-ahli untuk merekonstruksi sejarah.

Memang disadari bahwa menulis sejarah itu bukan suatu pekerjaan yang ringan dan sederhana. Setiap detik terjadi peristiwa sejarah di banyak sektor kehidupan dan yang tidak terbatas dampaknya jangkauan wilayahnya. Oleh karena itu ahli-ahli sejarah menghadapi kesulitan untuk menentukan titik tolak penulisan sejarah. Belum lagi pengaruh ragam tujuan penulisan serta sasaran pembacanya yang belum tentu homogen, serta suasana masyarakat dan suhu politik yang tidak dapat diabaikan pengaruhnya. Hal ini tercermin dalam banyaknya tanggapan, sanggahan dan kritik yang ditujukan pada hasil karya sejarawan di Indonesia. Boleh dikatakan setiap waktu kita dapat ikuti surat pembaca diberbagai media cetak yang isinya menggugat, menyangkal, meluruskan dan menjelaskan peristiwa sejarah yang pernah dipublikasikan. Seolah-olah penulisan sejarah itu sendiri membuat sejarahnya sendiri.

Di samping ramainya orang membicarakan isi karya sejarah, dewasa ini banyak pula orang yang membicarakan tentang pendekatan konsep dan teori, metode pengumpulan data dan fakta sejarah, serta sistematika penyajiannya. Hal ini merupakan gejala baik bagi pengembangan sejarah sebagai cabang ilmu pengetahuan, akan tetapi kalau orang berlarut-larut bicara soal metode ilmiah tanpa kesudahan, akhirnya masyarakat yang mulai berminat dan mengembangkan pemikiran kiritikal akan dikecewakan. Sementara orang berdebat soal metode ilmiah, buku-buku sejarah yang dapat diandalkan sebagai sumber informasi andal sudah ketinggalan jaman. Baik isi maupun pendekatannya sudah jauh tertinggal oleh karya-karya sejarah yang ditulis oleh orang asing dengan segala latar belakang sosial-

budaya dan idiologinya dengan tujuan dan sasaran pembaca tertentu pula.

Terlepas dari penilaian terhadap minat kesadaran sejarah dikalangan masyarakat, sesungguhnya kita sangat memerlukan sejarah baik sebagai penjelasan rangkaian peristiwa di masa lampau, maupun kegiatan sejarahwan untuk menggali dan menyajikan fakta sejarah terutama sebagai sarana pemupukan persatuan dan kesatuan bangsa, sarana untuk mengukuhkan identitas bangsa, dan sarana perangsang kreativitas dalam pembangunan bangsa.

Sebagaimana kita sadari, proklamasi kemerdekaan 45 tahun yang lalu telah menimbulkan apa yang oleh sarjana Antropologi Amerika yaitu Cliford Geertz, dinamakan revolusi integrasi ("integrative revolution") di Indonesia. Penduduk di bekas wilayah jajaran Hindu Belanda yang semula hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial yang kecil dan mandiri, mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang besar. Akibatnya kesatuan-kesatuan itu harus melepaskan ikatan-ikatan kesatuan kedaerahan dan lain-lain ikatan priordial yang terbatas lingkupnya untuk meleburkan diri dalam kesatuan bangsa. Untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa itulah sejarah menjadi sasaran yang amat penting artinya.

Sejarah harus mampu membangkitkan kebanggaan nasional yang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dan sekaligus dapat merangsang semangat membangun demi terwujudnya cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Atas dasar alasan tersebut, tepatlah sudah kalau Seminar Sejarah Nasional yang kelima ini diselenggarakan di Semarang sebagai salah satu kota perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan dan sekaligus perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pilihan Semarang sebagai kota perjuangan pembebasan dan sekaligus kota persatuan dan kesatuan bangsa merupakan perlambang bahwa dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa itu harus dilandasi oleh

alasan yang kuat dan ilmiah. Karena itu seminar sejarah ke V ini hendaknya berlangsung secara bebas dan ilmiah, akan tetapi jangan lupa pada tujuan utama ialah mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa secara lebih mantap. Sejalan dengan usaha tersebut, pada waktu yang bersamaan diselenggarakan pula pameran perkembangan kebudayaan Indonesia di Museum provinsi Jawa Tengah. Pameran tersebut merupakan salah satu perwujudan usaha pemerintah untuk memperkuat identitas budaya bangsa sebagai salah satu tujuan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan sedunia yang di Indonesia dicanangkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 28 Oktober 1988 yang lalu.

Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah benar-benar menaruh perhatian dan dengan segala kesungguhan berusaha mengembangkan kebudayaan sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat GBHN 1988 yaitu antara lain menyatakan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan yang berbudaya. Oleh karena itu baik Seminar maupun Pameran hendaknya menjadi sarana komunikasi dan informasi budaya dalam arti luas. Pembicaraan dalam Seminar hendaknya dilakukan secara bebas dan tuntas, akan tetapi hal-hal yang belum pasti dan memerlukan pendalaman serta diperkirakan dapat menimbulkan keresahan sosial sebaiknya di batasi di ruang sidang dan tidak untuk dipublikasikan. Sedang apa yang diperagakan dalam Pameran hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendalaman, penghayatan dan inspirasi budaya dalam pelaksanaan pembangunan.

Akhirnya dengan mengucap syukur kehadapan Tuhan Yang Kuasa, dan dengan seijin hadirin sekalian, Seminar Sejarah Nasional V dan Pameran Perkembangan Kebudayaan Indonesia dengan resmi saya buka dan semoga dapat berlangsung dengan baik dan berhasil guna bagi masyarakat Indonesia seluruhnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
SAMBUTAN DIREKTUR SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL	vii
SAMBUTAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I JAWA TENGAH	xii
SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	xvii
DAFTAR ISI	xxi
MAKALAH—MAKALAH	1
A. SUBTEMA UMUM :	
1. Beberapa Catatan Tentang Kesetiakawanan Sosial dan Sejarah Perkembangan Bangsa, <i>oleh Haryati Soebadio</i>	1
2. Sejarah Sebagai Sarana Pewarisan Nilai 45, <i>oleh M. Kharis Suhud</i>	8
3. Peranan Sejarah dalam Pembangunan, Suatu Uraian Tentang Wawasan Jati Diri, Sejarah dan Pembangunan, <i>oleh Ismail</i>	19

4. Fungsi Sejarah dalam Pembangunan Bangsa, Kesadaran Sejarah, Identitas dan Kepribadian Nasional, <i>oleh Sartono Kartodirdjo</i>	47
B. SUBTEMA PENGAJARAN SEJARAH :	
1. 25 Tahun Pendidikan Sejarah, <i>oleh Said Hamid Hasan</i>	61
2. Metode Penemuan Sebagai Proses Untuk Mewarisi Nilai-Nilai Bangsa, <i>oleh Sri Jutmini Rahardjo</i>	78
3. Pengajaran Sejarah, <i>oleh Abu Su'ud</i>	92
4. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, <i>oleh I Putu Gede Suwitha</i>	111
HASIL SEMINAR SEJARAH NASIONAL V	122
LAMPIRAN	126

BEBERAPA CATATAN TENTANG KESETIAKAWANAN SOSIAL DAN SEJARAH PERKEMBANGAN BANGSA.

Haryati Soebadio

Istilah 'kesetiakawanan sosial' kini sangat sering kita gunakan. Maka tidak mengherankan, bila ada pihak-pihak yang berkelakar, bahwa 'kesetiakawanan sosial' hanya berupa 'slogan politik' saja, tetapi belum tentu ada makna sebenarnya. Hal itu mungkin timbul akibat diadakannya secara resmi Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, HKSN, yang kita peringati, secara resmi pula, pada tanggal 20 Desember.

Sehubungan dengan seminar sejarah yang dihadapi di sini, boleh digarisbawahi, bahwa kesetiakawanan sosial memang ada kaitannya dengan sejarah bangsa, berarti dengan sendirinya, juga dengan *politik* bangsa. Hal itu tidak perlu mengherankan ataupun dipertanya-tanyakan. Kesetiakawanan sosial tidak lain daripada yang secara internasional disebut *solidaritas* sosial. Mohon diingat, bahwa gerakan pembebasan dari komunisme dan penguasaan Rusia di Polandia, berarti gerakan bertujuan politik, dilakukan oleh kelompok orang Polandia yang menyebutkan diri tergabung dalam perkumpulan bernama "Solidaritas".

Penggabungan sekelompok orang guna melancarkan suatu gerakan dapat dikatakan tidak mungkin terjadi dan berhasil,

bila tidak ada rasa keterkaitan, persamaan pikiran dan tujuan, yang menumbuhkan rasa solidaritas, setiakawan, antara anggota kelompok, yang memang bertujuan untuk bersatu-padu mengadakan gerakan itu. Bila tidak ada solidaritas, kesetiakawanan antara anggota, maka kelompok akan terpecah-belah, hilang kaitan dan juga maknanya, sehingga tidak akan berhasil mencapai tujuannya.

Hal itu pun sudah berkali-kali terbukti dalam sejarah bangsa Indonesia sendiri. Bukti kekuatan persatuan dan kesetiakawanan antar warga bangsa dapat ditunjukkan dalam keberhasilan kita akhirnya merebut kekuasaan dari tangan asing serta mengusir pengusaha asing itu dari wilayah kita. Sebaliknya bukti perpecahan yang mengakibatkan kegagalan dapat juga ditunjukkan dalam sejarah kita, baik di sisi usaha mengusir kuasa asing, maupun di sisi usaha mereka yang semula bergabung untuk meruntuhkan kuasa sah bangsa sendiri di bumi kita.

Dalam pada itu bukti paling nyata mengenai kekuatan kesetiakawanan atau solidaritas antar semua lapisan bangsa kita terjadi pada tahun 1948/1949. Jelasnya, mulai pada tanggal 20 Desember 1948, ketika pejuang-pejuang bangsa kita memasuki daerah pedesaan sekitar Yogyakarta untuk kemudian melancarkan Sarangan 1 Maret. Kejadian itulah yang diperingati dengan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, HKSN, setiap tanggal 20 Desember. Boleh kita renungkan apa yang terjadi, apabila pada saat itu seluruh rakyat kita tidak bersatu-padu menghadapi sekalian serangan Belanda. Justru karena seluruh rakyat kita di sekitar Yogyakarta, dalam semua lapisannya bersatu-padu, saling membantu, saling membagi apa yang ada pada mereka itu, maka seluruh rakyat kita, bersama pejuang-pejuang bangsa, mendapat kekuatan moril untuk melanjutkan usahanya mengusir kuasa asing dari wilayah kita.

Itulah pada hakekatnya contoh kekuatan manusia, bila terlaksana kesetiakawan, solidaritas, yang kukuh antar semua lapisan masyarakatnya.

Dalam sejarah bangsa sudah berkali-kali diupayakan pengu-siran campur-tangan pihak asing dari wilayah kita. Di masa-

masa awal upaya itu belum menjangkau keseluruhan bangsa kita secara nasional. Namun inti maksud untuk tidak memperbolehkan kuasa lain daripada kuasa sendiri di dalam wilayahnya, jelas tampak. Namun pada umumnya sekalian usaha gagal. Dan kegagalannya, sebagaimana dalam telaah sejarah kemudian dapat ditunjukkan, kebanyakan disebabkan karena tidak ada persatuan, keterpaduan dan kesetiakawanan di wilayah yang bersangkutan, bahkan terjadi penghianatan, ataupun perpindahan loyalitas ke pihak-pihak yang justru menguntungkan musuh yang dihadapi, acapkali dengan timbulnya perang saudara yang dimanfaatkan oleh kuasa asing, yang semestinya dianggap musuh. Contoh dengan mudah dapat kita sebutkan dalam peristiwa-peristiwa sejarah kita, sehingga tidak perlu dirinci semua secara satu-persatu di sini. Kita ingat saja berbagai perang setempat untuk mengusir kuasa Belanda yang semakin memasuki wilayah kita. Beberapa kali perang seperti itu berawal ataupun berakhir sebagai perang antar saudara sendiri, sehingga secara mudah dimanfaatkan dan menguntungkan musuh yang sedianya atau sesungguhnya mesti dihadapi bersama. Selain dari itu aneka jenis pemberontakan terhadap kuasa kolonial tercatat dalam sejarah kita di daerah pedesaan ataupun yang mulai dalam perusahaan perkebunan. Namun tidak ada yang berhasil. dengan sendirinya perbedaan persenjataan antara kuasa asing dengan bangsa kita sangat berpengaruh. Keadaan beda senjata, yang pada hakekatnya diakibatkan oleh "revolusi Industri" sejak abad ke-19, memang diakui merupakan faktor kuat dalam tumbuhnya kolonialisme secara luas dalam abad ke-19 itu. Namun, perlu diakui, bahwa dalam perang kemerdekaan kita beda persenjataan itu pun terdapat. Akan tetapi persatuan tekad sedemikian keras berbicara sehingga dalam perubahan suasana sesudah PD II — suaranya seketika tertangkap oleh dunia internasional secara menyeluruh. Andaikata bangsa kita bukan memperdengarkan suara persatuan tekad yang cukup keras, maka tujuan perang kemerdekaan mungkin belum tercapai pada saat-saat kita menginginkannya. Suasana dunia, yang sesudah PD II jenuh perang, memang membantu negara-negara yang menginginkan kemerdekaan dan kedau-

latan sendiri. Akan tetapi, sebagaimana dapat dilihat pada negara-negara bekas jajahan yang lain, usaha kemerdekaan tidak selalu tercapai pada saat itu sesuai apa yang diinginkan. Sedangkan justru karena bangsa kita dalam mengangkat senjata berhasil menunjukkan kebersatuan secara mantap, maka di bidang politik perundingan pun suara bangsa didengar secara mantap dalam dunia internasional.

Kenyataan, bahwa tujuan kemerdekaan kita dapat ditangkap oleh pihak musuh, terutama mereka yang melihat keadaan di lapangan, seperti, misalnya, bekas tahanan berbangsa Belanda, dapat dibaca dalam berbagai buku karangan mereka yang sekarang menulis tentang pengalamannya semasa tahanan kita. Prajurit yang sebelum diberangkatkan ke Indonesia diperintahkan untuk menindas pemberontakan kelompok pengacau kecil di Jawa sebagaimana di masa penjajahan selalu dihadapi, ketika di lapangan, dan apalagi setelah menjadi tawanan perang, melihat dari dekat, bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah sekedar 'pemberontakan kelompok kecil dan pengacau', melainkan benar-benar perang yang diyakini dan dengan tujuan yang nyata, yaitu kemerdekaan bangsa dan kedaulatan negara sendiri. Hal itu mereka sadari dari suasana kebersatuan yang mereka rasakan semasa ditahan.

Dalam kaitan itu pelajaran yang didapat dalam sekalian peristiwa sejarah kita, ialah, bahwa solidaritas sangat perlu, namun juga sangat perlu terhimpun secara cukup meluas. Tidak mungkin kita menghadapi bahaya musuh secara terpisah-pisah dan kecil-kecilan. Perlu tergalangkan kesatuan tekad secara menyeluruh.

Maka kiranya perlu kita sadari, betapa besarnya jangkauan kesetiakawanan atau solidaritas, sebagaimana melibatkan seluruh bangsa kita pada waktu perang kemerdekaan itu, baik untuk bidang politik, maupun dalam pengembangan sosial-budaya bangsa. Kita tidak mungkin menghadapi pembangunan dalam alam merdeka seperti sekarang, apabila rakyat kita secara keseluruhan tidak menunjukkan kebersatuan dan kesetiakawanan dalam melaksanakan dan mendukung perang kemerdekaan kita waktu itu.

Maka, pada gilirannya, dalam alam kemerdekaan sekarang ini, apalagi dalam menghadapi perkembangan di dunia internasional yang menyangkut segala bidang, kiranya perlu disadari pula, serta diyakini sepenuhnya, keperluan mutlak dari kesetiakawanan atau solidaritas bagi kita sebagai bangsa. Dunia internasional di masa kini cukup menunjukkan akibat-akibat buruk dari kurangnya rasa setiakawan antar bangsa sendiri dan antar bangsa-bangsa secara global.

Di dalam perbatasan bangsa kita sendiri cukup banyak masalah yang kita hadapi sebagai akibat langsung maupun sampingan dari pembangunan yang kini terlaksana. Di satu pihak pembangunan kita memang secara nyata berhasil. Tidak ada yang dapat menyangkal keberhasilan itu. Tanggapan dunia internasional mengenai keberhasilan pembangunan kita cukup nyata dan nyaring. Namun demikian, tidak dapat disangkal pula, bahwa hasil pembangunan yang belum merata sesuai harapan banyak pihak di dalam bangsa sendiri, menimbulkan masalah-masalah yang tidak kita inginkan.

Di sinilah tampak kepentingan solidaritas, kesetiakawanan sosial yang perlu dikembangkan antara semua lapisan masyarakat kita secara menyeluruh dan seluas-luasnya. Dalam kaitan ini kesetiakawanan sosial terutama diperlukan, karena pembangunan yang keberhasilannya belum merata secara mutlak, telah menimbulkan kesenjangan-kesenjangan sosial yang pada pihaknya menumbuhkembangkan kecemburuan sosial. Memang kecemburuan merupakan sifat manusia yang boleh dinamakan mendasar. Setiap keluarga yang mempunyai anak, menghadapi kecemburuan antar anak-anaknya, yang seolah-olah timbul tanpa sebab yang nyata. Mungkin dapat dikatakan, di satu pihak, bahwa kecemburuan memang diperlukan, supaya dapat terjadi saingan sehat yang menguntungkan perkembangan anak untuk mampu hidup mandiri selanjutnya. Namun, di lain pihak kecemburuan juga memiliki segi yang negatif, yaitu menumbuhkan rasa permusuhan dari pihak yang menilai dirinya kurang terhadap pihak yang dianggap lebih. Dalam pendidikan di setiap keluarga memang selalu diusahakan untuk sejauh

mungkin, menghilang rasa cemburu antar kakak-beradik. Akan tetapi, justru karena kecemburuan merupakan sifat manusiawi, maka selamanya akan dihadapi segi-segi negatifnya dalam kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh. Dan kecemburuan itu jelas akan mendapat kesempatan berkembang dan meluas, apabila terdapat kesenjangan yang terlalu menyolok antara kalangan di dalam masyarakat.

Mengenai kesenjangan dapat dikatakan, bahwa pada hakekatnya ini pun merupakan sifat khas masyarakat manusia. Manusia memang tidak terlahir sama, dalam arti pada dasarnya sudah akan mengalami beda watak, beda kecerdasan dan bakat, di samping lingkungan pun berpengaruh terhadap perkembangannya sebagai manusia. Namun, perbedaan-perbedaan itu perlu diusahakan supaya tidak tumbuh menjadi kesenjangan yang terlampau jauh menyolok.

Dalam menghadapi masalah kesenjangan yang menyolok dan dapat menajamkan kecemburuan, kesetiakawanan, solidaritas antar kelompok dan perorangan, telah terbukti dapat menangani segi-segi negatifnya secara baik.

Contoh dalam perkembangan sejarah bangsa pun dapat memberi kenyataan. pemimpin, secara perorangan atau sebagai kelompok yang berkuasa, baik yang berada di pihak pemberontak, maupun di pihak yang mengamankan kuasa sah, bila terasa bersetiakawan, menunjukkan solidaritas, dengan keadaan atau penderitaan masyarakat, betapa pun juga, telah terbukti mendapat sambutan dan dukungan masyarakat itu. Hal ini terlihat, misalnya, pada orang seperti Kahar Muzakkar, yang semula mendapat dukungan dan bantuan mutlak dari masyarakat sekitarnya, karena ia dinilai sangat membantu dan melindungi masyarakat pengikutnya itu, sekalipun sudah diketahui kesalahan langkahnya. Namun, pada saat ia lupa diri, maka masyarakat yang semula mendukungnya, seketika berbalik, dan kemudian tidak lagi membelanya dalam usaha, yang pada hakekatnya telah diketahui tidak benar. Semula masih saja ia dibela oleh sekelompok pendukung, karena ia dinilai baik memperlakukan mereka itu. Tetapi, kemudian tidak ada lagi

yang merasa segan untuk meninggalkannya menghadapi nasib sendiri. Rupa-rupanya emosi masyarakat paling tajam tersentuh oleh bukti kesetiakawanan sosial dari pihak yang dianggapnya berkuasa atau dilihatnya sebagai pemimpin. Kiranya hal itu yang mesti kita sadari.

Acapkali dikatakan, betapa pentingnya kita belajar dari sejarah bangsa sendiri. Kiranya pelajaran yang paling penting yang kita dapat ialah justru, bahwa dengan kesetiakawanan berhasil mencapai kemerdekaan. Sedangkan, sebaliknya, banyak usaha bangsa kita di masa lampau untuk mematahkan kuasa asing, tidak berhasil, antara lain, karena tidak ada kebersatuan dan solidaritas atau rasa setiakawanan di masyarakat kita sendiri.

Jelas, kiranya, bahwa untuk menghadapi masa depan bangsa, yaitu supaya dapat mencapai era yang kita sebut 'era tinggal landas', kita sangat memerlukan upaya pemerataan yang lebih adil, supaya tidak akan terdapat kesenjangan sosial yang terlampau menyolok, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat membahayakan stabilitas bangsa. Hal itu hanyalah tercapai, bila semua lapisan dapat merasakan kesetiakawanan, solidaritas, sosial dengan sesama bangsanya. Pada dasarnya tuntutan untuk hidup bersetiakawan, menunjukkan solidaritas, tidak lain hanya berarti, bahwa kita harus menyadari hidup di dunia ini bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk menjalankan fungsi sosial kita terhadap sesama bangsa sendiri, dan umat manusia secara menyeluruh. Namun, tuntutan hidup seperti itu ternyata tidak dapat dilaksanakan tanpa kesadaran dan upaya yang mantap. Kesadaran disertai upaya yang sungguh-sungguh sangat diperlukan guna mampu menghadapi masa depan bangsa yang lebih gemilang.

SEJARAH SEBAGAI SARANA PEWARISAN NILAI 45

M. Kharis Suhud

A. *Pendahuluan*

Merupakan kehormatan bagi diri saya, untuk dapat memenuhi permintaan Panitia Seminar Sejarah Nasional V yang berjudul "SEJARAH SEBAGAI SARANA PEWARISAN NILAI 45".

Namun satu hal yang perlu para peserta seminar ketahui bahwa saya bukan sarjana dan bukan ahli sejarah, tetapi hanya sebagai seorang warga negara yang pernah memperoleh "kesempatan sejarah" ikut serta mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia pada periode perang kemerdekaan tahun 1945-1949, dan selanjutnya mendapat kesempatan sejarah pula untuk ikut mengisi kemerdekaan.

Oleh sebab itu tulisan atau sajian yang akan saya berikan, mungkin masih jauh dari harapan Panitia dan para peserta seminar atau mungkin masih terlalu kering, ataupun bobot ilmiahnya masih kurang memadai.

Seminar sejarah Nasional dalam rangka pengkajian sejarah 45 tahun Indonesia Merdeka dengan mengambil tema: "SUMBANGAN SEJARAH DALAM PEMBINAAN BANGSA MENG-

HADAPI ERA TINGGAL LANDAS” momentumnya saya anggap sangat tepat, karena antara lain:

1. Kita telah mampu mewujudkan kerangka landasan pembangunan pada Pelita IV dan pada Pelita V ini akan kita mantapkan sebagai tahap akhir dari Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun Pertama.
2. Belajar dari pengalaman sejarah selama 4 Pelita, kita masih akan dihadapkan dengan berbagai kendala dan tantangan yang berat selama Pelita V yang sedang berlangsung ini, dan pada era tinggal landas nanti akan muncul masalah-masalah baru dan tampilnya tantangan-tantangan baru pula.
3. Pelaksanaan Pelita V merupakan tugas yang berat dan sekaligus merupakan babak kritis yang akan menentukan berhasil atau tidaknya kita melaksanakan pembangunan Nasional yang berkesinambungan, sehingga pelaksanaan Pelita V ini sungguh mempunyai arti yang sangat strategis.
4. Sasaran utama pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua akan diciptakan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir dan bathin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila.
5. Angkatan 45 secara berangsur-angsur secara wajar dan alamiah tengah menuntaskan tugas sejarahnya, sekaligus ber tekad untuk mewariskan nilai-nilai dan idealisme kejuangan-nya guna menjadikan generasi penerus yang tangguh, tanggap, dan tangguh serta mampu mewarisi semangat 45 dalam rangka memikul nasib dan tanggung jawab bangsa di masa depan.

Dari judul topik yang diberikan kepada saya, dalam batasan kemampuan pengetahuan saya, yang sekali lagi, hanya sebagai seorang warga negara yang pernah mendapat kesempatan sejarah seperti yang saya utarakan di atas, maka saya akan coba

mengungkapkan secara selang pandang saja apa yang saya ketahui, apa yang saya hayati, apa yang saya rasakan, dan apa yang pernah saya alami serta fungsi dan relevansi sejarah, khususnya "sejarah perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia" sebelum dan sesudah Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

B. Fungsi dan Lintasan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah merupakan rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dialami oleh setiap bangsa di muka bumi ini.

Suatu adagium yang tidak bisa kita bantah kebenarannya, bahwa fungsi sejarah dimanapun dan kapanpun dapat diangkat sebagai pedoman dan guru yang bijaksana dalam mengisi lembaran-lembaran sejarah berikutnya. Dalam kerangka berpikir "Trimatra" yaitu masa lampau, masa kini dan masa depan, kita memang tidak boleh meninggalkan makna dari peristiwa-peristiwa sejarah itu, karena sejarah mampu sebagai alat perjuangan, mampu sebagai sarana untuk memperkuat akar persatuan dan kesatuan bangsa, maupun sebagai sarana untuk mengobarkan semangat Patriotisme dan Nasionalisme serta semangat juang dalam upaya mencapai cita-cita bangsa seperti yang pernah kita buktikan pada periode perjuangan kemerdekaan nasional bangsa Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia, serta mampu sebagai sarana untuk menumbuhkan dan menebalkan kebanggaan berbangsa. Mengalir dari fungsi dan relevansi kesejarahan tersebut maka kita harus mampu memetik apinya sejarah itu sebab bagi suatu bangsa yang berkepribadian, dan ingin tumbuh menjadi kuat dan disegani, perlu belajar dan memetik apinya sejarah, karena sejarah hakekatnya dapat merupakan sumber ilham yang tidak pernah kering, sumber inspirasi yang tak pernah padam, sumber aspirasi yang tak pernah hilang. Mampu-tidaknya bangsa tumbuh menjadi kuat dan disegani sesuai dengan jalan yang dipilihnya, akan

sangat ditentukan oleh mampu-tidaknya bangsa itu belajar dan berdialog dengan sejarahnya. Belajar dari kegagalan dan keberhasilan, belajar dari keganasan dan kearifannya, dari keberingasan dan kelembutannya, serta belajar dari masa kejayaan dan masa surutnya.

Dari berbagai peristiwa dan pengalaman sejarah, maka kita dapat mengetahui posisi kita sekarang ini, ke arah mana akan dituju, kekuatan apa yang telah dan akan kita miliki, kendala dan tantangan apa yang akan timbul dan jawaban apa yang harus diberikan.

Dalam kaitan dengan aspek kesejarahan ini para perintis kemerdekaan kita berusaha membangkitkan kebanggaan dan kebesaran bangsa dengan mengetengahkan kejayaan kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lampau seperti kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Mataram. Namun akhirnya kita ketahui bahwa kerajaan-kerajaan tersebut tenggelam, yang disebabkan oleh rapuhnya kekuatan-kekuatan dari dalam tubuh kerajaan itu sendiri maupun unsur-unsur kekuatan dari luar. Ini semua memberikan pelajaran bagi generasi-generasi berikutnya bahwa kadang-kadang unsur-unsur dan peristiwa-peristiwa yang timbul dari luar tubuh bangsa itu akan sangat dominan. Oleh sebab itu kita perlu sekali mengetahui dan mempelajari peristiwa-peristiwa/perkembangan dunia dengan segala aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan bangsa kita. Adanya anggapan/pepatah yang menyatakan bahwa "sejarah itu berulang" memang dirasakan memang ada benarnya seperti misalnya keadaan dunia sekarang ini bila dibandingkan dengan tahun-tahun semasa Perang Dunia ke-2.

Setelah kerajaan-kerajaan (Sriwijaya, Majapahit, Mataram) tenggelam maka bangsa kita terus-menerus menjadi negara jajahan dan bangsa kita terus-menerus berada di alam kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan hampir tiga setengah abad.

Perlawanan-perlawanan bersenjata terhadap kaum penjajah (yang lebih bersifat kedaerahan) seperti perang Diponegoro,

Imam Bonjol, Pattimura, Hassanuddin, Cut Nyak Dien dan lain-lain selalu mengalami kegagalan, sehingga tidak mampu mengangkat harkat, martabat dan harga diri bangsa Indonesia.

Belajar dari kegagalan yang dialami oleh pendahulu-pendahulunya maka perjuangan berikutnya tidak melalui perlawanan bersenjata akan tetapi melalui jalan pendidikan seperti yang dilakukan oleh pergerakan Budi Utomo tahun 1908, dengan pangkal tolak berpikir bahwa dengan memberantas kebodohanlah maka perjuangan bangsa akan berhasil. Perjuangan lewat pendidikan ini akhirnya dapat membangkitkan semangat patriotisme, nasionalisme, semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang senasib sepenanggungan, sehingga teretuslah Sumpah Pemuda tahun 1928. Berbarengan dengan itu timbullah partai-partai politik yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Puncak dari pergerakan perjuangan tersebut adalah Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi ini hanya sekali terjadi, oleh karena itu mempunyai nilai yang tak terhingga ampuhnya bagi bangsa Indonesia. Sehari setelah Proklamasi yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 disusul dengan "Deklarasi" yang berwujud pengesahan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam lintasan sejarah Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia sebelum Proklamasi Kemerdekaan, sebenarnya telah tumbuh kesadaran akan konsepsi atau paham bagi bangsa kita yang disebut paham integralistik. Integralistik adalah suatu semangat yang mengatasi paham golongan, serta mendahulukan kepentingan umum atau bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan perorangan.

Dalam wujud yang lebih nyata, paham dasar ini telah menumbuhkan kesadaran masyarakat/Bangsa Indonesia untuk melahirkan sosok tubuh yang ternyata telah berkembang menjadi suatu kekuatan yang melahirkan negara kebangsaan Indonesia. Paham integralistik ini telah terangkat kepermukaan menjadi

nilai '45 yang tidak boleh ditinggalkan, karena nilai *inilah yang telah melahirkan Kebangkitan Nasional pada awal abad ke-20. Nilai ini pula yang mencetuskan Sumpah Pemuda 1928 dan mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nilai ini pula yang melahirkan negara Kebangsaan Indonesia.*

Setelah Proklamasi Kemerdekaan bangsa kita masih dihadapkan dengan berbagai cobaan dan ujian.

Masa antara tahun 1945 sampai tahun 1965 bangsa kita diuji kemampuan untuk mempertahankan kemerdekaan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Masa ini ditandai oleh bermacam-macam usaha untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, sehingga dalam masa ini nampaknya Bangsa Indonesia berada dalam suasana mencari-cari bentuk jati dirinya. Hal ini mengakibatkan bahwa banyak permasalahan yang sebenarnya tidak sejalan atau bertentangan dengan Pancasila terangkat ke permukaan.

Suasana persatuan dan kesatuan bangsa sedikit banyak telah diuji dengan berbagai pemberontakan, baik yang bersifat separatisme kedaerahan ataupun yang bersifat ideologis politis.

Berdirinya partai-partai politik sebagai konsekuensi dari maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, di satu pihak dapat dilihat sebagai bagian dari proses demokratisasi, namun di lain pihak berdirinya partai-partai justru mengakibatkan pengkotak-kotakan golongan berdasarkan pada kelompok aliran ideologi masing-masing. Hal ini nampaknya ikut mempertajam proses pertarungan kekuatan-kekuatan politik dalam usahanya memperoleh ataupun merebut kekuasaan. Partai-partai politik itu secara sadar *mengacu kepada pandangan ideologinya* serta kepada tokoh-tokoh masing-masing daripada kepada dasar negara ataupun kepada ideologi nasional. Suasana ini berkembang menjadi konflik ideologis dan memuncak dengan terjadinya konflik ideologis secara terbuka dalam Sidang Konstituante di Bandung tahun 1956 – 1959.

Hal itu menyebabkan terjadinya instabilitas. Situasi yang demikian inilah yang menjadi salah satu dasar dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Dengan Dekrit Presiden itu krisis status konstitusional dapat diakhiri, tetapi Dekrit itu ternyata belum berhasil mengatasi konflik ideologi dan beberapa masalah politik yang telah ada.

Suasana setelah Dekrit Presiden ternyata berkembang dengan semakin tajamnya pengkotak-kotakan, baik berdasarkan ideologi maupun kepentingan politik. Suasana revolusioner, jor-joran manipolis, saling mencurigai mewarnai suasana antara tahun 1959 sampai tahun 1965.

Demokrasi terpimpin yang diharapkan dapat mengembangkan demokrasi justru berubah menjadi pemupukan kekuasaan pada diri pemimpin negara.

Dengan kata lain dalam masa ini Pancasila dan UUD '45 yang ada, tidak dijadikan acuan nasional. Pancasila tidak dijadikan landasan pokok dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, bahkan sebagai gantinya muncul thema-thema revolusioner dan nasakom.

Padahal Pancasila seharusnya dibawakan menurut wataknya yang integratif, berkeselarasan dan berkekeluargaan. Begitu pula demokrasi yang kita anut yaitu demokrasi Pancasila tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi-fungsi Demokrasi Pancasila seharusnya menjadi sarana untuk menentukan tujuan sarana untuk melestarikan pola kehidupan dan kenegaraan sarana untuk memadukan bangsa, sarana untuk meredakan ketegangan, dan sarana untuk menapis masukan (input) yang perlu diserap bagi kemajuan. Di samping itu telah pula dilupakan aspek-aspek Demokrasi Pancasila baik aspek wujudiah, maknawiah, organisasi, kaidah, tujuan maupun aspek semangat.

Suasana kalut yang demikian itu telah menjadi dasar utama dari kekuatan-kekuatan Orde Baru untuk segera memperbaiki situasi dan mengembalikan bangsa Indonesia ke rel yang sebenarnya, dengan satu tekad untuk melaksanakan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen serta melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan.

C. Semangat dan Nilai-Nilai 45

Sebagaimana yang telah saya ungkapkan di muka bahwa Proklamasi Kemerdekaan 1945 yang hanya terjadi sekali saja, hakekatnya merupakan titik kulminasi dari rangkaian perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun sebelumnya melalui puncak-puncak manifestasi pergerakan seperti apa yang dinamakan pergerakan "Budi Utomo", yang disebut "Kebangkitan Nasional" tahun 1908 dan "Sumpah Pemuda" tahun 1928. Perjuangan pergerakan kemerdekaan itu telah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sini jelas bahwa kemerdekaan yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu bukan merupakan tujuan akhir, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Selanjutnya apabila kita amati dan kita pahami secara mendalam dan menyeluruh, maka semangat dan nilai 1945 akan terlihat dan tergambar secara jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang hekekatnya merupakan penguatan jiwa proklamasi kemerdekaan.

Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat Pancasila itulah merupakan sumber aspirasi dan motivasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia untuk tetap hidup dalam suasana merdeka lahir dan bathin yang telah diperjuangkan sejak dahulu kala. Pembukaan UUD 1945 yang telah dirumuskan secara padat dan hidmat mengandung makna yang sangat dalam serta mempunyai nilai yang universal dan lestari.

Apabila kita tapis peristiwa-peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur seperti yang terkandung di dalam Pembukaan Un-

dang-Undang Dasar 1945, maka kita dapat temukan mutiara-mutiara atau nilai-nilai yang sangat berharga antara lain :

1. **Nilai Idiologis** : yang mengetengahkan bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak bisa dipisahkan dari jiwa dan pandangan hidup bangsa kita yaitu Pancasila dan UUD 1945, sebab negara yang dilahirkan oleh Proklamasi Kemerdekaan adalah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karenanya kobaran api semangat para pejuang yang sanggup mempertahankan Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945 harus kita warisi dan harus mampu kita wariskan kepada generasi penerus.
2. **Nilai politis** : bahwa para pejuang Angkatan 45 ternyata dapat "survive" dan pantang menyerah dalam perang kemerdekaan, berkat kobaran patriotisme, nasionalisme, serta persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tanpa mempersoalkan asal-usul, daerah, suku, status sosial, agama atau golongan. Nilai-nilai inipun wajib kita hayati dan kita lestarikan serta kita wariskan kepada generasi penerus.
3. **Nilai historis** : membuktikan bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah atau pemberian dari bangsa lain, tetapi direbut dari tangan penjajah dengan perlawanan yang bersemboyankan "merdeka atau mati" yang dilakukan oleh tentara bersama seluruh rakyat dalam satu untaian kemanunggalannya. Karena itu manunggalnya tentara (ABRI) dan rakyat merupakan syarat mutlak, serta harus kita lestarikan eksistensinya.
4. **Nilai edukatif** : bahwa nilai perjuangan 45 harus mampu menjadi wahana untuk meningkatkan motivasi dan kobaran

semangat bagi generasi penerus, untuk mampu mewarisi nilai-nilai dan semangat 45 agar menjadi generasi yang tangguh, penuh idealisme perjuangan serta dapat menjadi pejuang-pejuang bangsa yang selalu siap membela dan membangun bangsanya sebagai pengamalan Pancasila dalam era tinggal landas menuju masyarakat Pancasila yang adil dan makmur.

D. Penutup

Prestasi perjuangan dan pembangunan di segala bidang yang telah dapat kita capai hingga sekarang ini, di mana kita semua terlibat langsung maupun tidak langsung di dalamnya, harus kita amankan bersama, dan harus dapat kita pelihara dengan sebaik-baiknya, untuk selanjutnya kita kembangkan dan kita tingkatkan, baik kualitasnya dalam rangka menghadapi dan memenuhi tuntutan sejarah dan masyarakat yang dinamis dan makin berkembang, sekaligus dalam rangka menghadapi berbagai kendala tantangan dan cobaan yang makin hari makin bertambah kompleks sebagai akibat logik dari keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Dari uraian selintas seperti terungkap di atas, maka diharapkan agar aspek kesejarahan Bangsa Indonesia baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan yang pernah dan telah menjadi dasar nilai juang angkatan '45 dan yang mendahuluinya, melalui berbagai jalur, dapat dijadikan acuan sekaligus dapat merupakan api berkobarnya semangat juang para generasi penerus, sehingga fungsi sejarah sebagai sarana pewarisan nilai-nilai '45 dapat menjadi kenyataan.

Demikianlah, sekedar apa yang mampu saya sampaikan dalam forum seminar ini, dengan harapan mudah-mudahan para Generasi Penerus mampu mewarisi dan melestarikan semangat dan nilai-nilai juang '45 dalam menyongsong era tinggal landas.

Terima kasih.

PERANAN SEJARAH DALAM PEMBANGUNAN

Suatu Uraian Tentang Wawasan Jati Diri, Sejarah dan Pembangunan

Ismail

Pendahuluan

Mengawali seminar ini, sebagai insan Pancasila yang senantiasa iman dan taqwa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita semua dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menyertai acara Seminar Sejarah Nasional dalam rangka Pengkajian Sejarah 45 Tahun Indonesia Merdeka yang berlangsung tanggal 27–30 Agustus 1990 di Semarang ini.

Hadlirin Sekalian yang berbahagia.

Ketika Saudara Direktur Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam suratnya tertanggal 26 Juni 1990 Nomor 211/F2/U.90 meminta kesediaan saya untuk bertindak sebagai pembicara dalam seminar ini, maka ada empat pertanyaan pokok yang menuntun diri saya untuk menyusun makalah ini,

Pertama, *pokok persoalan apakah* yang harus saya bahas yang kiranya dapat berfungsi sebagai titik temu perhatian di antara para hadirin sekalian.

Kedua, *sumbangan pikiran apakah* yang harus saya kemukakan agar sub-stansial dapat merupakan pengungkapan sesuatu yang relatif baru, utamanya guna memberikan keluasan perspektif dan cakrawala berpikir bagi kita bersama.

Ketiga, dengan *analisis yang bagaimana* yang harus saya gunakan agar apa yang saya kemukakan mampu mempertemukan dunia konsepsi mereka yang berkecimpung dalam bidang terapan (praktisi) dan mereka yang bergumul dengan ilmu pengetahuan (ilmuwan).

Keempat, *implikasi apa yang diharapkan timbul* dari apa yang saya kemukakan tadi, terhadap perubahan kehidupan yang ingin dicapai kelak.

Setelah merenungkan empat permasalahan tersebut, bahwa suatu uraian tentang "Wawasan Jati Diri, Sejarah dan Pembangunan", utamanya yang menyangkut Peranan Sejarah Dalam Pembangunan kiranya *dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut*.

Pertama, sebagaimana kita ketahui bersama Peran Sejarah Dalam Pembangunan, utamanya dalam masa-masa transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern; dari masyarakat agraris yang siap menyongsong era industrialisasi dan tinggal landas, masalah ini senantiasa *menjadi titik perhatian kita yang utama*.

Kedua, pokok permasalahan tadi kaya dengan *alternatif nilai, strategi* dan *indikator* yang barangkali belum banyak terungkap.

Ketiga, pokok permasalahan tersebut dapat dipecahkan dan disajikan dalam *derajad middle range (jalan tengah)* sehingga dapat berfungsi sebagai titik temu antara praktisi dan teoritis. Dan akhirnya permasalahan tentang Wawasan Jati Diri, Sejarah dan Pembangunan, utamanya yang menyangkut Peranan Sejarah

dalam Pembangunan, dapat mendorong kita untuk berpikir *introspektif, reflektif* dan mudah-mudahan proyektif di dalam menindak lanjuti serta menapaki arus dinamikanya pembangunan lebih lanjut.

Hadlirin sekalian yang berbahagia.

Sebagaimana diketahui beberapa waktu yang lalu, kita telah berhasil *merampung tuntaskan pembangunan lima tahun yang keempat*, dan saat sekarang kita memasuki tahapan pelaksanaan Pelita V.

Apabila ditinjau dari kesinambungan pembangunan yang telah dilaksanakan, sejak kelahiran Orde Baru sampai sekarang, Pelita V merupakan bagian dari rangkaian usaha-usaha pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian kita dapat *menyaksikan tahapan dan peningkatan* kemajuan yang telah kita capai dalam pembangunan selama ini, baik dalam skala nasional maupun di tingkat daerah.

Berbagai masalah dan hambatan telah kita alami dalam tahun yang lampau, namun dengan jerih payah yang telah kita curahkan bersama secara nasional semua itu berhasil diatasi atau sedang kita selesaikan. Keberhasilan pembangunan yang telah diraih sampai sekarang telah menjadi modal yang sangat berharga untuk dikembangkan lebih lanjut dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ditinjau dari arah pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam GBHN, maka Pelita V *mempunyai kedudukan yang sangat penting*, karena pada akhir Pelita V harus sudah teripta landasan yang kuat bagi bangsa kita untuk tumbuh dan berkembang terus sehingga dalam Pelita VI pembangunan Indonesia dapat memasuki proses tinggal landas untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Untuk dapat membahas lebih lanjut judul yang diangkat dalam forum ini, kiranya perlu ada satu bahasa dalam memberikan arti pentingnya *Peranan Sejarah Dalam Pembangunan*, se-

iring dengan laju dinamikanya pembangunan berikut hasil-hasil yang dicapai selama empat Pelita ini. Dan dari sanalah diharapkan dapat kita temukan upaya-upaya mewujudkan pembangunan yang berwawasan sejarah, untuk menopang suksesnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, serta implementasinya di Jawa Tengah ini.

Dengan alur pikiran tersebut, maka uraian saya ini akan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

- Kesatu : PERANAN SEJARAH DAN PEMBANGUNAN.
- Kedua : PERLUNYA KESADARAN SEJARAH DALAM PEMBANGUNAN.
- Ketiga : MENARIK PELAJARAN DARI SEJARAH : PERLUNYA MASYARAKAT YANG BERKE-TAHANAN DALAM PEMBANGUNAN.
- Keempat : REFLEKSI KESEJARAHAAN DALAM PEMBA-NGUNAN MELALUI STRATEGI WAWASAN JATI DIRI DI JAWA TENGAH.
- Kelima : PENUTUP.

I. PERANAN SEJARAH DAN PEMBANGUNAN

Berbicara tentang peranan sejarah dan pembangunan, *me-mang* merupakan sesuatu yang tidak boleh tidak harus terus menerus diupayakan sebagai suatu nilai *intrinsik* yang mempuny-ai nilai yang teramat penting dan menentukan. Sebagaimana kita ketahui bersama Garis-garis Besar Haluan Negara (*GBHN*) telah menggariskan apa yang harus dicapai oleh pembangunan nasional :

"Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pemba-ngunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia".

Dalam hal ini manusia Indonesia seutuhnya, yang merupakan perwujudan atau citra ideal manusia Indonesia, digambarkan sebagai berikut :

”... pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah ... melainkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya ... keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, serta lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antar bangsa-bangsa ... keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan akhirat”.

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia menuntut keseimbangan multidimensional pembangunan nasional. Gambaran manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana digariskan dalam GBHN tadi, *menghendaki keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara pelbagai dimensi monodualistik sifat manusia* : keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kehidupan jasmani dan rohani, antara kehidupan fisik dan psikis, antara hakikinya sebagai individu dan warga masyarakat Indonesia. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya harus mencakup pelbagai matra manusiawi seperti : pembangunan fisik, mental intelektual, emosional, moral, kewarganegaraan, sosial yang kesemuanya berorientasi pada kaidah negara yang fundamental Pancasila dan UUD 1945.

Dengan mengacu kepada pengertian Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya, dengan demikian dimensi pembangunan berspektrum luas, mencakup mulai dari sekedar pemberian pelayanan sosial (social services), sampai pada aspek-aspek yang lebih mendasar seperti memperkuat bangunan struktur kehidupan sosial masyarakat dan ikatan keluarga, mengembangkan sikap percaya pada diri sendiri dan sebagainya.

Berkaitan dengan itu Ilmu Sejarah juga mengajarkan kepada kita, bahwa hari depan tiap bangsa tidak berkembang dalam suatu vacuum. Melainkan berkembang dari realitas keadaan sekarang. Dengan lain perkataan, hari depan berkait erat kesinam-

bungannya dengan hari sekarang. Dan hari sekarang berkait erat pula kesinambungannya dengan hari kemarin. Jelasnya, antara hari kemarin dengan hari sekarang dan dengan hari depan ada suatu kaitan tali menali kesinambungan.

Itulah yang diajarkan oleh ilmu sejarah kepada kita, yaitu bahwa pada *hakekatnya Ilmu Sejarah berwatak tridimensional*, dalam waktu yang mengalir tanpa henti-hentinya, yaitu kesinambungan antara hari *kemarin*, *hari sekarang* dan *hari depan*.

Sudah barang tentu pusat perhatian ilmu sejarah adalah "The Past"; adalah hari kemarin. Bidang penyelidikannya adalah hari kemarin pula, tanpa batas, mulai dari zaman pra-sejarah, dan mulai Zaman proto-sejarah, Zaman kuno dan Zaman baru, sampai ke Zaman Modern.

Ilmu Sejarah *mencatat dan mengkoleksi segala kejadian-kejadian masa lampau yang penting-penting, kemudian menyeleksi mana dari kejadian-kejadian itu yang mempunyai daya pengaruh menentukan (decisive), mana yang mempunyai daya pengaruh dominan, dan mana yang mempunyai daya pengaruh besar, cukupan dan kecil, terhadap perkembangan selanjutnya.*

Pada saat fakta-fakta sejarah itu dikoleksi dan kemudian diseleksi untuk kemudian dirangkaikan dalam suatu berita dan cerita, maka ilmu histori memasuki bidang historiografi, yaitu bidang penulisan sejarah. Bahan-bahan bakunya diambil dari prasasti-prasasti kuno dan arsip-arsip kuno serta modern. Bahan-bahan penunjangnya diambil dari hasil ilmu *archeology* (studi tentang penggalian bumi purbakala), hasil ilmu *anthropology* (studi tentang pertumbuhan manusia sejak purbakala), hasil *ilmu paleontology* (studi tentang fosil-fosil) dan ilmu penunjang lainnya.

Kesemuanya dikaitkan dengan "common sense", logika dan *imajinasi* oleh penulisnya.

Dengan demikian, maka jelaslah kiranya, bahwa antara histori dan historiografi ada kaitannya, tetapi juga ada perbedaannya. Salah satu dari pada perbedaan yang menonjol ialah, bahwa apabila fakta-fakta *histori lebih banyak mengandung*

obyektivitas, maka cerita-cerita historiografi lebih banyak berkadar subyektivitas. Yang terakhir ini tentunya ada hubungannya dengan falsafah hidup serta kepribadian si penulisnya.

Mengingat adanya perbedaan antara histori dan historiografi, serta adanya kaitan kesinambungan antara hari depan dengan hari sekarang dan dengan hari kemarin, sebenarnya sudah menyentuh salah satu isi pokok apa yang kita namakan kesadaran sejarah itu.

Kesadaran sejarah adalah lebih dari sekedar mengetahui fakta-fakta sejarah. *Kesadaran sejarah memang harus dimulai dengan mengetahui fakta-fakta sejarah.* Malahan ada kalanya harus pula pandai menghafalkan kronologi tahun-tahun kejadian dalam sejarah itu. Tanpa adanya ingatan yang kuat akan kejadian-kejadian dimasa lampau kita tidak dapat mengetahui sejarah. Meminjam pendapat seorang ahli, secara analogi maka sejarah dapat diberi definisi sebagai ingatan kemanusiaan yang tercatat.

Namun pengetahuan tentang fakta-fakta sejarah saja, dan ingatan akan adanya fakta-fakta itu saja, belum menjamin kesadaran sejarah. Kesadaran atau "*consciousness*", adalah lebih dari itu. Ia mencakup segala cipta-rasa-karsa kita yang bersemayam dalam hati nurani kita.

Kesadaran sejarah adalah *pengetahuan tentang fakta-fakta sejarah, plus pengetahuan tentang hubungan sebab-musababnya antara fakta-fakta itu.* Kemudian kesadaran sejarah meningkatkan alam pikiran kita kearah pengetahuan adanya hukum-hukum tertentu dalam perkembangan sejarah itu, dengan segala logika dan konsekuensinya. Akhirnya kesadaran sejarah juga harus pandai mengisi hati nurani kita dengan hikmah kearifan dan kebijaksanaan yang terkandung dalam segala perkembangan sejarah itu dengan segala cermin dan pelajarannya untuk masa sekarang dan masa depan.

Pokoknya kesadaran sejarah mencakup *pertama*, pengetahuan tentang fakta-fakta sejarah serta hubungan casualnya; *kedua*, pengisian alam pikiran kita dengan logika; *ketiga*, pening-

katan hati nurani kita dengan hikmah kearifan dan kebijaksanaan, untuk menghadapi masa-masa sekarang dan masa depan dengan belajar dan bercermin kepada pengalaman-pengalaman masa lampau.

Dengan begitu *kesadaran sejarah* adalah suatu sikap kejiwaan atau "*mental attitude*" dan "*state of mind*", yang merupakan kekuatan untuk ikut aktif dalam proses dinamikanya sejarah. Maknanya ialah, bahwa semua kejadian didalam sejarah itu mengandung pelajaran, dan bahwa kita semua selalu menjadi kebijaksanaan setelah ada suatu peristiwa sejarah terjadi. Kita bukan keledai yang akan tertumbuk dua kali kepada tiang dan batu yang sama. Tetapi justru untuk bijaksana lebih dulu, sebelum sesuatu peristiwa terjadi, itulah hikmah kearifan kesadaran sejarah.

Kita tidak akan meninggalkan sejarah, oleh karena sejarah berjalan terus dengan kehidupan kita. Tanah tumpah darah merupakan suatu kesinambungan, dan kita semua adalah pekerja yang membanting tulang untuk kebesarannya. Dari zaman lampau kita menerima kekuatan yang dibutuhkan untuk zaman sekarang, dari zaman lampau kita menerima niat tujuan dan dorongan keberanian untuk hari depan. Mari kita menyadari tanggung jawab kemerdekaan kita, agar kita makin patut menerima kehormatan sebagai bangsa Indonesia.

Dari kedua kutipan di atas jelaslah kiranya bahwa kesadaran sejarah dapat merupakan motor penggerak bagi pembangunan.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan kita 45 tahun yang lalu, maka hari depan Indonesia yang kita cita-citakan bersama mencakup *tiga kerangka*, yaitu :

- Pertama : *Negara Kesatuan* dan Negara Kebangsaan dalam bentuk Republik yang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke.
- Kedua : *Masyarakat yang adil dan makmur*, materiil dan spirituil, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu.

Ketiga : *Dunia Internasional Baru*, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; serta berlandaskan persahabatan dengan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia - Afrika dan khususnya dengan negara-negara tetangga dekat.

Kita semua mengetahui, bahwa sebagian dari cita-cita itu sudah tercapai; seperti umpama Negara Republik Kesatuan dan Negara Kebangsaan dari Sabang sampai ke Merauke, bersatu dan berdaulat. Cita-cita itu bukan hari depan Indonesia lagi. Melainkan sudah menjadi kenyataannya hari sekarang, dan juga sudah lama masuk dalam hari kemarin.

Kita semua juga mengetahui, bahwa Dunia Internasional Baru yang kita cita-citakan dulu itu, kini sebagian telah tercapai. Sekalipun jauh belum seluruhnya, namun berkat Konferensi AA Bandung maka banyak negara-negara Asia - Afrika telah memperoleh kemerdekaannya, dan dengan demikian salah satu sumber ketegangan dunia yang membahayakan perdamaian Internasional dapat diberantas. Demikian juga, persahabatan kita dengan negara-negara tetangga dekat kita serta dengan negara-negara Asia - Afrika dan lain-lainnya dari Dunia Ketiga telah kita rintis dan kita tingkatkan, bersamaan dengan pemeliharaan persahabatan dengan semua negara lainnya di dunia ini. Dengan lain perkataan, sebagian dari cita-cita di bidang luar negeri jelas bukan hari depan lagi bagi Indonesia. Melainkan sudah menjadi kenyataannya hari sekarang, dan malahan telah menjadi bagian dari hari kemarin.

Yang menjadi hari depan Indonesia adalah cita-citanya tentang masyarakat adil dan makmur, materiil dan spirituil, dalam wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia, dimana seluruh rakyat kita hidup aman dan tenteram, kuat dan sentosa, rukun dan damai.

II. PERLUNYA KESADARAN SEJARAH DALAM PEMBANGUNAN

Kenyataan menunjukkan bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak selamanya dihiasi oleh keberhasilan yang gilang gemilang. Kita juga harus mengakui bahwa, *perjuangan suatu generasi tidak selamanya juga menghasilkan sukses besar.*

Sebaliknya mengingat pasang surutnya perjuangan, sejarah kita memuat lembaran-lembaran yang diwarnai oleh tantangan, kelemahan dan bahkan juga kegagalan.

Oleh karenanya, kita perlu berupaya agar bangsa Indonesia tetap menjadi kuat dan sentosa. Jelasnya, pada penyelenggara negara, para pemimpin masyarakat dan segenap kekuatan sosial politik harus tetap bersikap wajar ketika mereka mencapai sukses; tetapi juga *tetap memiliki semangat juang yang tinggi pada saat-saat bangsanya mengalami masa yang sulit dan rawan.*

Kita yakin bahwa bangsa Indonesia akan berhasil menciptakan masyarakat adil makmur yang berkeadilan sosial, asalkan kita yang disertai tugas melaksanakan manajemen nasional benar-benar melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, bertekad membela kepentingan rakyat, benar-benar memantapkan demokrasi Pancasila, sehingga rakyat secara bergairah berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Oleh karenanya mengingat uraian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa kita semua perlu memiliki kesadaran sejarah dan juga berupaya untuk menarik pelajaran dari pengalaman dimasa lampau, baik pengalaman yang positif maupun pengalaman yang negatif.

Sikap yang demikian, dibarengi oleh kesediaan mawas diri, diperlukan untuk melahirkan gagasan dinamis yang membawakan kemajuan dan pembaharuan. Dengan perkataan lain, dari sejarah bangsa Indonesia sendiri itulah kita dapat menggali kekuatan-kekuatan untuk menjawab tantangan dan mengatasi hambatan-

an, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang merupakan dampak dari percaturan politik internasional.

Sebagai bahan untuk mencapai hasil positif dalam usaha memetik pelajaran dari pengalaman sejarah, dibawah ini dikutip beberapa pengertian yang berasal dari para ahli yang berbunyi sebagai berikut.

"Fakta-fakta mengenai sesuatu, baik mengenai kejadian atau mengenai sikap pelaku politik, pada hakekatnya timbul dalam pikiran pengamat atau sejarawan. Oleh karenanya dapat disebut subyektif. Namun agar permasalahannya dapat dipelajari secara obyektif, maka fakta-fakta itu perlu ditempatkan dalam eksistensi yang merdeka diluar pikiran emosional dari manusia yang bersangkutan. Dengan demikian akan diperoleh pengetahuan dan penilaian yang tak memihak dan benar, bebas dari reaksi pribadi dari seseorang".

Mengingat pendapat tersebut dan agar upaya memetik pelajaran dari pengalaman di masa lampau efektif, pembahasan persoalan-persoalan, termasuk mengenai cara berpikir serta perilaku para pelaku politik dalam kurun waktu yang bersangkutan, *akan dilaksanakan secara proporsional dengan memperhatikan situasi politik, kondisi masyarakat, dan faktor-faktor obyektif lainnya.*

Kita semua menyadari bahwa riwayat dari suatu generasi tidaklah berdiri sendiri. Sebaliknya, sejarah perjuangan bangsa Indonesia *mempunyai sifat kesinambungan.* Kongkretnya, lahirnya dan peranan *Angkatan 66* tidak dapat dipisahkan dari *prestasi Angkatan 45* yang mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Tingginya semangat perjuangan *Angkatan 45* merupakan kelanjutan dari rintisan jalan dari *Angkatan 28*, khususnya prakarsanya hingga melahirkan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa dan bahwa kematangan berpikir dari *Angkatan 28* merupakan peningkatan dari jiwa Kebangkitan Nasional yang dipelopori oleh para pemimpin Pergerakan Kebangsaan *sejak tahun 1908.*

Berdasarkan suatu asumsi bahwa proses sejarah seperti dilukiskan di atas itu mengandung pengalaman-pengalaman yang berharga sebagai bahan pelajaran, maka dapatlah disimpulkan bahwa generasi penerus perlu memiliki kesadaran sejarah.

Demikian pula dibarengi dengan *sikap mawas diri generasi Angkatan 45 yang menyerahkan tugas-tugasnya dan fungsi kepemimpinan kepada generasi penerus, harus menunjukkan balans dari karyanya*, baik mengenai segi-segi positif maupun kelemahan-kelemahan yang telah terjadi di waktu-waktu yang silam. Dengan demikian generasi penerus akan memperoleh bekal, baik mengenai pemikiran maupun mengenai perilaku yang bermanfaat.

Jika kita mengadakan penilaian terhadap sikap dan perilaku dari pelaku-pelaku politik dalam suatu kurun waktu yang telah lewat, kita seyogyanya perlu menerapkan suatu kode etik. Artinya hal itu perlu dilakukan secara obyektif dan sejauh mungkin bebas dari pemikiran serta sikap subyektif dan emosional.

Presiden Suharto pernah menegaskan mengenai pentingnya sikap mawas diri, yang perlu diterapkan demi tercapainya hasil-hasil perjuangan. Gagasan Kepala Negara itu berbunyi sebagai berikut.

"Kita harus mampu menggali dan memelihara kekuatan yang telah membuat kita mencapai hasil-hasil perjuangan di masa lampau. Kita juga harus *berani mawas diri* seraya mengakui kekurangan dan kelemahan kita di masa silam, yang telah membuat perjuangan kita belum mencapai sasaran yang kita harapkan".

Jelaslah kiranya bahwa isi sambutan tertulis Presiden Suharto termaksud, mengandung suatu anjuran agar kita semua berani mawas diri sewaktu mengkaji kesalahan dan kelemahan kita dimasa silam.

Dengan sikap mental yang bebas dari pemikiran subyektif dan emosional dalam menilai keadaan negara dan masyarakat serta pelaku-pelaku politiknya, *diharapkan agar dapat ditemu-*

kan butir-butir pemikiran jernih dan gambaran mengenai perkembangan negara dan masyarakat yang tepat, untuk mencegah jangan sampai terulang kembali suatu kegagalan yang mau atau tidak mau akan dihadapkan pada generasi mendatang.

Dalam arti itulah kita memberikan makna kepada sejarah kita. Dalam arti itu pula kita perlu memiliki kesadaran sejarah seperti dijelaskan diatas.

Untuk dapat merealisasikan tujuan nasional seperti diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, disamping diperlukannya kemandirian manusia dan kualitas kehidupan masyarakat, kita semua khususnya generasi penerus, *juga harus memiliki kemampuan untuk memetik pelajaran dari pengalaman di masa lampau.* Artinya, kita perlu memanfaatkan pemikiran, sikap dan perilaku dari generasi pendahulu sebagai contoh dari suri tauladan, sedangkan kesalahan atau kelemahan perlu dicegah supaya tidak terulang kembali.

Generasi penerus tentunya akan menyadari bahwa menjelang datangnya tahun 2000-an mereka harus sudah siap untuk melanjutkan perjuangan Angkatan 45 guna mewujudkan cita-cita nasional yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945.

Bahan-bahan seperti dijelaskan diatas itu sangat diperlukan untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan atau untuk memanfaatkan pemikiran, sikap, dan perilaku dari generasi terdahulu yang positif, sebagai contoh dan suri tauladan.

Jika generasi penerus mampu untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia-manusia Pancasila yang mandiri; jika mereka secara sadar menerapkan nilai-nilai luhur dan norma-norma kehidupan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta tetap berjuang untuk kepentingan negara dan rakyat, kita semua yakin bahwa generasi penerus akan mampu membangun masa depan bangsa Indonesia yang cerah.

Bangsa yang kokoh adalah bangsa yang tahu diri ketika ia mencapai sukses besar, dan juga tetap memiliki semangat tinggi

ketika ia mengalami masa yang sulit. Bangsa yang kokoh adalah bangsa yang dapat keluar sebagai pemenang dalam pergumulan melawan kesulitannya sendiri.

Dari sejarah bangsa Indonesia sendiri itulah kita harus menggali kekuatan-kekuatan untuk menjawab tantangan pembangunan dan tantangan masa depan. Kita harus mampu menggali dan memelihara kekuatan yang telah membuat kita mencapai hasil-hasil perjuangan di masa lampau. Kita juga harus berani mawas diri seraya mengakui kekurangan dan kelemahan kita di masa silam, yang telah membuat perjuangan kita belum mencapai hasil yang kita harapkan.

Dengan perkataan lain, dalam menilai, baik mengenai perkembangan negara dan masyarakat, kita harus mendudukan persoalannya dalam proporsi yang sebenarnya, bebas dari perasaan subyektif emosional. Sebab, pengalaman yang lemah di waktu yang silam, mau tidak mau, merupakan pelajaran dari sejarah. Hal itu berlaku pula bagi generasi mendatang. Dalam arti itu, kita belajar dari sejarah, tidak lain adalah sebagai usaha untuk membuat sejarah baru, membangun masa depan yang lebih cerah.

Pembahasan perkembangan negara dan masyarakat diwaktu silam, yang dilanjutkan dengan pengkajian soal keberhasilan yang dicapai oleh Orde Baru dan diadakannya perkiraan mengenai perkembangan masyarakat dimasa-masa yang akan datang perlu ditempatkan dalam kerangka perspektif sejarah. Dengan sikap mental yang bebas dari pemikiran subyektif-emosional dalam menilai keadaan negara dan masyarakat serta pelaku-pelaku politiknya, diharapkan dapat membuahakan butir-butir pemikiran jernih dan perilaku yang tepat, untuk menghindarkan bermacam-macam tantangan dan bahaya yang, mau atau tidak mau, akan dialami oleh generasi mendatang.

Dalam arti itulah kita memberi makna kepada sejarah kita. Dalam arti itu pula kita perlu memiliki kesadaran sejarah.

Dengan demikian sebagaimana telah diuraikan dimuka, apabila kita dapat menerima relevansi sejarah sebagai kekuatan

dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, maka persoalannya adalah memungkinkan pembangunan nasional kita diarahkan ke pembangunan manusia Indonesia seutuhnya ?

Menyadari bahwa pribadi manusia merupakan produk *nature* dan *nurture*, semestinya dalam batas-batas tertentu kita dapat mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya tadi, *sejarah* pelbagai bangsa, telah menunjukkan upaya pembangunan nasional yang ingin dicapai melalui pembangunan *kualitas sumberdaya* manusia.

III. MENARIK PELAJARAN DARI SEJARAH : PERLUNYA MASYARAKAT YANG BERKETAHANAN DALAM PEMBANGUNAN.

Proklamasi dan konstitusi telah memberikan definisi tentang siapa bangsa Indonesia. Proklamasi dan konstitusi telah membuat bangsa Indonesia, *masyarakat Indonesia* menjadi *satu masyarakat sejarah* yang mempunyai *identitas* yang mempunyai *integritas* tanpa mana akan terjadi keterpecahan subyek itu dari dalam sendiri.

Lingkungan alam dimana kita tinggal tidak lain adalah seluruh tanah air kita; seluruh kondisi geografis Indonesia dengan segala flora, fauna, potensi hidrogafis, dan deposit sumber alamnya pertama-tama lingkungan tersebut adalah satu lingkungan Nusantara. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar maupun kecil Indonesia merupakan lingkungan dengan imbalan yang khas antara tanah, air, udara dan matahari.

Tepatlah apabila masyarakat kita dinamakan masyarakat Nusantara dengan aneka ragam sub budaya. Dan karena itu pula kita mempunyai corak Bhinneka Tunggal Ika. Adapun keistimewaan kedua adalah kekayaan alamnya, baik itu didalam lingkungan darat, air, tumbuh-tumbuhan maupun lingkungan iklimnya. Sedangkan keistimewaan yang ketiga dari lingkungan alam ini adalah letaknya dalam satu posisi silang, diantara samudra-samudra besar serta diantara benua-benua raya.

Lingkungan yang demikian, tentu saja mempunyai pengaruh terhadap perkembangan masyarakat kita dan ikut pula menentukan corak response kultural yang dikembangkan oleh bangsa kita.

Iklm juga ikut menentukan pola kehidupan masyarakat kita. Musim merupakan faktor yang sangat penting bagi hidup masyarakat Nusantara. Maka itu, pranata mangsa merupakan bagian penting pula didalam sistem masyarakat kita.

Satu gejala penting lagi dari lingkungan ini adalah letaknya pada posisi silang, ini, ikut juga membentuk corak kehidupan masyarakat Indonesia.

Lalu lintas dunia bahkan ikut membentuk perkembangan masyarakat. Apa yang dinamakan lalu lintas dunia bukanlah sekedar lalu lintas fisik, akan tetapi lalu lintas kultural : *lalu lintas* sistem pengetahuan, sistem ekonomi, sistem teknologi, sistem sosial, sistem bahasa, sistem kesenian, dan sistem religi. Arus ekonomi dunia masuk dalam lingkungan ini; demikian arus pengetahuan, teknologi, kesenian, bahasa, sistem kemasyarakatan. Sejarah menunjukkan semua ini.

Maka itu kebudayaan Nusantara pada dasarnya terpaksa menjadi kebudayaan yang terbuka. Ia harus dapat hidup dengan lalu lintas yang lewat di wilayahnya. Masyarakat Nusantara harus berusaha agar semua itu mempunyai *arti yang positif, fungsional*, dan tidak *destruktif*, terhadap perkembangan hidupnya. Mungkin karena situasi yang demikian ini maka kapasitas membangun sintesa berkembang, dan karenanya akulturasi tampaknya telah selalu menjadi kekuatan pokok masyarakat dan kebudayaan Nusantara ini.

Dalam pada itu sifat Nusantara yang demikian itu juga akan membuat masyarakat Indonesia selalu terjalin dengan perkembangan-perkembangan wilayah sekitarnya dan dunia seluasnya. Regionalisme dan sistem global merupakan gejala-gejala yang selalu akan mempunyai refleksinya terhadap perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Demikianlah beberapa hal yang dikemukakan sebagai hasil analisa atas situasi lingkungan masyarakat Nusantara.

Ada satu keterangan yang lebih dapat diterima yang mengatakan bahwa perkembangan sejarah dan lingkungan telah membuat cara berpikir masyarakat kita berbeda dengan cara berpikir masyarakat barat. Kita berpikir secara ketimuran, kita lebih memandang kepada alam, kita tidak berusaha mengolah alam. Sedang cara berpikir bangsa-bangsa barat adalah sebaliknya : menganalisa alam, menyelidiki alam dan menguasai alam. Meskipun mengenai hal ini kiranya masih perlu banyak diadakan penelitian, akan tetapi pandangan ini memang lebih terbuka. Disini masih diakui adanya bakat-bakat manusia yang sama, hanya kemudian mempunyai perkembangan yang berbeda. Mengapa perkembangan itu dapat berbeda ? Salah satu faktor kiranya adalah lingkungan.

Interpretasi yang ingin saya kemukakan berawal dari asumsi ini pula. Sesungguhnya manusia pada hakikatnya mempunyai daya dasar yang sama, entah itu daya fisik, daya psikis, daya intelektual, daya sosial, daya kerja. Ini adalah bakat-bakat dasar bahkan daya-daya dasar yang terkandung didalam setiap hidup manusia. Akan tetapi perkembangan ekspresi, manifestasi dari bakat-bakat tersebut memang bisa berlain-lainan, bisa mempunyai konfigurasi yang berbeda-beda.

Untuk memanfaatkan lingkungan alam yang begitu baik, dan begitu memanjakan, orang tentu saja tidak dipaksa berpikir mengenal menguasai alam, tetapi lebih didesak untuk berpikir tentang *kebahagiaan bersama*. Itulah sebabnya maka *kekerabatan, kekeluargaan*, merupakan masalah-masalah yang penting. Gotong-royong, menjadi tulang punggung; bukan saja gotong-royong sebagai cara kerja, tetapi terutama juga gotong royong sebagai sikap mental, gotong-royong sebagai nilai.

Didalam lingkungan alam yang demikian itu kesibukan manusia menghadapi alam dapat dikatakan relatif kecil. Orang tidak perlu banyak memutar otak untuk menguasai alam. Tetapi kerja berpikir itu ditujukan untuk tema-tema lain. Dalam situasi ini perhatian dan pikiran manusia ditujukan kepada

hidup kemasyarakatan, kepada hubungan antara manusia dan manusia. Maka terjadilah bahwa masyarakat kita sudah sangat maju didalam pengembangan pemikiran-pemikiran dan menyusun refleksi-refleksi mengenai hidup, kehidupan, budi pekerti, moralitas, khususnya mengenai hubungan manusia dengan manusia. Ini menjadi tema yang sangat pokok. Disamping itu manusia Indonesia juga mengembangkan refleksi mengenai hubungannya dengari Yang Maha Kuasa, yang memberi kehidupan.

Oleh karena situasi lingkungan hidup masyarakat Nusantara yang demikian itulah, membuat bangsa kita lebih banyak mengembangkan pemikiran mengenai hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhannya maka dengan demikian *pola berpikir masyarakat kita* adalah *pola kekerabatan, pola kekeluargaan, pola keseimbangan, dan pola religius*. Hubungan manusia dengan alam kita banyak direfleksikan, karena orang tidak dipaksa untuk mengembangkan itu. Konflik dengan alam mungkin tidak banyak dialami, sementara konflik di dalam masalah membangun manusia dengan manusia ataupun didalam refleksi hubungan manusia dengan Tuhannya lebih kerap dirasakan. *Pola kekeluargaan, pola keselarasan, pola ketentraman*, menjadi lebih ditekankan, untuk menjaga agar kerawanan sosial maupun kerawanan religius tidak merusak kehidupan masyarakat. Bila kebudayaan mempunyai tiga *dimensi dasar* (pertama hubungan manusia dengan manusia; kedua hubungan manusia dengan alam; ketiga hubungan manusia dengan Tuhan), maka dimensi pertama dan ketiga telah berkembang sementara dimensi kedua bersifat konstan.

Dengan demikian dapat kita pahami mengapa dinamika kehidupan sejarah kita lebih nyata berkembang di sektor kemasyarakatan, sektor bahasa (termasuk kesusasteraan di dalamnya), sektor kesenian dan sektor religi. Pengaruh Hindu maupun pengaruh Islam masuk ke Indonesia melewati dan memperkuat unsur-unsur ini. Akan tetapi *perjuangan* masyarakat kita dengan *sejarah modern* membawa masalah baru.

Memang kadang-kadang orang masih belum menyadari perubahan situasi tersebut. Kadang-kadang orang masih tetap hidup didalam suasana masyarakat yang dimanja, sehingga kita masih hidup didalam gaya kebudayaan manja, gaya kebudayaan santai yang tampaknya menjadi sumber utama dari bermacam-macam hambatan mental yang kita alami sekarang. Padahal situasi sekarang meminta agar masyarakat Nusantara hidup dengan pola kebudayaan kerja, bahkan *pola kebudayaan kerja keras*.

Sekaranglah saatnya manusia Indonesia harus memikirkan hubungan manusia dengan alamnya., supaya dengan demikian alam akan tetap memberikan manfaatnya untuk kehidupan kita. Dengan perkataan lain, sekaranglah saatnya masyarakat Indonesia mendapat tugas mengembangkan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan.

Berkaitan dengan hal-hal itulah saat kita sebagai bangsa Indonesia perlu melihat gejala-gejala yang telah saya sebutkan di-muka, dimana kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan dan tantangan pembangunan yang sedemikian kompleks. Dengan demikian dalam konteks kesadaran sejarah, saya sampai pada *kesimpulan* bahwa kita harus menjadi *subyek budaya yang kuat, yang tahan* menghadapi perkembangan-perkembangan itu dengan segala kemungkinannya. Untuk ini kiranya konsep *ketahanan sosial budaya* akan memberikan jaminan-jaminan.

Kita menyiapkan, menyongsong, masa depan itu dengan melaksanakan akulturasi yang disertai dengan pelaksanaan enkulturasi. Dengan demikian kita berusaha untuk dapat bertahan, berkembang disepanjang sejarah ini. Dan ini juga merupakan bekal, supaya kita dapat ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.

Oleh karena pembangunan adalah proses kultural, maka pembangunan nasional itu haruslah dilaksanakan berdasarkan asas akulturasi. Pembangunan adalah satu proses akulturasi. Dengan pembangunan nasional ini kita harus berkembang menjadi subyek budaya yang kuat, yang diperkaya dengan unsur-unsur

kebudayaan modern, terutama unsur ekonomi, unsur teknologi dan unsur pengetahuan.

Akulturası berarti bahwa didalam perkembangan itu kita menjadi *kuat dari dalam*. Kita tidak boleh hanya kuat karena pinjaman, kuat dari luar, kuat dari lahirnya saja, kuat semua semata-mata.

Kita memang memerlukan unsur-unsur dari luar, dan oleh karena itu kita mencari, membuka diri untuk unsur-unsur tersebut. Akan tetapi semua itu dilaksanakan secara *kritis selektif*. Disinilah artinya asas bebas aktif, ia mendukung proses akulturası kita. Proses membuka diri, sekaligus diiringi dengan usaha mencari unsur-unsur penunjang dari luar, disamping mempersiapkan perkembangan sendiri dari dalam.

Karena itu menjadi semakin jelas pula bahwa pelaksanaan pembangunan dalam konteks sejarah harus dilaksanakan berdasarkan kepada Wawasan Nusantara. Wawasan ini telah dimiliki dan dikembangkan oleh masyarakat dan kebudayaan kita. Di dalam Wawasan Nusantara ini dinyatakan :

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik.
2. Persujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Sosial dan Budaya.
3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi.
4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan.

Wawasan Nusantara juga memberikan gambaran yang lebih lanjut mengenai corak kita sebagai subyek budaya, sebab dengan itu kita melihat diri kita sebagai *satu subyek, satu entitas*, yang menjadi bagian dari *proses sejarah* yang lebih besar, baik proses regional maupun proses global.

Sekali lagi, akulturası dan enkulturasi, adalah sendi-sendi pokok di dalam kehidupan sejarah kita. Dengan adanya kesadaran sejarah, kita akan berkembang menjadi *lebih baru*, men-

jadi lebih maju, menjadi lebih kaya, akan tetapi tanpa kehilangan identitas, tanpa kehilangan kepribadian, tanpa kehilangan dasar kultural.

Satu paham yang juga mencerminkan persepsi atas kenyataan itu adalah paham Ketahanan Nasional.

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis nasional, yang berisi kemampuan berkembang didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan menegjajak tujuan perjuangan nasionalnya.

Ketahanan Nasional adalah tingkat keadaan keuletan dan ketangguhan bangsa kita dalam menghimpun dan mengerahkan keseluruhan kemampuan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi perjuangan bangsa dalam mempertahankan kehidupan bangsa dan kelangsungan cita-citanya.

Ketahanan Nasional inipun pada hakikatnya adalah ungkapan dari satu persepsi kultural, ungkapan dari kebudayaan nusantara itu. Kehidupan sejarah menurut kebudayaan nasional mengandaikan adanya satu subyek budaya, yang mampu berkembang, menghadapi segala situasi dan kemungkinan. Ketahanan Nasional, mengemukakan bahwa subyek itu mempunyai dua kondisi pokok : kondisi geografis dan kondisi demografis. Dua kondisi ini merupakan sumber daya utama; sumber daya alam dan sumber daya insani. Subyek itu harus berkembang dengan membawa dan memanfaatkan dua kondisi dasar ini. Untuk itulah maka dikembangkan unsur-unsur pokok yaitu : ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan keamanan dan teknologi, dengan mana subyek tersebut mengembangkan *dimensi-dimensi utama* didalam kesadaran sejarahnya sebagai bangsa Indonesia.

Ketahanan Nasional bukanlah semata-mata konsep militer. Kembali lagi ia adalah konsep kenegaraan, konsep kebudayaan,

konsep kemasyarakatan karena ia lahir dari dinamika masyarakat dan kebudayaan Nusantara. Dengan paham Ketahanan Nasional, masyarakat Nusantara ingin mengembangkan dirinya, dan serta merta memasuki pola roda sejarah dunia, melewati sistem regional, bergabung dengan sistem global.

IV. REFLEKSI KESEJARAHAN DALAM PEMBANGUNAN MELALUI STRATEGI WAWASAN JATI DIRI DI JAWA TENGAH

Pembangunan yang berwawasan kesejarahan sebagaimana telah diuraikan dimuka, merupakan salah satu sisi upaya peningkatan kualitas manusia dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sebagai prasyarat kondisioning dalam dimensi Pembangunan Nasional pada umumnya dan Daerah pada khususnya, disamping aspek stabilitas dan kegotong-royongan. Sedangkan peningkatan kualitas manusia yang selaras dengan arus dinamikanya perkembangan jaman, adalah merupakan wujud konsekuensi logis kita untuk memerangi dan mengikis habis kendala "tiga K" yakni : kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Sedangkan di Jawa Tengah, untuk menunjang pencapaian kondisi tersebut, sebagaimana dimaklumi dalam Pelita V ini, Jawa Tengah menitik beratkan pada kebijakan pemecahan 5 (lima) masalah pokok, yaitu :

- a. *Kependudukan* yang terdiri dari laju pertumbuhan yang masih relatif tinggi, penyebaran yang tidak merata, dan pertumbuhan angkatan kerja yang belum seimbang dengan perluasan kesempatan kerja. Dalam masalah kependudukan ini juga masih dihadapi persoalan rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya pendapatan masyarakat.
- b. *Keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam* yang meliputi terganggunya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam, masih banyaknya lahan kritis serta belum mantapnya pendayagunaan sumber air, tanah dan ruang.

- c. *Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi*, yaitu meliputi pengembangan yang belum serasi antara pendidikan formal dan non formal dan informal. Persoalan mutu dan kesesuaian pendidikan bagi pembangunan daerah serta terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.
- d. *Aparatur pemerintah* yang meliputi kemampuan aparatur pemerintah yang belum memadai untuk memenuhi tuntutan pembangunan dan terbatasnya sarana dan prasarana aparat pemerintah.
- e. *Pertumbuhan antara daerah* yaitu terjadinya perbedaan laju pertumbuhan antar daerah sebagai akibat dari perbedaan sebaran penduduk, kegiatan ekonomi dan perbedaan peluang pengembangan.

Sementara itu, guna menjabarkan pemecahan kelima permasalahan tersebut dalam cakupan sektor yang lebih luas, Jawa Tengah berpijak pada konsep dasar strategi wawasan jati diri, yang tidak lain merupakan sub sistem Wawasan Nusantara dan penjabaran doktrin Ketahanan Nasional.

Penerapan strategi Wawasan Jatidiri berangkat dari pemahaman bahwa pendayagunaan *kondisi yang khas* secara *dinamis* kearah "nilai tambah" sebesar-besarnya adalah kunci utama untuk mengoptimasikan bidang apapun. Dengan *pemahaman, penghayatan* dan *pengembangan identitas* atau *jatidiri* secara maksimal, tidak lain bertujuan untuk menciptakan kondisi stabilitas wilayah yang dinamis, yaitu suatu masyarakat yang memiliki ketahanan, mempunyai daya tangkal mampu mengatasi ancaman, tantangan, hambatan/rintangan dan gangguan.

Strategi wawasan jatidiri merupakan strategi pembangunan yang menempatkan wawasan jatidiri sebagai titik tolak pendekatan, yang memerlukan analisa dan pemahaman terhadap segenap potensi khas yang dimiliki Jawa Tengah, untuk dikembangkan dalam mencapai ketahanan wilayah sehingga dapat makin memperkokoh Ketahanan Nasional.

Pola orientasi yang bersifat kedalam memerlukan analisa dan pilihan langkah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan-

an yang dihadapi oleh Jawa Tengah dengan mendayagunakan segala *potensi* dan *ciri-ciri unggul* yang dimiliki oleh Jawa Tengah. Istilah *Jatidiri* mengandung arti sebagai kepribadian atau seperangkat ciri-ciri khas sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Dalam pengertian ini terkandung pemilihan *sifat-sifat potensial, unik bernilai tinggi, unggul* dan mengandung *daya inspiratif* serta melahirkan *citra spesifik* dan bersifat *relatif kekal*.

Sedangkan orientasi keluar lebih menekankan pentingnya integritas, identitas dan kelangsungan Jawa Tengah sebagai bagian integral (satu kesatuan) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masalah integritas sebagaimana diketahui dan kelangsungan hidup secara relatif tidak menghadapi persoalan, namun masalah *jatidiri* atau *identitas* masih menghadapi tantangan baik yang jelas terlihat maupun yang tidak "kasat mata".

Apabila hal ini kita amati sebagai suatu proses, dapat dilihat bahwa setiap kelompok manusia dalam dimensi kesejarahannya maupun pangkuan ruang wilayah senantiasa mempunyai kecenderungan untuk menampilkan identitasnya; tentu saja dilatar belakangi oleh rasa bangga dan rasa cinta pada lingkungan tempat tinggalnya. Identitas itu diekspresikan dalam berbagai aspek seperti tutur kata, tingkah laku, cara berbusana, jenis makanan, ungkapan seni, gaya dan langgam bahasa, bentuk bangunan beserta penataan ruangnya dan sebagainya.

Kesemuanya itu memancarkan ciri karakteristik masyarakat suatu daerah yang membedakan dengan masyarakat daerah lainnya.

Bertolak dari pengertian tersebut maka Strategi Wawasan *Jatidiri* mempunyai makna :

- a. *Cara dan usaha untuk mendayagunakan segala sumber daya* dalam rangka mencapai tujuan, dengan suatu cara pandang yang menampilkan kegiatan untuk mengenali, memilih, mengerahkan dan mengembangkan potensi serta ciri-cirinya yang mempunyai sifat potensial, unik, bernilai tinggi dan bercitra spesifik.

- b. Strategi Wawasan Jatidiri merupakan strategi pembangunan yang menempatkan Wawasan Jatidiri sebagai titik tolak pendekatan, untuk menjawab dan memecahkan berbagai tantangan, hambatan gangguan dan ancaman dalam rangka mewujudkan masyarakat dan wilayah yang berketahanan, utamanya dalam ketahanan sosial budaya. Namun di samping itu, Strategi Wawasan Jatidiri sebagai landasan pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah adalah juga wahana untuk menterjemahkan kebijaksanaan Nasional di daerah.

Dalam pola operasionalnya, antara orientasi wawasan kedalam dan keluar tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Khusus mengenai wawasan wilayah atau orientasi kedalam jika dikaitkan dengan Doktrin Ketahanan Nasional, maka keseluruhan potensinya mencakup Tri Gatra Alamiah (geografi, kekayaan alam dan kemampuan penduduk) dan Panca Gatra Sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan). Kedua unsur potensi itulah yang harus didaya-guyanakan seoptimal mungkin, guna memecahkan masalah-masalah pokok yang sedang dihadapi (utamanya lima masalah pokok), sekaligus untuk menangkal segala hambatan dan ancaman yang diperkirakan dapat mengganggu integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa.

Seluruh upaya untuk memecahkan 5 makalah pokok tersebut diarahkan untuk meningkatkan *ketahanan wilayah* serta meningkatkan *harkat* dan *martabat* rakyat Jawa Tengah hal ini memberi isyarat kepada kita agar Jawa Tengah memiliki daya regenerasi dan rekonstruksi dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sedang dan akan dihadapi. Kesemuanya harus ada dalam bingkai-bingkai sistem-sistem budaya sebagai bagian dari kebudayaan dalam arti luas.

Dalam konteks ini, Strategi Wawasan Jatidiri atau strategi wawasan identitas merupakan perwujudan kehendak untuk memanfaatkan seluruh "harta kebudayaan" yang ada di Jawa Tengah dan seluruh potensi pada masing-masing gatra-

nya yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Apabila pengertian yang tersurat dan tersirat dalam lambang daerah dijadikan acuan langkah, pengembangan nilai-nilai ideal filosofis akan menempati tempat teratas, Cakupan garapannya diarahkan untuk terus meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, pelestarian semangat Proklamasi dan kesatuan gerak dan langkah antara rakyat dan para pemimpinnya.

Pengembangan nilai-nilai ideal filosofis dalam konteks sejarah harus mampu mengikis segi-segi negatifnya agar tidak timbul gejala-gejala yang menghambat laju pembangunan. Selanjutnya adalah pengembangan kesenian dan kebudayaan yang berakar pada tradisi untuk menangkal unsur-unsur yang bisa merugikan pembangunan.

Dalam hal ini tentu saja tanpa menutup kemungkinan masuknya unsur budaya asing yang dapat meningkatkan kualitas kemanusiaan. Berikutnya juga diisyaratkan perlunya pengembangan potensi alamiah yang terkandung di Bumi Jawa Tengah dengan memperhitungkan dampak negatif yang mungkin bisa mengganggu kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan hidup.

Apabila totalitas pembangunan daerah Jawa Tengah dilihat dalam konteks manajemen pembangunan, maka cakupan garapan dari strategi wawasan identitas akan terwujud dalam trigatra alamiah dan panca gatra sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan).

Yang akan dituju adalah terciptanya Ketahanan Wilayah yang tangguh dalam menghadapi semua ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik untuk masa sekarang maupun untuk masa datang.

Dalam hubungan dengan Wawasan Identitas atau Wawasan Jatidiri ini sekali lagi ditegaskan bahwa sama sekali tidak dimaksudkan untuk membangkitkan fanatisme kedaerahan yang sem-

pit, tetapi untuk menumbuh kembangkan "Nilai Dalam" yang cukup tangguh dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya integritas dan identitas atau jatidiri nasional.

Sebagai wawasan yang berdimensikan kesejahteraan maupun yang bersifat khusus kewilayahan, strategi Wawasan Jatidiri atau strategi wawasan identitas, kaya dengan upaya untuk terus menggali dan memahami sistim-sistim budaya yang ada dan telah berurat berakar di bumi Jawa Tengah. Hingga disini dapat dinyatakan bahwa Strategi Wawasan Jatidiri merupakan wahana untuk memecahkan lima masalah pokok Jawa Tengah, karena lima masalah pokok ini merupakan unsur yang dapat mengganggu, menghambat dan mengancam kelangsungan hidup Jawa Tengah.

Selanjutnya dengan strategis wawasan jatidiri atau strategi wawasan identitas, Jawa Tengah berupaya untuk menampilkan dan memperjelas identitas/jatidiri dalam kedudukannya sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Dari segi lain strategi wawasan jatidiri atau strategi wawasan identitas merupakan wahana untuk melihat dan menampilkan *kesinambungan sejarah*. Sehingga dalam membangun Jawa Tengah tercermin kehendak agar tidak "Kepaten Obor" dan kehilangan jejak dari *sejarah* dan *budaya* masa lampau.

Untuk mengaktualisasikan dan mengoperasikan strategi tersebut ada 7 jalur pendekatan yang dilakukan yakni : Kepemimpinan, Etos Kerja, Solidaritas atau Kesetiakawanan Sosial (Gotong Royong) Seni Budaya, Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Arsitektur serta Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tumbuhnya pemahaman tentang Wawasan Jatidiri telah menggugah kesadaran masyarakat Jawa Tengah terhadap potensi etos yang dimilikinya, yang terwujud dalam sikap-sikap positif antara lain tumbuh mekarnya rasa percaya diri dan kemandirian. Dengansikap-sikap positif itu derap pembangunan semakin terpacu dalam gairah juang yang tinggi.

Sementara itu berbagai hasil pembangunan baik fisik maupun non fisik, tampak mencuat nilai tambahnya.

V. PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok uraian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Seminar ini.

Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

FUNGSI SEJARAH DALAM PEMBANGUNAN BANGSA, KESADARAN SEJARAH, IDENTITAS DAN KEPERIBADIAN NASIONAL

Sartono Kartodirdjo

I. Pendahuluan

Suatu generasi yang mengalami empat jaman, ialah jaman kolonial, jaman penjajahan Jepang, masa Revolusi dan masa Kemerdekaan, sesungguhnya memiliki pengalaman yang secara wajar membentuk perspektif waktu sebagai unsur pokok kesadaran sejarah. Ironisnya ialah bahwa para pelaku sejarah acap kali terlalu terserap dalam proses aktual kesejarahan sehingga praktisnya menjerumuskan mereka arus dari rangkaian momentum-momentum.

Lagi pula pandangan teleologis atau futurologis menimbulkan negasi terhadap masa lampau yang ditolaknya sebagai sikap romantis jauh dari realitas.

Perlu diingat pula bahwa sebagai protagonis modernisasi ada kecenderungan pada mereka untuk melepaskan dari tradisionalisme, termasuk sejarah sebagai historiografi tradisional. Selanjutnya aktor-aktor pembangunan lebih berurusan dengan prognostika jaman yang diperlukan untuk melakukan perencanaan.

Kebutuhan akan pendekatan sinkronis lebih memadai daripada pendekatan diakronis. Pendek kata selama empat jaman tersebut di atas ternyata tidak terdapat iklim mental yang menumbuhkan kesadaran sejarah.

Di samping kausalitas-kausalitas yang disebut di atas, di sini masih perlu dicantumkan beberapa faktor penyebab yang memperkuat ahistorisme di Indonesia.

Dapat dipahami mengapa penguasa kolonial memandang sejarah sebagai "dinamit" yang mampu menghancurkan bangunan kolonialnya, tidak lain karena kesadaran sejarah akan membangkitkan aspirasi nasionalist yang pada hakekatnya bersifat antithetis atau antagonistis terhadap sistem kolonial.

Tambahan pula sistem pendidikan kolonial mengutamakan pendidikan profesional dalam pelbagai bidang teknologis, maka sejajar dengan perkembangan itu penilaian serta gambaran umum terhadap ilmu eksakta dan teknologi jauh lebih tinggi daripada ilmu humaniora.

Fakta historis yang kita hadapi ialah bahwa di Barat romantisme serta historismenya menjadi landasan nasionalismenya, sedang di Indonesia nasionalisme tumbuh sebagai reaksi terhadap kolonialisme, lagi pula sebagai kekuatan modernisasi lebih berorientasi ke masa depan.

Bertolak dari fakta historis bahwa di Barat pertumbuhan nasionalisme beserta negara nasional bersumber pada kesadaran sejarah, perlu dipertanyakan disini hal-hal sebagai berikut :

- (1) adakah kesadaran sejarah pada bangsa Indonesia pada masa pranasionalisme ?
- (2) dengan tidak ada romantisme di Indonesia yang mendahului perkembangan nasionalisme, jenis kesadaran sejarah apakah yang melatarbelakanginya ?
- (3) seberapa jauh kesadaran sejarah menjadi faktor pembentuk kesadaran nasional dan identitas nasional ?

- (4) mengapa rekonstruksi sejarah nasional merupakan landasan fundamental bagi konsolidasi kehidupan negara nasional ?
- (5) struktur sejarah mana yang memadai fungsi sejarah nasional sebagai legitimasi eksistensi negara nasional ?
- (6) seberapa jauh fungsi sejarah dapat mendukung proses pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bangsa khususnya ?

Pertanyaan-pertanyaan di atas secara berturut-turut akan dijawab dalam uraian berikut sekedar untuk menjelaskan betapa penting peranan sejarah dalam eksistensi bangsa serta negara nasionalnya.

II. Sejarah Kesadaran Sejarah Bangsa Indonesia

Ada kesepakatan umum bahwa setiap peradaban dimulai dengan peninggalan tertulis, tidak lain oleh karena tulisanlah yang "menjinakkan" memori (ingatan) manusia serta menyimpan data dan fakta bagi generasi berikutnya, jadi diabadikan. Jadi timbul kemungkinan bagi generasi kemudian untuk mengungkap dan menghidupkan kembali pengalaman masa lampau. Di sini monumen dan dokumen menghadirkan kembali generasi kemudian mengenai pengalaman bersama kepada para nenek-moyang, dengan perkataan lain, di sini kita hadapi suatu reaktualisasi pengalaman kolektif suatu bangsa, lazim disebut sejarah. Transformasi dan kekinian menjadi kelampauan merupakan kesadaran akan aliran waktu yang bergerak menurut garis lampau – kini – masa depan. Di sini perspektif waktu tercipta sebagai bentuk kesadaran sejarah.

Lebih jelas lagi ialah bentuk penulisan sejarah tradisional, seperti Babad, Hikayat, Kronik, dan lain sebagainya.

Kesadaran Sejarah Masyarakat Tradisional

Apabila manusia Indonesia menunjukkan kehadirannya dalam alam semesta melalui penciptaan artifact, keberadaan ruang

dan waktu dalam kesadarannya telah dituangkan dalam tradisi lisan dan tertulis, prasasti, kronik, genealogi, sejarah, babad, dan lain sebagainya.

Pelbagai fakta yang diabadikan dalam tradisi tertulis menimbulkan tempat penyimpanan yang melembaga sebagai historiografi, suatu proses yang amat fundamental dalam formasi peradaban, tidak lain karena dengan demikian manusia dapat "membebaskan diri" dari waktu subyektif, yaitu kesadaran waktu pada manusia individual. Proses obyektivikasi waktu terlaksana melalui proses penulisan sejarah, yang di satu pihak menstrukturasi waktu dan di pihak lain mekonstruksi pengalaman kolektif suatu kelompok.

Kalau kita memperhatikan substansi historiografi tradisional, mencoloklah fakta bahwa manusia belum berhasil sepenuhnya "membebaskan diri" dari pandangan dunia kosmogonis atau religiomagus. Kehadiran mitos di dalam historiografi itu membuktikan bahwa manusia belum sepenuhnya berhasil "mengemansipasi dirinya" dari pandangan dunia kosmosentris. Ini berarti bahwa perspektif waktunya masih bersifat siklis sehingga perspektif historisnya belum sepenuhnya terwujud. Meskipun sudah muncul kesadaran waktu namun belum dapat disebut kesadaran historis, tidak lain karena alam pikiran mitis dan kosmosentris senantiasa cenderung mengulang atau menghadirkan kembali peristiwa religio-magus lewat upacara (ritus).

Lebih lanjut perlu diperhatikan bahwa fungsi mitos adalah esensial bagi kehidupan kelompok oleh karena menjadi prinsip melegitimasi eksistensinya.

Serat Tantu Panggelaran memuat mitos genesis Pulau Jawa secara fisik, lagi pula terjadinya peradaban Jawa. Baik Sejarah Raja-Raja Pasai maupun Kronik Wajo ataupun Babad Tanah Jawi menunjuk kepada awal kekuasaan dinasti yang serba mitis. Oleh karena asal-mula mitologis menjadi dasar legitimasi eksistensi suatu dinasti maka setiap kali perlu diaktualisasikan lewat upacara, maka kita menghadapi gejala paradoksal, ialah bahwa kesadaran sejarah dituangkan melalui aktualisasi mitos. Suatu

pandangan dengan wawasan seperti itu cerita sejarah berfungsi "menghidupkan kembali" masa lampau, jadi tidak berbeda dengan pementasan tarian serimpi Bedaya Ketawang atau cerita wayang purwa. Dengan terciptanya suasana kesejarahan (historisitas) alam pikiran orang terbentuk perasaan "kesejarahan" (*historical sense*) dan kesadaran sejarah; setiap peristiwa merukan momentum dalam suatu proses atau continuum proses-proses. Konteks temporal menempatkan setiap peristiwa dalam perspektif sejarah, lagi pula setiap benda atau gejala adalah hasil proses perkembangan historis. Di sini timbul optik diakronis yang mampu mengurangi anakronisme yang masih dominan dalam alam pikiran mitologis. Proses demitologisasi tercermin dalam bagian akhir historiografi tradisional bersamaan dengan bergesernya wawasan kosmosentris lebih ke arah antroposentrisme.

Perspektif antroposentris menempatkan manusia sebagai aktor dalam kerangka khronologis dan dengan demikian dilepaskannya dari waktu mitologis. Di sini perspektif waktu mengidentifikasi manusia dalam dimensi ruang dan waktu historis, suatu proses sekularisasi yang memperkuat historisitasnya, dan sekaligus meningkatkan kesadaran historisnya.

Historiografi sebagai perbendaharaan kultural peradaban bangsa merupakan simbol eksistensinya dalam waktu dan sekaligus mewujudkan ekspresi kesadaran sejarahnya. Dalam konteks masyarakat tradisional historiografi beserta kesadaran sejarahnya mempunyai kedudukan amat fungsional untuk menopang kontinuitas sebagai prinsip esensial bagi tradisi beserta nilai-nilainya.

III. Kesadaran Sejarah dan Kebangkitan Nasional

Momentum historis dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia terjadi pada akhir dasawarsa pertama abad ke-20, yaitu apa yang lazim disebut Kebangkitan Nasional. Dalam mengikuti pasang-surut, kejayaan dan kemerosotan dan dan keme-

nangan serta kekalahan kehidupan bangsa Kebangkitan Nasional merupakan titik-tolak gerakan kebangsaan mengarah ke revivalisme nasional, maka tepatlah apabila dalam menggambarkan proses sejarah itu dipakai metafor "*Bang-bang Wetan*," kecerahan di langit timur yang menandai Matahari akan terbit.

Memang gerakan Boedi Oetomo yang merintis proses Kebangkitan Nasional adalah penuh makna terutama apabila dipandang dalam hubungannya dengan munculnya kesadaran nasional, suatu mentifact yang merupakan unsur fundamental dari seluruh proses perkembangan nasionalisme Indonesia.

Berbicara tentang Nasionalisme di Dunia Ketiga sebagai fenomena historis yang dominan dalam abad ke-20 harus memperhitungkan kehadiran kolonialisme di daerah yang sama. Nasionalisme lahir sebagai kekuatan antagonistis terhadap kolonialisme. Memang tidak dapat diingkari bahwa perlawanan terus menerus terjadi dalam abad-abad sebelumnya, namun pada umumnya merupakan jawaban yang kurang efektif. Faktanya ialah bahwa kolonialisme dengan keunggulan teknologi militer, komunikasi, organisasinya menuntut jawaban yang memadai. Hal ini ternyata hanya dapat dilaksanakan oleh golongan sosial baru, ialah kaum inteligensia, produksi sistem pendidikan modern yang dibangun oleh penguasa kolonial terutama untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehubungan dengan itu perlu diakui kebenarannya bahwa sistem pendidikan adalah dinamis bagi sistem kolonial. Kaum inteligensia yang diharapkan berperan sebagai teknolog ternyata menjelma sebagai protagonis nasionalisme. Kedudukannya sebagai elite strategis menciptakan kecenderungan ke arah pembentukan elite kekuasaan.

Dalam melacak asal-mula nasionalisme tidak ada jalan lain daripada memahami mentalitas kaum inteligensia tersebut di atas. Bagaimanakah kesadaran mereka mengenai situasi serta kondisi hidup yang mereka hadapi ? Seberapa jauh ada kesadaran sejarah pada mereka ? Apakah kesadaran sejarah itu merupakan sumber inspirasi bagi mereka dalam mencanangkan gerakan mereka ?

Masyarakat kolonial pada hakekatnya bertumpu pada prinsip diskriminasi ras atau warna kulit. Sistem kolonial dalam keseluruhannya, termasuk ekonomi dualistiknya, segregasi sosialnya, politik paternalistiknya, kesemuanya berlandaskan pemisahan menurut garis-warna.

Status kaum pribumi atau *inlander* adalah inferior yang pada hakekatnya mencakup negasi atau pengingkaran hak-hak yang dimiliki oleh golongan penguasa. Untuk golongan ini ada tempat kediaman eksklusif, tempat rekreasi, sekolah-sekolah, kamar tunggu di stasiun, dan lain sebagainya.

Dalam segala bidang kaum kulit putih menempati kedudukan atas. Kriteria pendidikan mengutamakan pendidikan Eropa dengan bahasa Belanda sebagai *lingua francanya*. Bagi kaum pribumi amatlah langka kesempatan untuk menempati kedudukan itu. Suasana serba-terbelakang, perasaan harga-diri rendah, pengingkaran martabat manusia, kesemuanya menciptakan mentalitas yang penuh kompleks-harga diri rendah, perasaan tidak pasti mengenai identitasnya.

Negasi yang dipaksakan kepada kaum *inlander* menciptakan citra-diri yang diliputi oleh sindrom serba-terbelakang yang mencakup kebodohan, kemalasan, kelemahan, kelesuan, fatalisme, apati, indolensi, dan lain sebagainya. Terhapuslah perasaan harga-diri, martabat, kepribadian, pendeknya seluruh sistem kolonial berusaha membudayakan "mentalitas setengah budak". Di mana-mana kaum *inlander* menghadapi "tuan besar" dengan otoritarianisme, yang kadang-kadang mewujudkan segi kemanusiaannya sebagai paternalisme. Manifestasi "mentalitas yang serba superior" secara lebih nyata terdapat dalam masyarakat perkebunan yang merupakan suatu "*enclave*" di mana hubungan kerja melembaga sebagai hubungan "tuan-abdi atau budak". Dalam masyarakat kolonial terdapat universum simbolis penuh dengan diskriminasi, meliputi segala aspek kehidupan. pakaian, bahasa, perumahan, pekerjaan, dan seterusnya.

Apabila hubungan kolonial itu bagi orang kebanyakan adalah biasa dan diterimanya sebagai hal yang wajar, tidak demikianlah halnya bagi kaum terpelajar. Golongan inilah yang dalam posisinya sebagai golongan marginal, yang mampu mengidentifikasi situasi kolonial beserta permasalahannya. Merekalah yang menyadari betapa beratnya penderitaan rakyat yang serba terbelakang itu. Merekalah yang mengalami keresahan karena mengalami diskriminasi terus-menerus. Meskipun telah berstatus kaum terpelajar, namun tidak berbeda dengan rakyat membawa stigma kaum inlander. Dalam situasi itulah mereka mengalami krisis identitas. Yang lama telah mereka tinggalkan tetapi yang baru belum tercapai.

Krisis mental itulah yang mendorong mereka untuk mendefinisikan situasi mereka, mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi, untuk akhirnya merumuskan programnya. Kesadaran akan keterbelakangan di segala bidang menciptakan semboyan "Kemajuan" yang hendak dicapai lewat pendidikan. Telah diketemukan kunci untuk mengatasi keterbelakangan itu.

Meskipun tidak terurai, dalam beberapa kesempatan disinggung kejayaan bangsa di masa lampau. Wahidin dalam diskusinya dengan para siswa dokter-Jawa di Parangtritis "memimpikan" bangkitnya kembali kejayaan Jawa (sic) di masa depan. Sutomo dalam memaparkan program kerja Boedi Oetomo dalam Kongresnya di Yogya menyebut kejayaan Majapahit sewaktu bangsa Indonesia bernavigasi dan berdagang sampai jauh dari Nusantara.

Tidak berlebih-lebihan di sini kalau dikatakan bahwa kesadaran sejarah pada tokoh-tokoh para perintis menjadi sumber inspirasi untuk melancarkan gerakan emansipasi.

Di samping itu lewat sejarahnya orang dapat "menemukan" diri-sendiri atau sebaliknya orang "menemukan" sejarahnya agar dapat mengenal kembali diri-sendiri atau identitas-dirinya. Mirip dengan hal ini ialah apa yang dilakukan oleh Nehru, yaitu mempelajari dan menulis "*Discovery of India*" dia hendak "menemukan" kepribadiannya.

Sistem kolonial serta pendidikannya menyebabkan alienasi terhadap kebudayaan serta sejarahnya dan dengan demikian kehilangan identitas atau kepribadiannya. Tepatlah apabila Nehru berusaha menemukan kembali identitas kebangsaannya dengan membangkitkan kesadaran sejarahnya atau pengalaman kolektifnya.

Perlu ditambahkan di sini bahwa pelajaran atau pengkajian sejarah kecuali memberi pengetahuan faktual tetapi juga melakukakan penyadaran; artinya membangkitkan perasaan sejarah (*historical sense*) serta membuka optik historis, atau pemikiran dalam kontekstual historis.

IV. Kesadaran Sejarah dan Identitas Nasional

Pada awal pembicaraan tentang identitas perlu ditegaskan bahwa perkara identitas adalah perkara kebutuhan dasar manusia. Tanpa identitas sukarlah bahkan mustahil dilakukan komunikasi dalam masyarakat. Identitas mendefinisikan status dan peran seseorang, mencakup ciri-ciri pokok seseorang baik yang fisik maupun sosial-budaya.

Identitas tradisional lazimnya mempunyai batasan primordial: ikatan desa, keluarga, suku, agama. Dengan diciptakan negara nasion semua warga negara memperoleh identitas baru, ialah identitas nasional. Identitas ini tidak menghapus identitas primordial, akan tetapi "melampauinya" (mentransendensi).

Sebelum menguraikan identitas nasional sebagai identitas kolektif, seyogyanya kita menambah keterangan lebih lanjut tentang identitas pribadi. Jika seseorang kehilangan memori, antara lain karena senilitas atau penyakit syaraf, timbullah pada dirinya kekacauan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kecuali tidak mampu mengenal identitas-dirinya sendiri, dia juga tidak dapat menentukan identitas orang lain. Akibatnya ialah miskomunikasi terus-menerus.

Identitas nasional sebagai unsur esensial dari kepribadian nasional, suatu kompleksitas terdiri atas sekelompok ciri-ciri

yang mewujudkan suatu koherensi dalam suatu totalitas. Di sini totalitas itu ialah nasion yang mewujudkan suatu kesatuan berkarakter tertentu, sehingga dapat dibedakan dari nasion lain. Yang memberi karakter khusus itu ialah kebudayaan nasional di satu pihak dan di pihak lain pengalaman kolektif atau sejarahnya. Pada kesempatan ini kita membatasi diri pada faktor kedua, tanpa mengurangi pentingnya faktor pertama.

Bertolak dari konsep kepribadian bangsa sebagai analogi konsep kepribadian seseorang jelaslah bahwa kepribadian seseorang adalah hasil perkembangan atau pertumbuhan individu. Di sini totalitas pengalaman individu menjadi keseluruhan pengalaman kolektif atau sejarah bangsa. Ketepatan diagnosis memerlukan riwayat kesehatan seseorang, maka konstelasi sosialbudaya ditentukan oleh sejarah atau pengalaman kolektifnya.

Sehubungan dengan pernyataan di atas di sini perlu ditekankan beberapa ciri pokok identitas nasional, ialah (1) historisitas; (2) ke-unik-an (*uniqueness*); (3) partikularitas atau subyektivitas. Ketiga ciri itu amat erat kaitannya satu sama lain.

Historisitas sebagai ciri utama sebenarnya inheren pada identitas sebagai tumpuan pengalaman kolektif, tidak lain karena pengalaman itu berakumulasi lewat proses historis atau perkembangan waktu sebagai dimensi proses pertumbuhan atau perkembangan. Proses itu terjadi secara unik yaitu bagaimana sebenarnya terjadi dan menghasilkan produk yang kita kenal sebagai identitas. Hasil itu mau tak mau merupakan hal yang khusus atau partikularitas. Subyektivitas menonjol apabila identitas ditempatkan dalam hirarkhi identitas – humanitas – universalitas.

Historisitas yang melekat pada identitas hadir secara menonjol tampil pada peta wilayah Republik Indonesia. Perbatasan daerah-daerah yang dicakupnya, lokasi kota-kota, jaringan komunikasi, kesemuanya sulit diterangkan tanpa melacak asal mulanya di masa lampau.

Hari-hari raya nasional kita pahami hanya dengan mengetahui latar belakang sejarahnya. Kita semua mengetahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini timbul "demam sejarah" untuk menentukan HUT kabupaten. Pengamatan gejala itu menunjukkan adanya kecenderungan umum untuk menetapkan identitas berdasarkan sejarahnya atau lebih tepat proses genesis-nya (terjadinya).

Kebutuhan akan identitas lokal justru pada saat pembangunan bangsa dengan identitas nasionalnya. Ternyata tidak ada kontradiksi antara kedua aliran perkembangan itu, oleh karena identitas nasional berfungsi selaku payung yang mencakup jenis identitas lebih sempit, artinya kolektivitas pada identitas lokal lebih terbatas, sedang individualitasnya lebih khusus. Adapun historisitasnya secara kualitatif tidak menunjukkan perbedaan.

V. Kesadaran Sejarah dan Kepribadian Nasional

Dengan lajunya perkembangan negara nasion kita pada umumnya dan bergairahnya pembangunan masyarakat kita khususnya, kehidupan bangsa Indonesia tidak hanya meningkat dinamikanya tetapi juga bertambah besar skala serta ruang lingkungannya, pendeknya kualitas hidupnya meningkat sekali.

Dalam keadaan transitif serta terbawa oleh transformasi manusia Indonesia perlu dikonseptualisasikan kembali, sebagai konstruk perlu distrukturasikan sesuai dengan model atau ideal-type tertentu. Di sini kita menghadapi proses fundamental yaitu bagaimana menggambarkan tipe manusia Indonesia yang adaptif terhadap masyarakat yang semakin teknologis coraknya. Tipe tersebut diharapkan berfungsi penuh dalam masyarakat komposit dan pluralistik, berbudaya teknologis-industrial. Tambah pula manusia Indonesia hidup dalam universum nilai-nilai yang tercakup dalam ideologi negara, Pancasila.

Pada hakekatnya individualitas dan partikularitas dari nasionalisme Indonesia tercermin pada Pancasila. Telah kita sadari semua bahwa sifat komposit serta pluralistik menuntut adanya

kekuatan integratif, terutama pada tingkat ideologis. Perlu diingat kembali bahwa proses integrasi adalah faktor dominan dalam sejarah Indonesia.

Sepanjang sejarah ada kecenderungan mengarah ke proses integrasi (teritorial) yang secara progresif menuju kesatuan Nusantara. Di samping itu sejak awal abad ini ada proses integrasi lebih pada tingkat sosial-budaya dan politik lewat organisasi nasionalistis. Kalau pada fase perkembangan pembangunan bangsa dewasa ini kita berbicara tentang integrasi, yang dimaksud tidak lain ialah integrasi pada tingkat individual dengan statusnya dalam kolektivitas nasional. Ini berarti bahwa dimensi kolektif-nasional harus hadir dalam individualitas setiap warga negara. Adapun dimensi kolektif ialah *unity* (kesatuan), *liberty* (kebebasan), *equality* (persamaan), *personality* (kepribadian) dan *performance/prestasi* (hasil kerja).

Pada tahun 1989 dan 1990 kita semua menyaksikan robohnya sistem komunis-totaliter di Eropa Timur. Rupanya ideologi yang dipaksakan dari atas selama beberapa desenia ternyata tidak mampu menghapus kebutuhan dasar identitas serta nasionalisme yang berakar dalam masyarakat teknik-regional.

Nasionalisme Indonesia termasuk Pancasila, perlu dibudayakan secara wajar berdasarkan keyakinan dan tidak merupakan "make-up" saja. Dengan demikian pertumbuhannya tidak perlu menekan dan menghapus identitas lokal atau regional, sebaliknya hal itu perlu diberi ruang hidup, bahkan diberi kesempatan menyumbang dan memperkaya kebudayaan nasional.

Meskipun dewasa ini pengaktualisasian prinsi-prinsip itu telah berjalan terus, bahkan telah membudaya namun belum dapat dikatakan telah menjadi realitas sepenuhnya. Masih diperlukan konsolidasi terus-menerus. Dalam pada itu ideologi nasionalisme ternyata amat instrumental untuk menopang proses integrasi di satu pihak dan di pihak lain untuk akulturasi terhadap masyarakat industrial.

Pada titik uraian ini perlu dipertanyakan ialah seberapa jauh sejarah dapat berfungsi untuk membangun kepribadian bangsa

di masa depan? Seberapa jauh wawasan sejarah mengenai nasionalisme mampu menopang konstruksi konsep kepribadian bangsa?

Dua fakta sejarah telah membuktikan bahwa konseptualisasi bangsa Indonesia, beserta kulturnya seperti terwujud pada Manifesto Politik (1925) dan Sumpah Pemuda (1928) berasal dari sejarah serta sumber daya kultural bangsa Indonesia. Keberhasilan mengidentifikasi situasi beserta permasalahannya oleh Perhimpunan Indonesia khususnya dan Pemuda Indonesia umumnya. Berdasarkan konsep itu program dapat disusun sehingga perjuangan dapat diorientasikan kepada tujuan tertentu.

Dengan mengikuti pernyataan Karl Popper bahwa ilmu-ilmu sosial adalah sejarah, maka implikasinya logis ialah bahwa sejarah juga dapat diterapkan sebagai *social engineering*. Untuk dapat melakukan fungsi itu sejarah perlu dihayati dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial, antara lain mampu mengekstrapolasikan kecenderungan sehingga berdasarkan hal itu dapat dilakukan prediksi atau proyeksi. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa suatu "planning" yang semata-mata didasarkan atas pendekatan sinkronis, tidaklah bulat. Pendekatan diakronis akan memperkuat proyeksi tersebut.

Apabila pembangunan bangsa difokuskan pada mengkonstruksi kepribadian bangsa, sedang pengalaman kolektif masa lampau inheren dalam struktur kepribadian itu, maka sejarahlah merupakan unsur esensial bagi kepribadian bangsa. Dengan demikian pengkajian sejarah menjadi *conditio sine qua non* bagi formasi identitas dan personalitas bangsa. Jelaslah pula bahwa sejarah dapat dirumuskan "bentukbagaimana bangsa membenarkan eksistensinya".

Dengan menyadari kedudukan dan peran sejarah dalam rangka pembangunan bangsa, sejarawan diharap berusaha meningkatkan profesinya sehingga hasil usahanya dapat menjadi sumbangan yang berharga bagi pembangunan bangsa.

VI. Epilog

Setelah tujuan Revolusi Indonesia tercapai bangsa Indonesia memasuki tahun 1950-an dengan mengalami kejutan bahwa sebagai bangsa merdeka ada kebutuhan akan identitas nasional, sehingga dapat memperkenalkan dirinya di antara bangsa-bangsa dengan kepribadian nasional yang mantap. Negasi akan hal itu selama masa penjajahan membawa dampak bahwa tidak dikenal bangsa dan dengan demikian terjadi alienasi. Untuk menemukan kembali dirinya perlu direkonstruksi sejarahnya dengan wawasan Indonesia - sentrisme. Sejak Seminar Sejarah Nasional Pertama pada tahun 1957 sampai dewasa ini telah diusahakan pelbagai daya-upaya dalam historiografi Indonesia, namun dampaknya di bidang pengajaran sejarah belum tampak jelas. Apalagi lewat pengenalan sejarah kesadaran nasional dapat dipupuk dan identitas nasional menjadi landasan kuat bagi pembangunan bangsa maka jelaslah bahwa pengkajian sejarah mempunyai fungsi fundamental dalam pembangunan bangsa serta pembentukan manusia Indonesia bermartabat.

25 TAHUN PENDIDIKAN SEJARAH

Said Hamid Hasan

1. *Pendahuluan*

Pendidikan Sejarah di sekolah-sekolah dimanifestasikan dalam bentuk mata pelajaran Sejarah. Dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, posisi dan tujuan pendidikan, Pendidikan Sejarah menunjukkan perbedaan-perbedaan yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan terutama karena posisi suatu mata pelajaran dalam keseluruhan struktur kurikulum dapat dijadikan indikator persepsi para pengembang kurikulum mengenai penting tidaknya suatu mata pelajaran. Artinya, dari posisi tersebut dapat diungkapkan mengenai peran yang diharapkan dalam membina generasi muda dari suatu mata pelajaran.

Tujuan pendidikan adalah indikator lain untuk melihat peran yang diharapkan dari suatu mata pelajaran. Melalui kajian tujuan tersebut dapat diketahui ke arah mana dan dalam dimensi apa saja suatu mata pelajaran diharapkan sumbangannya. Dimensi-dimensi sumbangn yang diharapkan tersebut akan memberikan berbagai pengetahuan, termasuk bobot arti suatu mata pelajaran.

Masa 25 tahun terakhir (sejak 1964) dijadikan patokan waktu pengamatan karena pada masa ini proses pengembangan

kurikulum sudah lebih didasarkan pada prinsip-prinsip teoritik. Lagipula, pada masa ini masyarakat Indonesia mengalami suatu perubahan drastis dalam dunia pendidikan. Demokratisasi pendidikan menjadi suatu kenyataan yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap kualitas sosial budaya manusia Indonesia. Peningkatan kualitas bangsa terlihat jelas yang pada gilirannya melahirkan pula aspirasi baru tentang pendidikan. Aspirasi-aspirasi ini ditangkap, dicernakan dan diformulasikan kembali oleh para pengembang kurikulum dalam bentuk rencana tertulis yang digunakan di sekolah.

Atas dasar pemikiran di atas, persoalan utama yang diajukan dalam makalan ini adalah perubahan-perubahan apakah yang terjadi dalam Pendidikan Sejarah di SD, SMP, dan SMA selama masa 25 tahun terakhir ini.

2. *Posisi dan Tujuan dalam Kurikulum*

Bagian ini akan membahas mengenai arti posisi suatu mata pelajaran dalam suatu kurikulum dan arti tujuan kurikulum suatu mata pelajaran. Bahasa ini bersifat teoritik dan akan digunakan sebagai landasan untuk membahas hasil temuan mengenai posisi dan tujuan Pendidikan Sejarah selama masa 25 tahun terakhir ini. Pembahasan akan dilakukan secara garis besar mengenai keterbatasan halaman.

Kurikulum memiliki empat dimensi pengertian. Pertama, kurikulum sebagai suatu ide. Kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya adalah merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Kurikulum sebagai suatu kegiatan ini secara teoritik merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan (Hasan, 1988 : 27 – 36).

Kurikulum yang dibicarakan di sini adalah kurikulum dalam pengertian sebagai rencana tertulis. Pertimbangan pembahasan kurikulum dalam pengertian ini terutama :

- a. Posisi dan tujuan kurikuler Pendidikan Sejarah tercantum secara tersurat dalam kurikulum sebagai rencana tertulis.
- b. Persyaratan posisi dan tujuan kurikuler suatu mata pelajaran dalam suatu rencana adalah suatu pernyataan resmi suatu dokumen negara.
- c. Kurikulum yang dikaji yaitu yang dimulai dari kurikulum 1964 menempatkan penulis dalam posisi yang tidak mungkin menghubungi langsung objek pengamatan.

Oleh karena itu pembahasan terhadap kurikulum sebagai rencana tertulis adalah suatu yang paling mungkin. Konsekuensinya ialah penulis tidak dapat menggunakan desain survei dalam penelitian melainkan studi dokumentasi.

Suatu kurikulum sebagai rencana selalu memiliki struktur tertentu. Struktur ini menggambarkan kedudukan dan keterhubungan isi kurikulum. Pada dasarnya isi kurikulum terdiri atas masa pelajaran (Schuberts, 1986 : 212–214), disamping kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kedudukan suatu mata pelajaran tertentu menunjukkan peran yang diharapkan darinya. Umpamanya, suatu mata pelajaran yang harus diikuti oleh semua siswa memiliki peran yang lebih luas dan mendasar dibandingkan suatu mata pelajaran yang baru diikuti oleh suatu kelompok tertentu saja (Popkewitz, 1983 : 70–71; Downey, 1985 : 2–3).

Mata pelajaran yang harus diikuti oleh semua siswa disebut juga dengan istilah mata pelajaran/kelompok inti yang dalam bahasa Inggris disebut "*core curriculum*" (Tenner dan Tanner, 1980 : 86, 144). Mata pelajaran dalam posisi yang demikian memiliki peran sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, ataupun nilai yang diharapkan dimiliki oleh semua warga negara. Dalam posisi ini mata pelajaran tersebut dapat saja menyampirkan suatu status akademik tinggi walaupun tidak harus demikian.

Tujuan dalam suatu kurikulum menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pendidikan (Davies, 1976 : 2-3). Dengan demikian suatu tujuan memberikan petunjuk mengenai arah perubahan yang dicita-citakan dari suatu kurikulum yang sifatnya tidak harus merupakan sesuatu yang final.

Dalam pengembangan kurikulum peran tujuan sangat menentukan. Dalam berbagai model pengembangan kurikulum (sebagai rencana tertulis) tujuan dianggap dasar, arah, dan patokan dalam menentukan komponen kurikulum lainnya. Berbagai analisis mengenai tujuan pendidikan (Bloom, 1957, 1976; Davies, 1976; Hertzberg, 1985; dan Smith, 1986) memberikan petunjuk tentang arti penting suatu tujuan dalam keseluruhan proses pengembangan kurikulum.

Melalui tujuan yang dirumuskan para pengembang kurikulum dapat dikenal orientasi, asumsi, serta nilai yang diberikan terhadap suatu mata pelajaran. Melalui tujuan yang dirumuskan pula diketahui apakah bahan dan cara yang disarankan dalam suatu kurikulum akan mencapai apa yang diinginkan. Tujuan memberikan indikasi peran suatu mata pelajaran apakah sebagai suatu mata pelajaran yang berfungsi memberikan landasan pengetahuan, ketrampilan, serta nilai pada tingkat yang cukup tinggi ataukah tidak. Tujuan pula memberikan indikasi apakah misi yang diemban suatu matapelajaran telah sesuai dengan keinginan masyarakat ataupun kebijaksanaan politik.

Tujuan kurikuler yang dirumuskan menggambarkan pula pandangan para pengembang kurikulum mengenai pengetahuan, kemampuan serta sikap yang ingin dikembangkan. Apakah bagi seorang pengembang kurikulum tujuan adalah sesuatu hasil akhir ataukah merupakan sesuatu yang bersifat proses. Bruner (1966 : 72) beranggapan bahwa kurikulum seharusnya merumuskan tujuan sedemikian rupa sehingga mencakup pengetahuan yang pada hakekatnya merupakan "*specific capabilities*" dan juga "*the nature of knower and of the knowledge getting process*". Dengan pandangan yang demikian tujuan kurikuler suatu mata pelajaran pada dasarnya adalah bekal bagi siswa

untuk mengembangkan dirinya lebih lanjut yang dalam bahasa Bruner disebut dengan istilah "*the transfer of learning*." Dalam semangat serupa Fenton (1967 : 13) mengatakan bahwa "*process is important*".

Gagne (1970) beranggapan bahwa tujuan bukanlah suatu proses. Ia beranggapan bahwa proses adalah suatu strategi dan karena itu bukan sesuatu yang ingin dicapai. Oleh karena ia mengatakan bahwa terlepas dari posisi proses yang penting sebagai suatu strategi, menjadikannya sebagai tujuan adalah terlalu mengada-ada (Gagne, 1970 : 232). Dalam buku yang ditulisnya bersama dengan Briggs, mereka (Gagne dan Briggs, 1974: 76) mempersyaratkan bahwa tujuan merupakan suatu kapasitas yang dapat dilakukan dalam waktu tak lama setelah suatu kegiatan pendidikan berlangsung bukan merupakan apa yang dialami siswa selama proses pendidikan.

Terlepas dari problema apakah tujuan merupakan suatu proses ataukah hasil, apa yang akan dicapai suatu kurikulum tidak mungkin sepenuhnya hanya berlandaskan suatu posisi teoritis ilmiah tertentu saja. Apa yang akan dicapai tidak dapat melepaskan diri dari apa yang ada dalam masyarakat karena usaha pendidikan itu sendiri adalah merupakan suatu sub-sistem dalam dalam suatu sistem masyarakat. Kekuatan-kekuatan sosial, politik, budaya dan juga ekonomi berperan dalam menentukan tujuan pendidikan (Enggleson, 1977; Apple, 1979; Giroux, 1981).

Di Indonesia, tujuan pendidikan pada tingkat nasional ditetapkan dalam keputusan MPR mengenai GBHN. Pada akhir-akhir ini tujuan pendidikan dirumuskan dalam UU nomor 2 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan hirarki tujuan, tujuan pendidikan nasional akan mempengaruhi tujuan institusional suatu lembaga pendidikan. Tujuan institusional akan mempengaruhi tujuan kurikuler suatu mata pelajaran yang dibina oleh suatu lembaga pendidikan. Dengan demikian, sebagaimana tujuan pendidikan nasional adalah produk lembaga politik maka pengaruh politik dalam tujuan pendidikan nasional tak dapat dihindari. Selanjutnya, karena politik dalam hal

ini merupakan hasil akumulatif dari berbagai pertimbangan mengenai situasi sosial, budaya, dan ekonomi bangsa maka pengaruh aspek-aspek ini dalam tujuan pendidikan tak pula dapat dihindari.

3. Posisi Pendidikan Sejarah

Berdasarkan organisasinya, sejak tahun 1964 hingga sekarang ada 2 kelompok posisi yang ditempati oleh Pendidikan Sejarah di tingkat sekolah; posisi pertama ialah Pendidikan Sejarah merupakan bagian atau komponen dari pendidikan lain. Kedua ialah Pendidikan Sejarah menempati posisi yang mandiri, terlepas dari pengelompokan lainnya. Berdasarkan kurikulum 1964 Sekolah Dasar, mata pelajaran Sejarah merupakan bagian dari mata pelajaran Pendidikan Kemasyarakatan. Dalam kurikulum dinyatakan bahwa Pendidikan Kemasyarakatan adalah "pengintegrasian dari mata pelajaran-mata pelajaran Ilmu Bumi, Sejarah dan Kewarganegaraan (civics) (EYD oleh penulis). Dalam posisinya yang demikian, Pendidikan Sejarah diberikan sejak siswa di kelas 1 tetapi tidak ada materi sejarah yang diberikan di kelas III. Di kelas 1 dan 2 fokus utamanya ialah cerita tentang hari besar agama nasional serta cerita tentang kepahlawanan.

Dalam kedudukannya sebagai bagian dari Pendidikan Kemasyarakatan, mata pelajaran sejarah tidak dapat mengembangkan karakteristiknya sendiri. Ia harus ikut pada karakteristik umum yang dimiliki bersama dalam mata pelajaran Pendidikan Kemasyarakatan. Tampaknya, kedudukan yang demikian memang sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia SD. Meskipun demikian organisasi materi sejarah "terpaksa" harus mengikuti organisasi yang tidak didasarkan pada konsep waktu (kronologis baik progresif ataupun regresif) tetapi pada konsep ruang. Artinya, sejarah bukan merupakan kerangka utama Pendidikan Kemasyarakatan.

Di tingkat SMP Pendidikan Sejarah sudah merupakan mata pelajaran yang mandiri. Dalam jenjang sekolah ini bahkan sudah

dikenalkan pula materi Sejarah Dunia. Dalam pengorganisasian kurikulum terjadi perbedaan antara Sejarah Nasional dengan Sejarah Dunia. Sejarah Nasional menempati posisi sebagai mata pelajaran dalam Kelompok Dasar sedangkan Sejarah Dunia menempati posisi sebagai mata pelajaran Kelompok Cipta.

Di SMA Pendidikan Sejarah memiliki posisi yang lebih kuat lagi. Disamping Sejarah Indonesia dan Sejarah Dunia, SMA mengenal pula Sejarah Kebudayaan terutama dalam pengertian sejarah kesenian. Sejarah Kebudayaan diberikan untuk siswa yang mengambil jurusan Budaya. Oleh karena itu Sejarah Kebudayaan dimasukkan kedalam Kelompok Khusus (Budaya). Meskipun demikian, adanya mata pelajaran Sejarah Kebudayaan memberikan posisi yang makin penting bagi pelajaran sejarah di SMA.

Dalam kurikulum 1968 posisi Pendidikan Sejarah di ketiga jenjang persekolahan tersebut tidak berubah secara prinsipil. Kalau dalam kurikulum 1964 di SD sejarah merupakan bagian dari Pendidikan Kemasyarakatan sekarang sejarah menjadi bagian dari Pendidikan Kewargaan Negara. Nama Pendidikan Kewargaan Negara merupakan pengganti dari Pendidikan Kemasyarakatan. Unsur-unsur Pendidikan Kewargaan Negara adalah seperti pula Pendidikan Kemasyarakatan. Perbedaannya adalah dalam istilah unsur Kewargaan Negara yang setelah menjadi nama untuk keseluruhan maka untuk nama unsurnya diganti menjadi Pengetahuan Kewargaan Negara.

Peningkatan status Kewargaan Negara dari unsur Pendidikan Kemasyarakatan menjadi nama "broadfield curriculum" dan hilangnya Pendidikan Kemasyarakatan kiranya berhubungan erat dengan situasi politik. Pada masa ini pemerintah Orde Baru baru saja tegak sementara itu orientasi pendidikan Amerika Serikat mulai menampakkan dirinya. Di Amerika Serikat, Pendidikan Kewargaan Negara sedang menjadi primadona terutama karena masalah perbedaan ras yang masih menghantui masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan Negara (Civics) dianggap merupakan jawaban terhadap tantangan tersebut.

Sayangnya, hal tersebut terjadi dengan pengorbanan dari sejarah.

Dalam kurikulum 1975 posisi sejarah sebagai suatu pendidikan yang mandiri makin tersudutkan. Kalau dalam kurikulum sebelumnya hanya di tingkat SD pendidikan sejarah menjadi bagian yang tidak mandiri dalam kurikulum 1975 pada setiap jenjang sekolah sejarah bukan lagi merupakan mata pelajaran yang terpisah. Di semua jenjang sekolah sejarah menjadi bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Materi sejarah meliputi materi sejarah Indonesia dan sejarah Dunia.

Posisi yang ditempati sejarah dalam kurikulum 1975 secara teoritis agak berbeda dengan posisi yang ada pada kurikulum SD tahun 1964 dan 1968. Pada kurikulum 1975 ada suatu perubahan yang fundamental dalam organisasi mata pelajaran. Pendekatan disiplin ilmu yang terpisah yang bersifat "broad-field". Pendekatan ini dikenakan pada hampir semua mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum. IPS mencakup Sejarah, Geografi, dan Ekonomi. Disamping itu dikenal IPA yang mencakup Biologi (yang sebelumnya terpecah atas Ilmu Tubuh Manusia, Ilmu Hewan dan Ilmu Tumbuh-tumbuhan) dan Fisika. Matematika menjadi pengganti Aljabar, Ilmu Ukur Ruang dan Ilmu Ukur Bidang. Bahasa Indonesia menjadi pengganti mata pelajaran membaca, kesusasteraan, tata bahasa, dan mengarang. Oleh karena itu kalaulah sejarah tidak lagi berdiri sebagai mata pelajaran yang mandiri hal itu tidaklah disebabkan oleh peran sejarah yang semakin merosot sebagai suatu mata pelajaran. Perbedaan dalam pandangan mengenai isi kurikulum lebih merupakan jawabannya. Ada perubahan dari pandangan tradisional yang menempatkan disiplin secara terpisah pada tingkat spesialisasi tinggi dengan pandangan psikologis yang berpatokan pada teori belajar dan perkembangan mental siswa.

Lebih lanjut, materi sejarah di SMP terutama adalah Sejarah Nasional. Di SMA materi sejarah terdiri atas Sejarah Nasional yang digabungkan dengan Sejarah Dunia dan Sejarah Kebudayaan dalam posisi yang berbeda-beda. Dalam semester pertama di mana materinya adalah Sejarah Nasional, Pendidikan Sejarah

menempati posisi sebagai mata pelajaran inti. Semua siswa SMA semester pertama harus mempelajari sejarah dan nilai sejarah dijadikan salah satu pertimbangan untuk menentukan penjurusan di semester berikutnya.

Di semester 2, 3, dan 4 posisi mata pelajaran Sejarah adalah sebagai mata pelajaran khusus untuk jurusan IPS sedangkan pada semester 4, 5, dan 6 untuk jurusan Bahasa. Di sini mata pelajaran sejarah bukan lagi merupakan mata pelajaran inti. Siswa yang masuk ke jurusan IPA tidak lagi mendapatkan sejarah. Hal ini tentu saja didasarkan pada asumsi bahwa pelajaran sejarah yang mereka telah terima sejak SD sampai dengan semester pertama SMA telah cukup menjadi bekal mereka. Tampaknya asumsi yang demikian terpenuhi kalau materi sejarah pada jenjang sekolah yang dimaksud dikaji walaupun ketidakpuasan tentu saja timbul.

Dalam kurikulum 86 (atau apa yang secara politis disebut dengan istilah kurikulum 75 yang disempurnakan) ada perkembangan lain yang cukup menarik untuk Pendidikan Sejarah. Di SD Pendidikan Sejarah tetap merupakan bagian dari IPS tetapi dalam suatu organisasi kurikulum yang agak janggal. Di SD dikenal adanya kurikulum IPS yang mencakup geografis, politik, pendidikan, sosiologi, dan ekonomi. Disamping itu dikenal pula kurikulum IPS bidang studi Sejarah yang terpisah dari IPS lainnya. Selain itu, materi sejarah dalam pengertian tradisional baru diberikan mulai di kelas 4 sedangkan sebelumnya mereka diperkenalkan dengan sejarah desa dan sejarah kecamatan.

Adanya organisasi yang demikian tidaklah memberi petunjuk akan kenaikan posisi mata pelajaran sejarah sebagai suatu mata pelajaran yang berdiri sendiri. Keterikatannya dengan nama IPS memberikan petunjuk bahwa mata pelajaran Sejarah bukanlah mata pelajaran yang berdiri sendiri. Tampaknya pemisahan tersebut terjadi terutama karena kesulitan dalam mencari elemen organisasi kurikulum yang dapat menjembatani perbedaan karakteristik disiplin ilmu yang ada.

Apabila kurikulum IPS SD tersebut dikaji lebih lanjut akan tampak bahwa organisasi IPS umum itupun tidak padu. Tampaknya para pengembang kurikulum IPS di SD mendapatkan kesulitan teknis dalam mencari elemen organisasi kurikulum yang cukup kuat untuk mengikat unsur-unsur materi yang berasal dari berbagai disiplin tersebut (Hasan, 1990a). Barangkali kalau saja proses dijadikan elemen organisasi seperti yang disarankan Bruner (196) dan didukung oleh Fenton (1967) serta Burger (1970) kesulitan tersebut, dapat diatasi. Penggunaan komponen proses disiplin ilmu sebagai elemen organisasi kurikulum terutama didasarkan pada pandangan positivisme. Tentu saja hal ini dapat diperdebatkan mengingat tradisi heuristik sejarah yang berbeda dengan disiplin ilmu sosial lainnya walaupun harus diingat bahwa perbedaan itu terutama bersifat lebih teknis dibandingkan prinsip.

Organisasi serupa terjadi pula di SMP. Pada kurikulum IPS jenjang sekolah ini dikenal adanya IPS umum dan IPS bidang studi Sejarah. Meskipun demikian ada perbedaannya dengan IPS SD adalah dalam posisi horizontal Pendidikan Sejarah dibandingkan dengan materi IPS lainnya. Di SD materi sejarah formal diberikan setahun lebih lambat dibandingkan dengan materi IPS lainnya. Materi sejarah baru diberikan di kelas 4 sedangkan materi IPS lainnya sudah diberikan di kelas 3 SD. Untuk SMP baik materi sejarah maupun materi IPS lainnya diberikan bersamaan sejak kelas 1.

Di SMA posisi kurikuler sejarah mengalami perubahan. Kalau dalam kurikulum 1975 Pendidikan Sejarah adalah bagian dari IPS dalam kurikulum 1986 Pendidikan Sejarah sudah merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Hal ini mungkin disebabkan karena pendekatan bidang studi yang "broadfield" sudah tidak digunakan lagi. Materi sejarah dalam fungsinya sebagai media pendidikan untuk membentuk semangat kewargaan negara yang baik dituangkan dalam mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) walaupun sejak awal para pengembang kurikulum PSPB dibekali misi bahwa PSPB bukan sejarah.

Selain itu mata pelajaran sejarah diberikan status sebagai mata pelajaran inti untuk 6 semester. Artinya, siswa SMA yang masuk jurusan apapun (A1, A2, A3, A4, ataupun A5) harus mempelajari sejarah. Ini adalah posisi yang sangat kuat. Disamping itu untuk siswa yang memilih jurusan A4 diberi tambahan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan sebagai mata pelajaran khusus jurusan. Memang di jurusan A3 (Ilmu Sosial) sejarah tidak diberikan sebagai mata pelajaran khusus jurusan (istilah yang digunakan dalam kurikulum 86 adalah program pilihan). Tampaknya hal tersebut sangat berhubungan dengan pandangan ontologis pengambil kebijaksanaan yang beranggapan bahwa Sejarah bukanlah bagian dari ilmu sosial melainkan bagian dari ilmu budaya. Posisi ontologis yang demikian memang sangat populer bagi mereka yang masih mewarisi pembagian ontologis keilmuan yang tradisional.

Kajian terhadap posisi mata pelajaran sejarah tersebut memperlihatkan bahwa konsep mengenai pendidikan sejarah tidak dapat dilepaskan dari pandangan politis mengenai pendidikan pada suatu masa. Posisi teoritik kependidikan para pengeambil keputusan memberikan warna mengenai posisi tersebut. Meskipun demikian dapat dikatakan bahwa mata pelajaran sejarah belum dapat dikatakan berada pada status seperti yang dilaporkan Kirkendall mengenai sejarah di Amerika Serikat. Downey (1985.2) yang mengutip laporan itu mengatakan bahwa posisi mata pelajaran sejarah di tahun 1975 di Amerika Serikat mengalami bahaya. Dalam kata-kata yang dituliskannya Downey menyebutkan bahwa "history in the schools stood in a state of crisis in serious danger of being displaced by other social studies subject". Dalam posisinya sebagai bagian IPS ataupun sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri posisi mata pelajaran sejarah tidak dapat dikatakan mengalami bahaya seperti yang dikemukakan Kirkendall. Bahkan berdasarkan status yang dimilikinya dalam kurikulum 1986 dapat dikatakan bahwa posisi mata pelajaran sejarah cukup baik.

4. *Tujuan Pendidikan Sejarah*

Berdasarkan rumusan tujuan yang terdapat pada kurikulum 1964 sampai dengan kurikulum 1986, misi yang diemban Pendidikan Sejarah dapat dikelompokkan dalam 2 bagian. Kelompok pertama adalah rumusan tujuan yang terutama memberikan misi kepada Pendidikan Sejarah untuk menanamkan rasa kebangsaan. Kedua adalah rumusan tujuan yang lebih memberikan peran kepada Pendidikan Sejarah sebagai media pendidikan untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak didik.

Dalam rangkaian waktu terlihat bahwa kurikulum 1964 dan 1968 lebih memberikan misi kepada Pendidikan Sejarah sebagai media pendidikan untuk menanamkan rasa kebangsaan. Dalam kurikulum 1964 tujuan yang demikian sangat dominan baik di jenjang SD, SMP dan SMA. Keterikatan Pendidikan Sejarah sebagai unsur Pendidikan Kemasyarakatan kiranya memberikan pengaruh yang kuat dalam hal ini. Demikian pula situasi kehidupan politik kenegaraan pada waktu itu yang menghendaki adanya kesadaran sebagai suatu bangsa tak dapat dibabaikan sebagai faktor yang menentukan misi tersebut.

Dalam kurikulum 1968, sebagai bagian dari Pendidikan Kewarganegara misi Pendidikan Sejarah belum banyak berubah. Keadaan Indonesia yang baru memasuki masa pemerintahan Orde Baru barangkali memberikan kontribusi yang kuat untuk misi pendidikan seperti itu. Rumusan tujuan seperti "menghayatkan kepada pelajar riwayat perjuangan Bangsa Indonesia dengan segala hambatannya (feodalisme, kolonialisme) untuk mencapai perikehidupan yang bebas, bahagia, adil dan makmur" merupakan karakteristik tujuan.

Tujuan yang sifatnya mengarah kepada pengembangan kognitif telah pula muncul. Di SMA misalnya, salah satu tujuan Pendidikan Sejarah adalah "untuk menanamkan historis inzicht (sic') kepada anak didik agar mereka mengetahui bahwa segala peristiwa dalam hubungan sejarah, yang merupakan suatu proses sebab-akibat yang berkelanjutan".

Dalam kurikulum 1975 misi Pendidikan Sejarah terutama adalah untuk mengembangkan kemampuan kognitif siswa. Jadi ada perpindahan pendulum yang cukup besar dengan misi Pendidikan Sejarah pada masa sebelumnya. Tampaknya, posisi pelajaran sejarah sebagai bagian IPS memberikan pengaruh yang besar terhadap posisi tersebut. Lagipula, kalau diperhatikan lebih lanjut IPS yang dikembangkan di Indonesia adalah kelanjutan dari tradisi IPS sebagai pengajaran Ilmu sosial (Hasan, 1977). Tradisi IPS lainnya yaitu sebagai "citizenship education" (Barr, Berth, dan Shermis, 1978) dikembangkan dalam bentuk mata pelajaran PMP.

Meskipun ada peralihan yang kuat dari ranah efektif ke ranah kognitif adalah sesuatu kenyataan yang sangat disayangkan bahwa tujuan pendidikan Sejarah hanya terbatas pada jenjang kognitif rendah. Tingkat kognitif yang dikembangkan hanya terbatas pada tingkat Pengetahuan dan Pemahaman. Padahal dalam klasifikasi tujuan pendidikan Bloom (1957) yang dijadikan dasar dalam pengembangan tujuan kedua jenjang tersebut masih dapat dikembangkan sampai jenjang kognitif tertinggi yaitu kemampuan mengevaluasi.

Pengetahuan dan pemahaman adalah dasar untuk mempelajari peristiwa sejarah. Tetapi seperti yang juga telah dikemukakan oleh berbagai sarjana Garvey dan Krug, 1977; Dickin-son dan Lee, 1980; serta Biggs dan Collis, 1982), Pendidikan Sejarah harus mampu mengembangkan kemampuan kognitif siswa di atas jenjang pengetahuan dan pemahaman. Sejarah dapat dijadikan media pendidikan yang sangat ampuh untuk mengembangkan kemampuan berfikir siswa (Hasan, 1990b).

Dalam kurikulum 1986 misi Pendidikan Sejarah sudah digabungkan antara kemampuan kognitif dan afektif. Dalam kemampuan afektif yang utama adalah untuk memperdalam semangat kebangsaan sedangkan rasa senang terhadap sejarah itu sendiri tidak mendapat perhatian. Adalah sesuatu yang mungkin bahwa dengan tujuan yang demikian Pendidikan Sejarah kembali hanya menjadi bagian dari Pendidikan Kewargaan Negara (Walaupun tidak lagi dalam satu gabungan).

Dengan tujuan yang demikian perasaan bosan mempelajari sejarah seperti yang dikhawatirkan oleh Dickinson dan Lee (1980) akan terjadi. Oleh karena itu rasa senang mempelajari sejarah (Dickinson dan Lee, 1980 : 1; Hasan 1989 : 2 – 4) haruslah pula dikembangkan bersamaan dengan pengembangan kemampuan kognitif dan rasa kebangsaan.

Tujuan Pendidikan Sejarah yang mengarah kepada pengembangan kognitif tinggi akan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pada saat sekarang perkembangan masyarakat sedemikian rupa sehingga arus komunikasi sudah menjadi satu kekuatan baru yang menguasai dunia. Bersamaan dengan kecanggihan komunikasi adalah arus komunikasi yang juga berjalan sangat cepat dan sarat pesan. Di samping itu, perkembangan penelitian kesejarahan memberikan informasi-informasi baru yang tak kalah hebatnya dengan kecepatan arus komunikasi. Dalam situasi yang demikian kemampuan kognitif tingkat tinggilah yang dapat membantu anak didik. Dengan kemampuan kognitif tinggi tersebut mereka akan mudah menyerap informasi yang diterima dan memperlakukan informasi itu sebagaimana mestinya. Melalui kemampuan yang demikian pula mereka dapat meneruskan pendidikannya setelah mereka keluar dari sistem persekolahan.

5. *Penutup*

Dari uraian mengenai posisi dan tujuan Pendidikan Sejarah selama masa 25 tahun terakhir ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pendidikan Sejarah di sekolah masih memerlukan perhatian yang serius terutama mengenai tujuan yang akan dicapai. Pendidikan Sejarah harus dapat mengembangkan kemampuan maksimal anak didik baik dalam bentuk kemampuan kognitif maupun afektif. Dalam kedua ranah tersebut dimensi-dimensi ketrampilan heuristik harus dapat pula dikembangkan.

Pengembangan kemampuan mengolah informasi serta rasa senang belajar sejarah merupakan kepedulian utama dalam misi Pendidikan Sejarah. Melalui Keduanya Pendidikan Sejarah dapat memberikan sumbangan yang lebih bermakna dalam mempersiapkan diri anak didik sebagai warganegara.

Daftar Bacaan :

- Apple, M.W. (1979), *Ideology and Curriculum* London : Routledge & Kegan Paul.
- Barr, R., Barth, J.L. dan S hermis, S.S. (1978), *The nature of the social studies*, Palm Springs, California. ETC Pub.
- Biggs, J.B. dan Collis, K.F. (1982), *Evaluasting the quality of Learning*, New York : Academic Press.
- Bloom. B.S. dkk (1956), *Taxonomy of educational objectives*, I. Cognitive Domain, London : Longman.
- Bloom. B.S. (1976), *Human characteristics and school learning*, New York McGraw–Hill Book Company.
- Brunner, , J.S. (1960), *The process of education* Cambridge : Harvard University Press.
- Bruner, J.S. (1966), *Toward a theory of instruction*, Cambridge : Harvard University Press.
- Burger, M.C. (1970). *The implications of Jerome Bruner's structural recommendations for the development of curriculum in history*, Unpublished Dissectation. Columbus : The Ohio Shate University.
- Davies, I.K. (1976), *Objectives in curriculum design*, New York : Me Graw–Hill Book Company.
- Dickinson, A.K. dan Lee, P.J. 1980) *History teaching and historical understanding*, London : H. E. B. Paperback.
- Downey, M.T. (1985). *The Status of history in the schools*, dalam *History in the schools* (Pen. Downey. N.T.). Washington, D.C. : FCSS.
- Enggleston, J. (1977). *The sociology of the school curriculum*, London : Routledge & Kegan Paul.
- Fenton, E. (1967), *The new social studies*, New York : Holt, Rinehart and Winston. Inc.
- Gogne, R.M. (1970), *The conditions of learning*, New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc.

- Gagne, R.M. dan Briggs, L.J. (1974), *Principles of Instructional design*, New York : Holt, Rineart and Winston, Inc.
- Garvey, B. dan Krug, M. (1977), *Models of history teaching in the secondary school*, Kidlington, Oxford : Oxford University Press.
- Giroux, H.A. (1981), *Ideology, culture, and the process of schooling*, Filadephia : Temple University Press.
- Hasan, S.H. (1977), *An analysis of the use of inquiry approach in teaching social studies in Indonesia*, Unpublished master thesis, Sydney : Mecquarie University.
- Hasan, S.H. (1988), *Evaluasi kurikulum*, Jakarta : P2LPTK
- Hasan, S.H. (1989), "Kurikulum sejarah untuk tingkat sekolah", makalah disampaikan dalam seminar tanggal 8 – 11 November 1989 di Pusbangkurandik Balitbang Depdikbud Jakarta.
- Hasan, S.H. (1990a), "Telah GBPP IPS SD", makalah disampaikan pada penataran calon penatar Dosen D2 IGSD di Cisarua.
- Hasan, S.H. (1990b), "Pendidikan berfikir dalam pengajaran sejarah" makalah disampaikan dalam seminar mengenai Pendidikan Berfikir di FPC IKIP Bandung.
- Healey, S. (1974), *Ideas for teaching history*, London : B.T. Batsford Ltd.
- Hetzberg, H.W. (1985), *Students methods and materials of Instruction*, dalam *History in the school* (Pen. Downey, M.T.), Washington, D.C. : NCSS.
- Schubert, W.H. (1986), *Curriculum : perspective, paradigm, and possibility*, New York : Mac Millan Publishing Company.
- Smith, R.I. (1986), "Values in history and social studies". dalam *Values across the curriculum* (Pen. Tombinson, P. dan Quinton, M.), London The Falmer Press.
- Tenner, D. dan Tanner, L.W. (1980), *Curriculum development : theory into practice*, New York : MacMillan.

Dokumen Yang Digunakan :

Kurikulum sejarah SD, SMP, dan SMA tahun 1964, 1968, 1975, 1986.

METODE PENEMUAN SEBAGAI PROSES UNTUK MEWARISI NILAI-NILAI BANGSA.

Sri Jutmini Rahardjo

1. Pendahuluan

Bangsa Indonesia yang sekarang sedang dalam arus peningkatan ilmu dan teknologi sebagai salah satu hasil pembangunan, pada pihak lain hal itu dapat dipandang pula sebagai penyebab timbulnya semangat bersaing antara para individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persaingan yang demikian itu dapat mengakibatkan lunturnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu nilai yang menjadi identitas bangsa Indonesia.

Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu faktor yang penting dalam membentuk kerjasama untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu dalam pertumbuhan masyarakat yang mengalami perubahan secara cepat seperti sekarang ini, pembinaan nilai-nilai yang menunjukkan identitas bangsa Indonesia, perlu memperoleh penanganan yang cukup serius.

Pendidikan Nasional antara lain mengusahakan pembentukan manusia pembangunan yang mampu mandiri. 1) Kemampuan untuk dapat mandiri perlu dilatih melalui proses belajar-mengajar.

Tulisan pendek ini mencoba menyampaikan sumbangan pikiran tentang bagaimana subyek didik dilatih secara mandiri menemukan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaan melalui proses belajar-mengajar. Dengan kemandiriannya itu diharapkan akan timbul keyakinan tentang pentingnya memiliki serta melestarikan nilai-nilai tersebut, yang kelak akan dapat diamalkan dalam usaha mewujudkan cita-cita bangsa.

Belajar Sebagai Proses

Membantu subyek didik untuk menemukan sendiri nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah perjuangan bangsa lebih menekankan pada proses *bagaimana* mereka menemukan nilai-nilai tersebut, daripada *apa* yang harus dipelajari.

Tentang mengapa proses "bagaimana" menemukan itu lebih memperoleh penekanan daripada "apa" yang harus dipelajari, hal itu berkaitan dengan kependidikan kita yang memandang hakekat pendidikan sebagai proses "pemanusiaan", dalam arti menjadikan subyek didik mampu menentukan pengetahuannya. 2) Menemukan pengetahuan yang dilakukan sendiri itu dapat menimbulkan tantangan bagi subyek didik untuk mengarahkan tenaga dan perhatiannya, yang berarti melibatkan mental mereka untuk memudahkan terjadinya penghayatan dengan subyek yang dipelajarinya; sehingga akan memberikan tanggapan sesuai dengan watak pribadinya. Disinilah peranan pendidikan yang tidak hanya bertugas menyampaikan pengetahuan saja melainkan juga untuk membentuk pribadi subyek didik 3).

Kegiatan belajar yang mengikuti proses penemuan dapat mengembangkan beberapa sikap yang mempengaruhi pertumbuhan pribadi subyek didik, diantaranya :

- a. sikap yang meragukan kebenaran yang lama, serta keinginan untuk mengetahui yang baru.
- b. sikap yang menghargai penalaran sebagai cara untuk memperoleh suatu kebenaran,

- c. sikap yang menghargai data sebagai alat untuk menguji kebenaran,
- d. sikap obyektif terhadap data yang ada, serta menjauhi prasangka,
- c. sikap untuk bersedia menerima keputusan sementara, sebelum memperoleh kepastian jawaban. 4)

Dengan tumbuhnya sikap-sikap seperti tersebut di atas, maka penggunaan metode penemuan dalam proses belajar-mengajar dapat menimbulkan rasa percaya pada diri sendiri, serta dapat membina perilaku kreatif sebagaimana diharapkan oleh tujuan pendidikan nasional. 5)

Meskipun metode penemuan memiliki beberapa kelebihan, namun untuk mencapai tujuan pengajaran ternyata tidak dapat berdiri sendiri. Agar proses penemuan dapat dilakukan dengan baik, metode tersebut perlu disertai oleh metode lainnya. Penemuan ide baru sebagai produk dari proses penemuan diperoleh dengan menghubungkan konsep yang telah dimiliki dengan permasalahan yang ingin diketahui. Penemuan hubungan yang merupakan ide baru (sebagian atau seluruhnya) itu adalah hasil dari proses penemuan. Agar proses penemuan dapat berhasil, subyek didik perlu menguasai konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah yang ingin diketahui. Metode ekspositori sebagai metode yang sesuai untuk mengajarkan konsep merupakan metode mengajar yang membantu berhasilnya pelaksanaan metode penemuan. 6)

Penemuan merupakan proses yang terdiri dari serentetan kegiatan belajar yang saling berkaitan, dan setiap kegiatan terdiri dari sejumlah tingkah laku. Urutan kegiatan belajar tersebut adalah :

- a. Merumuskan apa yang ingin diketahui
- b. Mengumpulkan fakta yang tersedia, serta konsep dan pengalaman yang dimiliki
- c. Memiliki fakta serta konsep yang dapat membantu merumuskan dugaan atau jawaban yang sementara

- d. Merumuskan dugaan atau jawaban sementara sebelum memperoleh jawaban yang pasti
- e. Menguji perumusan dugaan atau jawaban sementara, berdasarkan data yang ada
- f. Menarik kesimpulan sebagai suatu penemuan yang menjawab permasalahan yang ingin diketahui, untuk melihat apakah kesimpulan sudah sesuai dengan dugaan atau jawaban sementara.
 Apabila kesimpulan tidak sesuai dengan dugaan atau jawaban sementara yang telah dirumuskan pada langkah sebelumnya, maka ia harus mengulangi langkahnya mulai dari merumuskan kembali dugaannya atau jawaban yang bersifat sementara itu, serta mengujinya, sampai memperoleh kesimpulan 7).
- g. Proses penemuan nilai yang dilakukan sampai pada langkah tersebut perlu dilanjutkan dengan timbulnya kesadaran untuk memiliki serta melestarikan nilai-nilai yang diperolehnya, dan merencanakan atau tindakan sebagai pengalamannya dalam melaksanakan nilai-nilai tersebut.

Dengan diperolehnya ide baru sebagai hasil proses penemuan tersebut dapat ditelusuri bahwa langkah akhir dari proses penemuan yang menghasilkan ide baru itu merupakan kegiatan yang memberikan makna terhadap hasil kegiatan pada langkah awal yaitu mengingat konsep yang dimiliki. Oleh karena itu metode penemuan sering disebut sebagai cara belajar yang memberikan makna (*meaningful learning*). 8)

2. *Kegiatan Berpikir*

Apakah langkah-langkah kegiatan tersebut di atas diperhatikan, akan nampak adanya suatu proses berpikir. Jadi metode yang membina cara berpikir yang didasarkan pada suatu pola, untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara bertahap. Cara

berpikir yang demikian itu disebut cara berpikir intelektual 9), atau berpikir reflektif 10), atau berpikir kreatif 11).

Salah satu pembagian cara berpikir intelektual telah dikemukakan oleh Bloom, yang membaginya ke dalam beberapa tingkatan kemampuan berpikir. Pembagian ini merupakan "*working classification*". Jelasnya bahwa proses berpikir itu merupakan suatu proses mental yang kompleks oleh karena itu hampir tidak mungkin dipisahkan secara tajam.

Tetapi untuk kepentingan mengajar, pembagian tingkat berpikir yang dilakukan oleh Bloom ini mempunyai kegunaan praktis. 12) Ke-enam tingkatan berpikir yang dikemukakan oleh Bloom itu ialah :

- Berpikir tingkat I : mengingat, yang menggambarkan kemampuan untuk mengemukakan kembali sejumlah konsep yang telah dimiliki.
- Berpikir tingkat II : memahami tentang sesuatu, yang menggambarkan kemampuan untuk menterjemahkan konsep yang dimiliki.
- Berpikir tingkat III : menerapkan, yang menggambarkan kemampuan untuk menggunakan suatu teori, dalil, rumus, ke dalam situasi tertentu.
- Berpikir tingkat IV : menguraikan, yang menggambarkan kemampuan untuk menguraikan suatu konsep, teori, rumus, dan lain-lain dalam bagian-bagian atau unsur-unsurnya, sehingga akan nampak hubungannya.
- Berpikir tingkat V : menghubungkan, yang menggambarkan kemampuan untuk melakukan suatu generalisasi dari sejumlah fakta yang menghasilkan suatu penemuan.
- Berpikir tingkat VI : menilai atau mempertimbangkan suatu pendapat atas dasar kriteria tertentu 13).

Meskipun dalam kenyataannya antara tingkat berpikir yang satu dengan yang lain itu terjadi tumpang-tindih, namun pembagian tersebut melihat kepada bobot utama dari setiap tingkatnya.

Apa yang perlu dilakukan oleh pendidik agar subyek didik memperoleh pengalaman belajar yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir seperti itu ?

Untuk itu guru perlu menciptakan kondisi belajar atau lingkungan belajar yang dapat membantu subyek didik dengan memberikan stimulus dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai acuan untuk mengungkap kemampuan berpikir mulai dari tingkat yang rendah sampai kepada tingkat tinggi.

Meskipun untuk melakukan kegiatan berpikir tingkat tinggi itu didahului dengan melakukan kegiatan berpikir pada tingkat rendah. Dapat dikatakan demikian karena ide baru diperoleh dengan menghubungkan konsep yang telah dimiliki (mengingat konsep merupakan kegiatan berpikir tingkat rendah), dengan permasalahan yang ingin diketahui. Jadi penemuan ide baru itu merupakan produk yang diperolehnya melalui serentetan kegiatan berpikir yang dilakukan dengan mengadakan kontrol yang cermat. Sehingga dapat dikatakan bahwa apa yang disebut berpikir kreatif itu terutama atau bobot utamanya terjadi pada waktu melakukan kegiatan berpikir tingkat tinggi. Dapat pula dikatakan bahwa penemuan ide baru tersebut merupakan ciptaan atau kreativitas yang diperoleh melalui proses penemuan.

Apabila direnungkan kembali, kreativitas dapat terjadi dengan adanya interaksi antara beberapa fungsi dasar, yaitu :

- a. Berpikir rasional untuk merumuskan jawaban sementara, menguji jawaban sementara, serta menarik hubungan baru. 14)
- b. Kondisi emosional, yaitu ketidak-puasan akan apa yang sudah ada, serta keinginan untuk mengetahui yang baru. 15)

- c. Cipta talen, yaitu produk yang berharga yang diperoleh melalui aktivitas, kontrol yang ketat, serta kerja keras. 16)
- d. Kesadaran tinggi yang menghasilkan suatu penemuan baru, dan menembus ketidak sadaran. 17)

Keempat kondisi tersebut di atas merupakan empat fungsi dasar yang dapat membentuk kreativitas. 18).

3. *Paket Belajar*

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa untuk meningkatkan kegiatan berpikir perlu diberi acuan dalam bentuk pertanyaan yang mengarahkan subyek didik untuk melakukan kegiatan berpikir mulai dari tingkat rendah sampai kepada tingkat tinggi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dituangkan dalam kerja siswa. Jadi kerja ini merupakan sarana untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar. Karena kegiatan belajar-mengajar itu merupakan salah satu komponen dari suatu sistem pengajaran, maka lembar kerja tersebut merupakan bagian dari suatu perangkat bahan pengajaran yang akan dilaksanakan di kelas.

Seperangkat bahan pengajaran tersebut disebut paket belajar, yang terdiri dari 19) :

Buku I : Petunjuk Umum, yang berisi :

- gambaran umum tentang bagaimana menggunakan paket belajar.
- TIU
- TIK
- prasyarat yang perlu dimiliki (apabila ada)
- pokok-pokok bahan, media, sumber
- garis besar langkah-langkah kegiatan belajar-mengajar disertai dengan alokasi waktu, ruangan, pengorganisasian siswa, serta petunjuk kegiatan.

- Buku II** : Petunjuk Guru, yang berisi :
- rangkuman kegiatan belajar-mengajar
 - rasional struktur kegiatan
 - petunjuk penilaian yang meliputi: prosedur, jenis, alat, kunci jawaban, cara dan kriteria penilaian.
- Buku III** : Bahan/Media/Sumber, yang berisi :
- bahan pengajaran yang dikembangkan untuk mencapai TIK, disertai media dan sumber bahan yang menunjang pencapaian tujuan.
 - lembar kegiatan/kerja siswa yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa, yang disusun sesuai dengan langkah-langkah proses penemuan.

4. Model Lembar Kerja

- Mata Pelajaran** : Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (S M A).
- Kelas/Semester** : 191
- Waktu** : 2 x 45'
- Satuan Bahasan** : Penderitaan Rakyat Dalam Masa Pendudukan Jepang.
- Pokok Bahasan**
- /Sub** : Romusha, Kinrohosi, Gerakan Tiga A, PUTERA, dan Cuo Sangi In.

I. Merumuskan permasalahan yang ingin diketahui :

1. Setelah anda membaca peristiwa penjajahan Jepang di Indonesia, permasalahan apa saja yang anda pikirkan tentang pengalaman bangsa Indonesia pada waktu dijajah bangsa Jepang ?

II. Mengumpulkan fakta :

2. Sejak kapan bangsa Indonesia jatuh di bawah kekuasaan bangsa Jepang ?
3. Siapa saja yang mewakili pihak Belanda dan pihak Jepang dalam melaksanakan serah terima Indonesia ?
4. Apakah yang dimaksud dengan "kinrohoshi" itu ?
5. Apakah yang dimaksud dengan "romusha" itu ?
6. Apakah yang dimaksud dengan "Gerakan Tiga A" itu ?
7. Apakah yang dimaksud dengan "PUTERA" itu ?
8. Siapa sajakah yang disebut "Empat serangkai" itu, dan apakah fungsinya ?
9. Apakah yang dimaksud dengan "Cuo Sangi In" itu ?.

III. Memilih fakta yang dapat membantu untuk merumuskan dugaan/jawaban sementara :

10. Dengan tujuan apakah pihak Jepang melaksanakan "romusha" itu ?
11. Pada mulanya "romusha" dapat berjalan dengan lancar, apakah sebabnya ?
12. Akhirnya rakyat Indonesia menaruh tidak simpatik kepada "Gerakan Tiga A", apakah sebabnya ?
13. Dengan maksud apakah pihak Jepang mempropagandakan "Gerakan Tiga A" itu ?
14. Apakah alasan pihak Jepang mempercayakan kepada "empat serangkai" dalam membentuk "PUTERA" itu ?
15. Kampanye apakah yang dilakukan oleh pihak Jepang pada waktu menyaksikan ketakutan penduduk dalam melaksanakan "romusha" itu ?
16. Apakah sebabnya pemimpin PNI, turut memelopori dalam mengerahkan tenaga "romusha" ?

17. Meskipun sudah dilakukan kampanye, namun pelaksanaan "romusha" tetap gagal, apakah sebabnya ?
18. Dengan maksud apakah "empat serangkai" mau bekerja sama dengan pihak Jepang ?
19. Apakah sebabnya Jepang akhirnya membubarkan "Gerakan Tiga A" itu ?

IV. Merumuskan dugaan/jawaban sementara

20. Setelah anda mempelajari peristiwa-peristiwa seperti tersebut di atas, perkiraan tentang hal-hal yang menjadi penyebab bangsa Indonesia menderita !

V. Menguji dugaan/jawaban sementara.

21. Pelaksanaan "romusha" ternyata berubah dari sukarela menjadi bersifat paksaan. Perubahan yang demikian itu membawa beberapa akibat yang berupa penderitaan. Penderitaan-penderitaan apa sajakah itu ?
22. Dengan dikenalnya sistim "tonarigumi", penduduk menggunakan cara baru dalam mengusahakan pertaniannya. Berikan gambaran tentang hal itu?
23. Kemampuan apa sajakah yang dimiliki oleh penduduk dengan adanya latihan militer yang diberikan oleh Jepang?
24. PUTERA makin dikenal baik di pusat maupun di daerah. Keuntungan apa yang dapat diambil oleh bangsa Indonesia pada waktu itu ?

VI. Menarik kesimpulan

25. Pemimpin Indonesia pada mulanya menyambut baik akan kedatangan Jepang di Indonesia. Sikap para pemimpin Indonesia tersebut mencerminkan butir nilai Pancasila yang mana ?

26. Jepang berubah sikapnya menjadi sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia. Sikap yang demikian itu bertentangan dengan butir nilai Pancasila yang mana ?
27. Meskipun diperalat oleh pihak Jepang, namun para pemuda tetap tekun menjalani latihan militer. Sikap para pemuda yang demikian itu sesuai dengan butir nilai Pancasila yang mana ?
28. Para anggota "PUTERA" tetap berusaha untuk membiayai organisasinya sendiri, meskipun Jepang tidak bersedia memberi biaya. Sikap para anggota "PUTERA" yang demikian itu sesuai dengan butir nilai Pancasila yang mana ?

VII. Pengamalan nilai

29. Seandainya anda menyaksikan penderitaan orang lain yang mungkin disebabkan oleh bencana alam, kemiskinan, pengangguran dan lain-lain, apakah kira-kira yang akan anda lakukan ? Mengapa demikian, berikan alasannya !
30. Seandainya anda menyaksikan penderitaan bangsa lain yang disebabkan karena dijajah, apakah kira-kira yang akan anda lakukan ? Mengapa demikian, berikan alasannya !
31. Seandainya anda mengalami penderitaan, yang dalam penderitaan itu anda masih melihat adanya suatu keuntungan, apakah anda akan menggunakannya ? Mengapa demikian, berikan alasannya !

5. Hasil Penelitian

Penelitian tentang pengajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa yang membina nilai-nilai bangsa yang tidak lain ialah nilai-nilai Pancasila itu sendiri, telah dilakukan di SMA dengan menggunakan Kurikulum 1984, pada kelas I semester 1 di dae-

rah Kotamadya Surakarta, untuk mengetahui hasil belajar siswa pada kemampuan berpikir tingkat rendah (dalam penelitian ini disebut hasil belajar pada aspek kognitif), sikap terhadap nilai-nilai Pancasila (dalam penelitian ini disebut hasil belajar pada aspek afektif), dan kemampuan berpikir pada tingkat tinggi (dalam penelitian ini disebut hasil belajar pada aspek berpikir kreatif). Penelitian dilakukan terhadap kelompok yang diberi perlakuan dengan menggunakan metode penemuan dalam paket belajar, sebagai pembandingan ialah kelompok yang tidak menggunakan metode penemuan dalam paket belajar, melainkan dengan pendekatan siswa aktif serta menggunakan buku paket yang ada di sekolah itu. Populasi terdiri dari kelompok siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Kotamadya Surakarta Tahun Ajaran 1988/1989, selama satu semester, dengan teknik pengambilan sampel secara kelompok.

Hasil penelitian penunjukkan adanya perbedaan yang berarti pada taraf signifikansif $\alpha = 0,01$, hipotesis pokok penelitian diterima. Kelompok yang menggunakan metode penemuan dalam pakek belajar memberikan hasil belajar yang lebih tinggi pada aspek kognitif, efektif, dan berpikir kreatif, setelah dikendalikan pengaruhnya dari pengaruh ubahan-ubahan pengetahuan awal, minat terhadap pelajaran, latar belakang keluarga, prestasi belajar Pendidikan Agama dan Pendidikan Moral Pancasila.

6. Catatan Kesimpulan

Metode penemuan yang dikembangkan melalui paket belajar dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada kemampuan berpikir tingkat rendah, tingkat tinggi, serta sikapnya terhadap nilai-nilai Pancasila, pada pengajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa di SMA Negeri Kotamadya Surakarta.

Catatan Kaki :

- 1) Penjelasan U.U. No. 2, Tahun 1989, Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- 2) T. Raka Joni, *Wawasan Kependidikan* (Jakarta : Depdikbud 1981), halaman 7.
- 3) Conny R. Semiawan, "Ketrampilan Proses Suatu Pendekatan Dalam Meningkatkan Cara Belajar Siswa Aktif dan Kreativitas Pribadi Guru Mandiri", Makalah dalam rangka Rapat Kerja PD. I, Dosen PBM dan PPL IKIP Jakarta.
- 4) Barry K. Beyer, *Inquiry in the Social Studies Classroom A. Strategy for Teaching* (Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company, 1971), halaman 18 – 20.
- 5) Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1988, *Bahan Penataran P-4 dan Referensi Penataran*, tahun ajaran 1988/1989, halaman 149.
- 6) Edwin Fenton dalam beyer, halaman 10.
- 7) Lihat Beyer, halaman 21 – 22.
- 8) T. Raka Joni, *Strategi Belajar Mengajar: Suatu Tinjauan Pengantar*, (Jakarta : Depdikbud, 1980), halaman 14.
- 9) Marsetio Donosepoetro, *Pendidikan Berfikir* (Airlangga University Press, 19883), halaman 1.
- 10) J. Dewey dalam Lester D. Crow dan Alice Crow, *Psikologi Pendidikan* Buku I, terjemahan Z. Kasijan (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), halaman 445.
- 11) Ibid., halaman 447 – 449.
- 12) Lihat Marsetio Donosepoetro, halaman 2.
- 13) Ibid., halaman 2 – 6
- 14) Torrance dalam Barbara Clark, *Growing Up Gifted Developing the Potential of Children at Home and at School* (Columbus, Ohio : Charles E. Merrill Publishing Company, 1983, halaman 33.

- 15) Krishnamurti dalam Clark, halaman 39.
- 16) Maslow dalam Clark, halaman 42.
- 17) Taylor dalam Clark, halaman 44.
- 18) Lihat Clark, halaman 31.
- 19) I.G.A.K. Wardani, *Pengembangan Paket Belajar* (Jakarta. Depdikbud, 1981), halaman 3 – 4.

PENGAJARAN SEJARAH

Abu Su'ud

1. Pendahuluan

Kurikulum sekolah untuk jenjang sekolah manapun telah mengalami pelbagai pergantian, seiring dengan perubahan kebutuhan tahapan pembangunan. Dengan sendirinya perubahan itu memberi pengaruh pula pada kurikulum sejarah pada sekolah-sekolah tersebut, yang mengalami perubahan demi perubahan. Salah sebuah ciri yang menandai masing-masing jenis kurikulum sejarah di sekolah-sekolah misalnya, terlihat pada status pelajaran sejarah itu sendiri, dalam kaitan dengan mata pelajaran lain. Dengan sendirinya perbedaan status itu sendiri kemudian memberikan dampak pada berbagai kegiatan pengajaran sejarah.

Periode sebelum Kurikulum 1975, misalnya, ditandai dengan diletakkannya mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, sebagaimana mata pelajaran yang lain. Ini berarti bahwa pelajaran sejarah diajarkan lepas dari mata pelajaran-mata pelajaran ilmu bumi, kewarganegaraan, meskipun termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu sosial, atau bahkan berada

dalam kelompok mata pelajaran yang berkaitan langsung dengan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya dalam Kurikulum 1975, sejarah secara struktural dikelompokkan ke dalam satu bidang studi dengan ilmu bumi dan kewarganegaraan, yaitu bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Seperti kita ketahui pada saat itu sekolah-sekolah kita mengenal bidang studi lainnya, seperti IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), Matematika, Bahasa dan sebagainya. Akhirnya dalam Kurikulum 1984, kembali sejarah dilepaskan dari ikatan struktural dalam Bidang studi IPS. Ini berarti bahwa sejarah kembali diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Sebetulnya ada ciri lain yang lebih memberikan peluang lebih banyak terhadap guru sejarah di sekolah untuk memanfaatkan pelajaran sejarah sesuai dengan potensi pendidikan yang terkandung di dalamnya, ketika kembali sejarah diajarkan tidak dalam struktur bidang studi. Yang dimaksud adalah bahwa sejarah sekarang dimasukkan ke dalam katagori kurikulum inti. Dalam status baru ini sejarah diajarkan kepada seluruh pelajar, dari jurusan apapun yang telah mereka pilih. Ini berarti bahwa sejarah dapat dikembangkan oleh para pengajar sejarah, sesuai dengan tujuan pengajaran sejarah. Sebagaimana kita ketahui mempunyai potensi untuk digunakan dalam kerangka pendidikan nilai, agar pelajar dapat mengembangkan diri menjadi warga negara yang baik, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sementara itu pada sekolah kita dikenal pula program Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), yang secara khusus dimaksudkan sebagai sarana untuk menanamkan jiwa dan Semangat 45, yaitu patriotisme, kepahlawanan maupun nasionalisme.

Sampai disini muncullah kemudian sejumlah masalah dalam dunia pengajaran sejarah, yang muncul karena para pengajar sejarah harus melakukan sejumlah upaya penyesuaian diri dengan tugas-tugas profesional mereka, kalau mereka menghendaki peningkatan mutu pengajaran sejarah dalam masa-masa yang selalu berkembang. Masalah itu bermula dari pengertian konseptual mengenai peranan sejarah dalam kehidupan

manusia, potensi sejarah dalam dunia pendidikan dan pengajaran ataupun bagaimana sejarah itu diajarkan di sekolah-sekolah. Sudah barang tentu masalahnya dapat berkembang kearah perbincangan mengenai peranan PSPB dalam pengajaran sejarah di sekolah, karena meskipun GBHN masih menganggap perlu peran PSPB dalam proses pendidikan, sementara pengalaman menunjukkan terjadinya kejenuhan dalam kegiatan pengajaran sejarah.

Tulisan ini bertumpu secara empirik pada hasil wawancara dengan para pengajar sejarah pada jenjang pendidikan yang berbeda, dari SMP hingga Perguruan Tinggi. Pembahasan yang kemudian dilakukan tidak dapat melepaskan diri dari pengertian-pengertian konseptual di bidang kesejarahan maupun pendidikan sejarah.

2. *Dapatkah Sejarah Mengajarkan Sesuatu ?*

- a. Pernyataan yang menjadi klasik mengenai kegunaan sejarah telah dikemukakan oleh Herodotus, yaitu 'Historia Vitae Magistra'. Sejarah merupakan guru kehidupan, katanya. Artinya, bahwa sejarah memiliki kemampuan untuk digunakan mencapai tujuan pendidikan tertentu yang dikehendaki manusia, karena pada hakekatnya sejarah umat manusia berisi pengalaman yang penuh dengan pelajaran tentang hidup.
- b. Mengenai fungsi sejarah bagi kehidupan umat manusia nampaknya tergantung pada pengalaman tentang sejarah itu sendiri, yang amat bervariasi sepanjang sejarah.

- 1) Sejarah *berfungsi genesis*, oleh karenanya bersifat *deskriptif naratif* dan *informatif*.

Dalam hal ini sejarah berisi rangkaian fakta yang dianggap menarik untuk dikisahkan dari generasi ke generasi. Sejarah hanya berisi tentang hal di sekitar *what, who, when, where* serta *how*. Dengan demikian sejarah lebih merupakan hasil sastra atau buah karya seni manusia, yang amat patut untuk dikisahkan atau di-

dongengkan. Inilah fungsi sejarah sebagai seni (*history as art*).

- 2) Sejarah *berfungsi didaktis*, oleh karenanya dipilih fakta mengenai pengalaman masa lalu yang membanggakan, menyedihkan dan sebagainya, yang dikomunikasikan kepada generasi baru untuk tujuan mengobarkan semangat kebangsaan dan sebagainya. Berbagai nilai luhur (*ideal*) bangsa ingin ditanamkan lewat sejarah, agar terjadi proses sosialisasi dalam generasi baru, untuk menumbuhkan semangat kepahlawanan, patriotisme, nasionalisme dan sebagainya.

- 3) Sementara itu aliran *Sejarah Baru* (*New Historism*) amat menekankan pada perlunya penyajian fakta sejarah secara lebih obyektif, apa adanya, lugas. Sejarah oleh karenanya harus tidak usah mendidik (*didaktis*), untuk membangkitkan semangat kepahlawanan dan sebagainya pada generasi baru. Untuk itu sejarah disusun atas dasar fakta yang sesungguhnya terjadi, sehingga diperlukan proses studi *sejarah kritis*. Proses yang dilakukan adalah mengumpulkan data, menyeleksi, menganalisis, menafsirkan dan menyajikannya dalam buku sejarah, yang dikenal sebagai *history as written*.
 Proses yang demikian ini memang menunjang untuk terjadinya sejarah sebagai ilmu (*history as science*), yang bersifat obyektif. Namun demikian tidaklah mudah untuk menyajikan sesuatu tulisan sejarah yang betul-betul bebas dari subyektifitas penulis, karena berbagai alasan, seperti kepribadian, ras, agama, kelompok etnis, kelompok kepentingan dan sebagainya.
 Sebagai konsekuensi dari kehendak untuk menyajikan sejarah secara lebih utuh, maka diambillah cara pendekatan yang *interdisiplin*. Sejak itu maka bidang kajian sejarah telah masuk ke dalam kawasan bidang studi ilmu-ilmu sosial atau IPS (*Ilmu Pengetahuan Sosial*) ketika harus disajikan di sekolah.

- c. Dapatkah sejarah mengajarkan sesuatu, dengan demikian merupakan pertanyaan yang dapat dijawab sebagai berikut :
- 1) Sejarah pada dasarnya merupakan sebuah ingatan mengenai *pengalaman* umat manusia. Dan karena umat manusia itu pada dasarnya satu, maka terhapusnya sesuatu bagian dari pengalaman umat sebagai kesatuan, merupakan kehilangan bagi bagian umat yang lain. Dengan sejarah kita bisa mengetahui *siapa* sebenarnya kita, dan dengan cara bagaimana umat manusia berkembang serta mempertahankan keberadaannya.
 - 2) Oleh karenanya peninggalan masa lampau atau kejadian masa lampau menantang kita untuk mengetahuinya, untuk lebih mengetahui *drama kehidupan* umat manusia, dengan jalan menguak tabir kehidupan masa lampau tersebut. Jelaslah bahwa sejarah merupakan bidang *penjelajahan intelektual* manusia maupun *kisah petualangan* manusia yang menjadi obyek kerinduan untuk menelaahnya.
 - 3) Sejarah merupakan *sumber inspirasi* bagi masa kini dan yang akan datang, dalam upaya untuk mengembangkan diri dan agar manusia menjadi makin bijaksana.

3. *Bagaimana Sejarah Diajarkan ?*

Kurikulum pada dasarnya sebuah pedoman umum untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Di sana tercantum uraian mengenai rumusan tujuan masing-masing mata-ajaran, sehingga jelas maksud dan tujuan mata ajaran tersebut diajarkan pada lembaga tertentu. Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar bagi mata ajaran tersebut perlu disusun bahan-bahan apakah yang diperkirakan menunjang pencapaian tujuan kurikuler tersebut. Demikian pula perlu disiapkan strategi maupun metode yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, dengan jalan mengelola bahan yang mungkin dipergunakan tersebut. Dan pada

akhirnya harus pula dipersiapkan cara-cara untuk dapat mengetahui keberhasilan segala tindakan yang telah dilakukan dalam rangka kegiatan belajar mengajar tadi.

Dalam pelaksanaannya setiap pengajar, termasuk pengajar sejarah, melaksanakan *proses penafsiran* atas segala kegiatan pengajaran tersebut, sehingga tidaklah dapat dijumpai suatu kegiatan pengajaran sejarah yang sama, meskipun sama-sama memakai acuan kurikulum yang sama. Atas dasar asumsi semacam itulah wawancara dilakukan terhadap sejumlah pengajar sejarah pada jenjang pendidikan yang berbeda.

Perlu dikemukakan bahwa cara pengambilan data semacam ini tidaklah dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai hakikat pengajaran sejarah yang dibutuhkan. Namun pembicaraan dari hati ke hati secara terbuka dengan responden memberikan keyakinan kepada penulis untuk mengkomunikasikan hasil wawancara tersebut sebagai informasi yang amat berguna untuk lebih mengetahui sebuah perspektif pengajaran sejarah dewasa ini di Semarang.

Pengalaman para pengajar sejarah tersebut akan dipaparkan di bawah ini sesuai dengan bidang-bidang kegiatan yang terkait.

a. Motivasi Menjadi Pengajar sejarah

Meskipun tidak dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara motivasi dengan kegairahan kerja menjadi pengajar sejarah, namun variasi jawaban mengenai latar belakang mereka menjadi pengajar sejarah merupakan informasi berharga untuk disajikan: Dan ternyata keempat pengajar sejarah pada jenjang-jenjang pendidikan yang berbeda, memberikan jawaban yang bervariasi.

Salah seorang dosen sejarah yang tergolong senior pada Fakultas Sastra Universitas Diponegoro menyatakan, bahwa dia mulai tertarik pada kajian sejarah justru ketika masih duduk di sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada waktu itu dia sempat *membaca buku* terjemahan berjudul 'Jatuhnya Seorang Dewa',

dan segera setelah itu dia mulai tertarik pada buku-buku sejarah, meskipun guru sejarah di SMP pada waktu itu sangat membosankan kalau mengajar. Akibatnya, ketika dia kemudian menjadi pengajar sejarah, dia tidak mempunyai panutan atau model dalam menjalankan tugas sebagai pengajar sejarah. Buku yang menarik perhatiannya itu diperolehnya dari sebuah pameran buku di kotanya. Dan sampai sekarang dosen pria tersebut telah mengajar sejarah lebih dari limabelas tahun dengan bersemangat, dengan tujuan agar generasi muda *tertarik* untuk membaca buku-buku sejarah, karena dari sana dapat diambil banyak sekali pelajaran hidup.

Seorang guru sejarah yang menyandang gelar sarjana muda IKIP mengaku telah mengajar sejarah selama dua puluh satu tahun. Diakui bahwa ibu guru sejarah itu mulai tertarik untuk belajar sejarah, katanya, sejarah dapat menanamkan rasa cinta tanah air. Dia mengaku pula guru-guru sejarahnya selama di SMP maupun SMA tidak pernah merangsangnya untuk cinta sejarah pada para siswanya. Namun ibu guru sejarah ini sudah tertarik sejak SMP pula. Dan sejak itu pula dia bermaksud menjadi guru sejarah lewat IKIP, dengan motivasi agar generasi muda memiliki kecintaan pada tanah air yang dalam, dengan menjadi guru sejarah pada sebuah SMA Negeri di Semarang.

Guru Sejarah lain pada SMA Negeri yang tergolong favorit telah mengaku menjadi guru sejarah sejak lebih dari 25 tahun yang lalu, di sekolah menengah di luar Jawa. Katanya, dia menjadi tertarik pada sejarah dan bahkan menjadi guru sejarah karena sangat terkesan oleh guru sejarahnya di SMP. Gurunya dulu dianggap amat mampu menjiwai para tokoh dalam sejarah, dan seringkali mampu menghidupkan kembali peristiwa-peristiwa historis masa lampau di muka kelas. Lalu dia memilih masuk PTPG (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru), yang sekarang menjadi IKIP Bandung. Motivasinya mengajar sejarah hanya

satu, ialah ingin mengobarkan semangat kebangsaan maupun patriotisme pada generasi baru.

Sementara itu seorang guru putri yang mengajar sejarah di sebuah SMP di Semarang mengaku, bahwa dia memilih jadi guru sejarah tanpa ada sesuatupun yang mendorongnya. Guru sejarahnya selama di SMP maupun di SMA biasa-biasa saja. Barangkali satu-satunya latar belakang yang mendorongnya memilih jurusan Sejarah pada IKIP Semarang, karena kata kebanyakan teman anak putri lebih cocok memilih jurusan yang banyak hafalan. Lalu dipilihnya jurusan yang mengesankan banyak hafalan itu, yaitu menghafal tahun-tahun dan nama-nama tokoh sejarah. Lalu di IKIP itu pulalah dijumpainya mahasiswa jurusan lain, yang kemudian menjadi suaminya.

b. Hakekat Tujuan Pengajaran Sejarah

Agak sulit mengatakan bahwa hasil temuan dari wawancara dengan para pengajar sejarah itu, merupakan pernyataan hakekat tujuan pengajaran sejarah di sekolah. Ungkapan-ungkapan mereka tentang tujuan pengajaran sejarah lebih merupakan ungkapan 'klise', seperti yang biasa dibaca dalam Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) sejarah pada kurikulum di sekolah mereka. Seperti untuk menghasilkan warga negara yang baik, bertanggung jawab; mengembangkan saling pengertian di antara sesama bangsa maupun antar bangsa; menanamkan jiwa patriotisme, nasionalisme. Sebaliknya pengajar sejarah pada Fakultas Sastra beranggapan, bahwa sejarah lebih merupakan sarana untuk membankitkan *kesadaran politik* pada mahasiswa, karena sejarah memang mengajarkan proses pergelutan antar kelompok masyarakat, kelompok bangsa dan sebagainya, dalam upaya mengatur umat untuk menemukan kesejahteraan bagi kelompok maupun bangsanya.

Bagi keempat responden pengajar sejarah tersebut tak ada perbedaan yang spesifik antara matapelajaran sejarah bukan

PSPB dengan PSPB dalam hal tujuan yang hendak dicapai. Bahkan menurut pengajar sejarah di Perguruan Tinggi, matakuliah sejarah dunia pun dapat berfungsi untuk membangkitkan cinta tanah air, kebangsaan maupun kesadaran politik mahasiswa. Oleh karenanya menjadi pertanyaan bagi para responden, mengapa untuk mencapai tujuan pengajaran semacam itu hanya di bebankan pada pengajar PSPB.

Belum lagi kalau diperhatikan bahwa para pengajar Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pun mempunyai peluang pula untuk bertugas dalam mencapai tujuan pengajaran yang sama, yaitu mengantarkan para siswa menjadi warga negara yang baik, cinta tanah air, cinta bangsa dan sebagainya. Oleh karenanya perlu difikirkan kemungkinan diintegrasikan kembali PSPB ke dalam matapelajaran sejarah nasional. Dengan cara ini bahkan para pengajar mempunyai peluang lebih banyak untuk mengembangkan matapelajaran sejarah nasional lebih leluasa, karena dengan sendirinya mempunyai jatah jam pelajaran lebih banyak. Hal lain lagi yang bisa dicapai ialah dihindarinya kemungkinan terjadinya kejenuhan pada para siswa, karena mendapatkan bahasan yang sama pada lebih dari satu matapelajaran.

Menurut pengajar sejarah di SMP, waktu yang tersedia untuk mengajar sejarah tidak sebanding dengan bahasan yang hendak disampaikan. Waktu selama 6 semester namun kalau masing-masing hanya tersedia 1 jam pelajaran, menjadi tidak dapat menampung tuntutan bahan yang hendak disampaikan, agar dapat dicapai tujuan pengajaran sejarah. Sementara itu untuk PSPB tersedia 2 jam pelajaran, meskipun hanya dalam waktu selama 3 semester. Dengan kondisi semacam ini, maka kemungkinan terjadinya kejenuhan dalam matapelajaran PSPB besar sekali, baik bagi siswa maupun para guru PSPB.

Dalam sebuah 'focus group discussion' dengan para mahasiswa Jurusan Sejarah IKIP semester VII, muncul juga komentar sama mengenai kedudukan PSPB dalam kurikulum sejarah di SLTP/SLTA. Hanya beberapa mahasiswi yang beranggapan

bahwa PSPB seperti yang sekarang ini, masih dipertahankan, sementara sebagian besar lagi mulai meragukan perlunya pengajaran PSPB seperti yang berlaku sekarang dipertahankan.

c. *Bahan Pelajaran*

Secara teoritis pemilihan bahan pelajaran ditentukan setelah pengajar merumuskan dengan pasti tujuan mata pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa yang mempunyai karakteristik tertentu. Namun dalam kenyataan ada dua kelompok pengajar yang mempunyai langkah kebijakan tidak baku. Sebagian dari mereka, misalnya pengajar sejarah pada Fakultas Sastra tidak pernah menuliskan rumusan tujuan pengajaran setiap kali mengajar. Dengan kata lain, dosen sejarah ini tidak pernah membuat selebarpun Satuan Pelajaran atau Perkuliahan, dalam bentuk yang baku. Rumusan tujuan hanya ada di benak sang dosen, dan bahan kuliah terangkum dalam setumpuk *kartu kuliah*. Sebagian lagi membuat Satuan Pelajaran.

Pembuatan 'diktat' sebagaimana dianjurkan oleh lembaga tidak dilaksanakan, karena menurutnya hanya membuat *mahasiswa malas* dan tidak berusaha untuk membaca buku-buku yang dianjurkan oleh dosen. Sebagai ganti dosen menuliskan garis garis besar perkuliahan dalam kartu sebesar kartu pos. Di bagian sebelah lain kartu tertulis rumusan soal-soal atau pertanyaan ujian untuk lingkup bahan perkuliahan bersangkutan. Pada awal perkuliahan seluruh rencana perkuliahan untuk semester bersangkutan, disampaikan kepada mahasiswa. Demikian juga buku-buku yang harus dibaca oleh mahasiswa disebutkan pula pada pertemuan awal dengan mahasiswa.

Bagi para guru SMA bahan pelajaran Sejarah Indonesia tidak menjadi masalah, karena masih tersedia Buku Sejarah Nasional. Bahkan untuk para siswapun tidak ada masalah, karena tersedianya buku paket. Namun fasilitas semacam itu tidak dimiliki oleh mereka yang bersekolah di SMA swasta. Meski-

pun demikian pengadaannya tidak menjadi halangan sebab tersedianya mesin copy di Semarang.

Bagi seorang guru sejarah yang telah bertugas lebih dari 25 tahun, tidaklah jadi masalah untuk menyusun sendiri bahan pelajaran Sejarah Dunia, karena tersedianya berbagai sumber bacaan di Perpustakaan. Bahkan beberapa kawan guru, menurut pernyataan guru tersebut, tidak pula berkeberatan untuk memanfaatkan 'bahan buatan sendiri' tersebut, yang ditulis dengan rapi dalam format Satuan Pelajaran yang baku. Berbagai buku yang bersifat *monografi* maupun *Ensiklopedi* berbahasa asing telah menunjang kegemarannya untuk menyusun bahan sejarah tersebut.

Sedangkan itu guru sejarah yang baru berpengalaman mengajar selama 21 tahun di SMP dan SMA, untuk mengajar di SMA sekarang dia menyusun Satuan Pelajaran dengan rapih, yang bahannya diambil dari buku-buku pelajaran sejarah yang barangkali tidak beredar di pasaran, seperti karangan Siswoyo, Subantardjo maupun Sukmono. Sebagai bahan tambahan ibu guru tersebut memberikan foto copy kepada para siswa bahan-bahan ramuan sendiri itu. Sebetulnya, seperti halnya pak guru sejarah maupun ibu guru sejarah yang lain, dia menyusun Satuan Pelajaran lebih bersifat hanya untuk kepentingan atau memenuhi persyaratan administrasi sekolah saja. Dengan kata lain, tugas itu dipenuhi untuk diserahkan kepada Kepala Sekolah. Sedangkan untuk keperluan pengajaran dia menyusun catatan pada buku catatan, yang setiap kali dia berhalangan datang ke kelas, dapat diserahkan untuk dicatat kembali oleh siswa atau difoto copy.

Ibu guru sejarah yang menjadi responden untuk jenjang SMP mengakui pula bahwa Satuan Pelajaran disusunnya sebagai persyaratan administratif yang ditujukan untuk Kepala Sekolah. Pekerjaan untuk menyusun Satuan Pelajaran itu sendiri sebetulnya membosankan, namun karena ingin menjadi pegawai yang baik dikerjakannya juga tugas tersebut. La-

ma-lama dirasakan, bahwa pekerjaan itu dapat membantu pekerjaan sebagai guru sejarah. Dengan Satuan Pelajaran itu dia dapat mempunyai arahan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Namun untuk meningkatkan mutu kegiatan profesionalnya, ibu guru sejarah itu harus membuat catatan tambahan untuk diberikan kepada para siswanya.

Yang agak mengejutkan ialah bahwa ketiga guru sejarah pada jenjang SMP maupun SMA di atas, termasuk juga para guru sejarah yang lain, belum pernah mendengar adanya, atau kemudian melihatnya, apalagi membaca buku 'Petunjuk Guru Sejarah Nasional Indonesia', meskipun mereka telah menjadi guru sejarah lebih dari sepuluh tahun. Buku yang dimaksud diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 1982. Sebetulnya buku yang disusun oleh tim yang diketuai oleh Mendikbud Nugroho Notosusanto itu amat bermanfaat bagi setiap guru sejarah pada jenjang SLTP/SLTA, meskipun mereka kebetulan tidak memiliki buku paket.

d. Bagaimana Mengajarkan Sejarah ?

Metode pengajaran merupakan bagian dari strategi pengajaran atau belajar mengajar yang paling dapat diamati, karena merupakan kegiatan yang memperlihatkan komunikasi secara fisik dan langsung di antara guru dan siswa. Bagian ini dalam dunia teater dikenal sebagai acting atau permainan panggung. Biasanya bagian ini memberikan kesan yang amat mendalam kepada para penilai, karena meskipun segala persiapan sudah baik, kalau bagian acting ini tidak berhasil dikemukakan dengan baik akan menimbulkan kesan tidak baik pula pada penilai. Para siswa nampaknya hanya mudah dipengaruhi oleh mutu penampilan guru di kelas, dan bukan oleh segala persiapan di belakang meja sebelumnya. Sehingga diduga efektifitas sesuatu kegiatan belajar mengajar lebih banyak terjadi oleh aspek cara guru mengembangkan kegiatan belajar mengajar di kelas.

Ternyata cara mengajar yang dikembangkan oleh para pengajar sejarah itu amat bervariasi, dan bervariasi pula faktor-faktor tersebut tidak diketahui pasti, sehingga cara-cara mengajar mereka sulit untuk disebutkan sebagai akibat latar belakang pendidikan keserjanaan merekakah, hasil penatarankah, hasil program Aktakah, pengaruh guru merekakah.

Misalnya, dosen sejarah lulusan Fakultas Sastra Budaya Universitas Gajah Mada yang sekarang menjadi dosen senior sejarah di Universitas Diponegoro, juga tidak tahu persis pengaruh faktor manakah yang tercermin dalam caranya mengajar sejarah. Menurutnyanya cara mengajar yang paling disukai adalah *bercerita*, bermula dengan mengemukakan sesuatu problem dalam perkembangan nasionalisme Indonesia dalam masa penjajahan Belanda, kalau harus membahas periode pergerakan nasional. Barulah kemudian dilaksanakan proses *menganalisis* problem sosial yang ada waktu itu. Selama proses itu berlangsung dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan *interupsi*, baik berupa *komentar*, *pertanyaan* atau *jawaban* atas sesuatu pertanyaan. Secara teknis cara semacam itu dikenal sebagai '*ceramah bervariasi dan diskusi*'.

Untuk menunjang kejelasan cerita sejarahnya, maka dosen menggunakan *skema* dan *catatan* di papan tulis. Dengan cara ini *daya fantasi* mahasiswa dikembangkan untuk dapat menghayati kejadian sejarah. Cara ini dianggap lebih efektif daripada dengan menggunakan alat bantu berupa *alat peraga* maupun *OHP* (Overhead Projector), yang dinilai tidak praktis untuk kondisi fakultas dimana dia bekerja. Diukur dari kemajuan teknologi pendidikan barangkali cara mengajar semacam ini dianggap sangat tradisional, karena enggan untuk menggunakan berbagai teknologi pendidikan yang ada.

Ibu guru sejarah di SMA menurut pengakuannya juga menggunakan cara bercerita, bertanya jawab, serta memberikan catatan kepada siswa. Cara ini biasa kita kenal dengan istilah '*ceramah bervariasi, tanya jawab*'. Dan untuk kondisi SMA di Indonesia, paling tidak di Semarang, jangan diharapkan

ada guru menggunakan OHP ataupun slide, Sebaliknya yang dapat dilakukan oleh guru SMA ini ialah gabungan antara ceramah, mencatat, menggunakan alat peraga berupa peta ataupun gambar. Teknik ini disebutkan oleh ibu guru sebagai teknik yang '*fleksibel*'.

Sedangkan bapak guru sejarah yang mengajar pada SMA yang termasuk favorit, menggunakan kemampuannya dalam *menerangkan* (berceramah), membuat *skema*, dan memberikan kesempatan *tanya-jawab*. menurutnya, diskusi sulit sekali dikembangkan, karena keterbatasan waktu yang tersedia untuk pengajaran sejarah. Apalagi kalau dia harus menyiapkan para siswa untuk menghadapi EBANAS, oleh karenanya guru tersebut harus "berpacu dengan waktu untuk menghabiskan bahan pelajaran". Inilah yang menjadi hambatan utama para guru sejarah di SMA dalam pengembangan metode pengajaran yang inovatif. Sebagai tambahan guru juga memberikan tugas kepada siswa untuk mencuat *laporan kunjungan* ke museum dan sebagainya maupun membuat *kliping* sebagai *non kurikuler*.

Sementara itu ibu guru sejarah yang mengajar di SMP merasa lebih cocok dengan kemampuan dirinya kalau banyak *bercerita*, *mencatat*, menunjukkan *gambar atau potret* kalau memungkinkan, menunjuk pada *peta* atau *menggambar peta* sederhana di papan tulis. Sebagai tambahan guru menugaskan untuk membuat *kliping* ataupun *meringkas* bagian-bagian buku tertentu. Namun demikian guru sejarah tersebut kurang bergairah untuk melaksanakan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), karena beranggapan bahwa waktu yang tersedia tidak mencukupi, dan lagi cara ini akan membuat kelas menjadi gaduh.

e. Mengevaluasi Hasil Belajar

Evaluasi hasil belajar seharusnya dapat mengetahui ada tidaknya perubahan yang telah terjadi pada diri siswa dalam sikap dan tingkah laku mereka sejalan dengan rumusan tujuan kurikuler. Demikian juga evaluasi dalam kegiatan pengajaran sejarah, seharusnya dapat mengetahui ada tidaknya perubahan para

siswa yang belajar sejarah, berupa perubahan dalam tingkat ke-cintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa, mutunya sebagai warga negara, tingkat saling pengertian di antara sesama atau bangsa lain dan sebagainya. Namun patut diketahui segala perubahan itu sangat sulit diamati, karena dua hal. Pertama, karena jarang sekali ada pengajar atau guru yang melakukan *tes diagnosis* sebagai penjajagan, untuk mengetahui kondisi awal para siswa sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Kedua, karena perubahan di bidang *afeksi* atau *emosi* para siswa tidak mudah dilakukan. Oleh karenanya sudah dianggap memadai seandainya sudah dapat diketahui perubahan para siswa dalam bidang pengetahuan (kognisi), yang terlihat pada kemampuan *menyebutkan data* ataupun *melakukan analisis* atas sesuatu masalah.

Cara untuk melakukan evaluasi hasil belajar yang dilakukan oleh dosen sejarah yang menjadi responden adalah, dalam bentuk *esai* atau *uraian*, maupun *laporan hasil bacaan buku*. Dia beranggapan, bahwa teknis *tes obyektif* tidak dapat menampung kemampuan analisis mahasiswa yang sangat dibutuhkan oleh calon sarjana sejarah (sejarawan). Sedangkan dengan laporan hasil bacaan buku calon sejarawan itu dapat peluang untuk melakukan *studi kritis* terhadap sesuatu buku sejarah.

Sementara itu para guru sejarah yang mengajar pada kedua jenjang pendidikan yang menjadi responden, melakukan tes dengan teknik seperti yang dianjurkan, yaitu *tes obyektif*. Namun mereka tetap memanfaatkan hasil pengamatan atas kemampuan siswa dalam tes harian, yang dilakukan setiap tatap muka di kelas. Meskipun mereka mengakui kelemahan teknik tes obyektif yang dilakukan, namun mereka beranggapan bahwa teknik ini dapat mempermudah melakukan pembijian, apa lagi kalau harus memeriksa pekerjaan ujian beberapa kelas dalam waktu hampir bersamaan.

Salah seorang pengajar sejarah di SMA beranggapan, bahwa konstruksi tes sikap untuk PSPB memang rendah mutu keterandalannya (reliabelitasnya), karena membuat para siswa berusaha menjawab alternatif jawaban yang 'favourable'. Dengan akal sehatpun seseorang dapat memilih alternatif yang demikian

itu, hingga masih diragukan bahwa jawaban yang dipilih betul-betul merupakan pilihan yang serasi dengan pilihan hatinya. Namun mereka tidak dapat berbuat lain, karena pola konstruksi tes sikap semacam itulah yang mereka peroleh dari contoh dalam penataran.

4. *Penutup*

Pada bagian ini perlu dikemukakan sejumlah kesimpulan yang ditarik dari temuan yang merupakan informasi dari lapangan, meskipun sangat tidak memadai jumlahnya.

- a. Pengalaman masa lalu dari para pengajar sejarah nampaknya mempunyai pengaruh amat khusus pada mereka dalam kegiatan mereka sebagai pengajar sejarah. Ada yang tertarik pada studi sejarah, dan bahkan kemudian menjadi guru sejarah, karena *pengaruh bacaan sejarah* yang amat mengesankan pada masa remaja (ketika menjadi siswa SMP). Ada juga yang menjadi tertarik belajar sejarah karena *penampilan guru sejarah* di masa menjadi siswa SMP. Namun ada juga yang tidak mempunyai dorongan apapun untuk belajar sejarah, *kecuali nasib* juga yang membawanya menjadi guru sejarah.

Yang menarik adalah adanya fakta bahwa *guru sejarah yang tidak menarikpun*, tidak berpengaruh jelek terhadap semangat belajar sejarah. Sekali lagi pengalaman masa lalu dalam mempelajari sejarah nampaknya *hanya memberikan pengaruh secara khas*.

- b. Kebanyakan pengajar sejarah amat dipengaruhi oleh rumusan yang bersifat 'klise' mengenai tujuan belajar sejarah, yang kebanyakan bersifat *bombastis*. Namun ada juga yang merasa menemukan, bahwa sejarah dapat memberikan pengaruh bagi *kesadaran politik*.

Namun tujuan pengajaran sejarah tersebut tidak hanya dapat dicapai dengan jenis pengajaran sejarah tertentu saja, melainkan oleh baik Sejarah Nasional, Sejarah Dunia, maupun PSPB.

- c. Setiap pengajar sejarah harus mempunyai rumusan tujuan pengajaran sejarah, baik secara tersurat dalam Satuan Pelajaran, maupun hanya tersirat dalam benak.

Satuan Pelajaran bagi kebanyakan pengajar sejarah hanya mengesankan sebuah kewajiban yang datang dari luar, dan cenderung tidak mempunyai fungsi untuk meningkatkan penampilan profesional guru sejarah.

- d. Diperlukan *kemampuan dan kemauan* untuk mempersiapkan bahan pelajaran sejarah pada setiap pengajar sejarah pada jenjang pendidikan manapun. Bentuk persiapan itu dapat mengikuti *berbagai cara*.

Dengan bahan pelajaran yang telah disiapkan itu guru dapat melaksanakan peran sebagai guru dengan baik, sekaligus dapat mengembangkannya menjadi semacam 'diktat' atau buku pegangan untuk mengajar, yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih luas lagi.

- e. Sejarah berkaitan dengan cerita, oleh karenanya teknik penyampaian paling digemari adalah *bercerita* untuk membangkitkan *fantasi* pada masa lampau. Namun karena sejarah juga berfungsi menjelaskan berbagai fenomena sosial, maka pengajaran sejarah harus melibatkan *penalaran* dan *analisis*.

Untuk pengajaran sejarah di *jenjang pendidikan menengah* porsi penalaran maupun analisis lebih kecil bila dibanding dengan pada pengajaran sejarah di pendidikan tinggi.

CBSA belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya, terutama karena jatah waktu yang tersedia tidak cukup untuk pengembangan CBSA, sementara guru harus 'berpacu dengan waktu' guna menyiapkan para siswa menghadapi EB-TANAS.

- f. Untuk mengetahui ada tidaknya perubahan sebagai hasil belajar, sebaiknya dilakukan *tes peninjauan* lebih dahulu terhadap para siswa pada awal pertemuan.

Pengamatan atas perubahan di bidang *kognitif* terhadap para siswa sebagai hasil belajar, dianggap *memadai*. Sedangkan perubahan di bidang *ketrampilan* maupun *afeksi* perlu dilakukan pengamatan dan instrumen yang lebih dipersiapkan. Misalnya, untuk mengetahui hasil belajar dalam PSPB tidak ada salahnya kalau juga diungkap kemampuan kognitif siswa. Tes dengan skala sikap sebaiknya tidak dipergunakan untuk menilai 'benar – salah' jawaban, melainkan sekedar mengetahui 'kecenderungan' siswa.

Daftar Bacaan :

- Ballard, Martin. 1970, *Change and the Curriculum*, dalam *New Movements in the Study and Teaching of History* oleh Martin Ballard (ed), Londo : Temple Smith.
- Daniels, Robert V. 1966, *Studying History*, New Jersey : Prentice-Hall.
- Depdikbud. 1982. *Petunjuk Guru Sejarah Nasional Indonesia, Untuk SMP/SMA*, Jakarta.
- Depdikbud. 1975. *Kurikulum 1975*, Jakarta.
- Depdikbud. 1984. *Kurikulum 1984*, Jakarta.
- Elton, G. R. 1970, *What Sort of History Should We Teach*, dalam *New Movements in the Study and Teaching of History*, oleh Martin Ballard (ed), London : Temple Smith.
- Hallam, R. N. 1970. *Piaget and Thinking in History*, dalam *New Movements in the Study and Teaching of History*, oleh Martin Ballard (ed), London: Temple Smith.
- Hill, C. P. 1956. *Saran-Saran tentang Mengajarakan Sejarah*, Jakarta : Perpustakaan Perguruan Kementerian P.P. dan K.

PENDIDIKAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA

Sebuah pengalaman mengajar

I Putu Gede Suwitha,

I

Kertas kerja in berangkat dari pengalaman singkat mengajar PSPB (Pendidikan Sejarah perjuangan Bangsa) di beberapa PTS di Bali dan di lingkungan Universitas Udayana. Miskipun penulis awam dalam bidang didaktik maupun metodik, tetapi ingin juga dikemukakan, setidaknya-tidaknya sebagai bahan renungan bagi rekan-rekan pengajar PSPB di perguruan Tinggi non Sejarah atau juga Sekolah Menengah. Pengajar atau guru sebagai pelaksana terdepan kiranya ada baiknya memperhatikan hal ini.

Sejak prof. Dr. Nugroho Notosusanto menjabat sebagai Menteri pendidikan dan Kebudayaan, diintroduksikan mata kuliah baru yakni pendidikan sejarah perjuangan bangsa di tingkat dasar, menengah maupun perguruan tinggi. PSPB pada dasarnya bertujuan untuk meneruskan dan pengembangan jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan kepada generasi penerus, dengan menekankan matra afektif yang bersifat inspiratif dan integratif.¹ Di dalamnya dapat dikembangkan unsur-unsur nasionalisme, patriotisme, persatuan kerja sama, saling menghargai, rela berkorban dan semacamnya.

Diintroduksikannya PSPB merupakan gejala yang baik, disamping menambah wawasan kebangsaan seperti di atas, juga dalam rangka memajukan pendidikan humaniora. Pendidikan di Indonesia diharapkan tidak hanya menghasilkan ilmuwan; masalah-masalah kemanusiaan juga harus mendapat porsi. Pembentukan manusia dengan sains dan humaniora secara terpadu akan menghasilkan manusia yang tidak saja cerdas dan terampil, tetapi juga berwawasan kebangsaan, berbudaya beriman, berwatak luhur. Singkatnya, terbentuklah manusia Indonesia seutuhnya.

Belajar sejarah boleh dikatakan berguna sebagai media untuk mengetahui masa lampau kita dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Sejarah secara sederhana dapat kita andaikan sebagai "jembatan" yang menghubungkan masa lampau dengan masa sekarang dan sekaligus sebagai cermin untuk melangkah ke arah masa depan. Meminjam istilah Taufik Abdullah, sejarah juga dapat memberikan wawasan mengenai hari depan, wilayah yang tak punya peta.² Untuk mengetahui aktifitas apa yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita seperti Kartini, Ki Hajar Dewantara, Sukarno, Hatta, Sjahrir dan tokoh-tokoh lainnya hanya dapat kita hayati dengan mempelajari Sejarah perjuangan terutama dalam bidang politik. Hatta dan Sjahrir bujangan yang sangat fasih berbahasa Inggris, Belanda, Jerman maupun Prancis pernah mengalami masa pahit diinternir di Digul dan Banda. Proses internering ini tidak akan berakhir kalau tidak Jepang menguasai Indonesia sejak 1942. Begitu juga negara Republik ini tidak ada begitu saja sekonyong-konyong. Tetapi semuanya diperoleh dengan perjuangan. Bagaimana semangat Sukarno dalam pidatonya 1 Juni 1945 yang sampai saat ini kita selalu bahas dan menjadi monumental. Pada bagian lain isi pidatonya, Sukarno menganjurkan penganut berbagai agama di Indonesia untuk selalu bekerja sama, sebab setiap agama mengajarkan toleransi.³

Dalam hal inilah sejarah dapat menjembatani, menghilangkan jurang pemisah antara generasi sekarang yang tidak pernah

mengalami dan generasi terdahulu yang mengalami. Maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan sejarah sebagai "Jembatan".

Pengalaman kita di Sekolah Menengah menunjukkan bahwa pelajaran Sejarah ternyata belum dapat perhatian yang serius, sehingga dianggap pelajaran yang membosankan anak didik. Katakanlah sejarah dalam pembahasan ini sebagai "jembatan". Tetapi para guru sejarah di Sekolah Menengah dahulu atau juga mungkin PSPB di Perguruan Tinggi mengajarkan sejarah terlalu ke "hulu", sehingga tidak memberikan kesempatan ke "muara".

Contoh yang terlalu ke "hulu" misalnya; kalau sejarah diberikan batasan atau definisi "masa lampau umat manusia", tentunya kita harus memulai dari manusia ada di bumi atau *Pithecanthropus Erectus* sampai saat ini-zaman orde baru. Kita lihat misalnya Sejarah Nasional yang ke 6 (enam) jilid mulai dari jilid I tentang Pra Sejarah, Jilid II tentang zaman Hindu, jilid III tentang masuk dan berkembangnya Islam, jilid IV Zaman Kolonialisme Belanda, Jilid V zaman Kebangkitan Nasional, dan Jilid VI zaman Jepang dan Republik Indonesia.

Kesalahan guru di Sekolah Menengah sering mengajarkan sejarah terlalu ke "hulu", misalnya diajarkan tentang Manusia purba pertama yang diketemukan di Nusantara. Juga diajarkan teori Darwin, teori yang masih *Kontraversial*, yang mengatakan manusia berasal dari keturunan kera. Di samping itu guru sering mengajarkannya sepotong-potong. Hal ini mungkin karena waktu yang terbatas, sehingga anak didik juga menerima tidak utuh. Karena guru hanya memilih yang penting-penting saja, terkadang yang menonjol bahkan yang kontraversial. Siapa yang mau menerima teori Darwin, bahwa manusia berasal dari keturunan kera. Ini menyebabkan pelajaran sejarah dan juga gurunya menjadi bahan perdebatan yang tidak habis-habisnya. Untuk mengatasi keterbatasan waktu ini kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto mengadakan pembaharuan dan pelajaran sejarah di Sekolah Menengah sudah ditingkatkan, meskipun hal ini belum banyak merubah keadaan.

Untuk mengatasi hal ini, terutama pelajaran sejarah yang tidak menarik dan kontraversial, akan lebih bijaksana menunggu mereka sebagai mahasiswa, di mana nalar mereka sudah bisa memahami atau dayapikir mereka sudah menerima hal-hal yang ekstrem seperti di atas. Jadi sekali lagi jangan terlalu ke "hulu" sebelum anak didik siap menerimanya dan juga porsi harus kita imbangi, dalam arti yang "ke tengah" atau ke "hilir" juga harus diberikan.

Di samping itu pada guru atau pengajar juga perlu memperkenalkan hasil-hasil pemikiran masyarakat Indonesia atau produk-produk hasil budaya Indonesia dari masa lalu sampai sekarang yang ada relevansinya atau kaitannya masa kini. Misalnya hasil teknologi membuat perahu, dan kenapa membuat perahu, tidak membuat Candi atau membuat misalnya. Kenapa orang-orang Bugis—Makasar pandai membuat perahu, tidak membuat candi seperti di Jawa. Hal ini karena orang Bugis—Makasar adalah suku pelaut yang sangat piawai mengarungi-lautan. Berbeda dengan orang Jawa, yang tingkat religiusnya sangat tinggi, sehingga gemar membuat candi. Ini harus kita ajarkan kepada anak didik, bahwa kita dapat mengambil manfaat dari pemikiran kemaritiman orang-orang Bugis—Makasar karena wilayah Nusantara sebagian besar terdiri atas laut dan perairan. Demikian juga kita dapat mengambil manfaat dari suku minang yang mempunyai bakat berdagang.

III

Jadi sudah tidak dapat dibantah bahwa sejarah dapat mengajarkan kita untuk lebih mengenal masa lampau kita, identitas kita. Pengajaran sejarah dapat dipergunakan untuk melatih warga negara yang setia dan kisah tanah airnya akan dapat menimbulkan rasa bangga. Dengan kata lain pelajaran sejarah dapat menimbulkan semangat patriotisme dan nasionalisme, semangat cinta tanah air dan cinta bangsa. Dapat dikatakan kalau tidak berlebihan, bahwa sejarah sebagai media untuk membentuk sikap cinta tanah air.

Kita dapat belajar dari kasus sejarah Jerman, dimana Hitler melambung isu historis bahwa bangsa Jerman sebagai bangsa yang terunggul, pembimbing dunia, sehingga mampu membuat rakyat Jerman menyerahkan segala-galanya untuk Jerman. Ras Jerman sebagai *missionsacre* mampu meninabobokan rakyat menyerahkan segala-galanya demi kejayaan interiumnya. Demikian juga Mussolini bernostalgia ingin kembali kepada masa kejayaan Romawi yang pernah menguasai hampir separuh dunia. Demikian juga Syah Iran — Pahlevi mengapungkan kejayaan kerajaan Persia masa lampau untuk mengembalikan interium Iran seperti seribu tahun yang lalu. Ternyata Iran berhasil menandingi Barat atau Jepang meskipun hanya sementara. Namun sayang pameran-pameran mereka "dosis", tergelincir dalam chauvinisme yang sempit, sehingga semua ambruk. Namun contoh-contoh di atas dapat membuktikan bahwa pelajaran sejarah Nasional mampu menggiring jiwa suatu bangsa untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu tujuan Nasional.

Berangkat dari pengalaman-pengalaman di atas inilah penting diusahakan agar pelajaran sejarah Nasional Indonesia dalam hal ini Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) tidak kelewat "dosis", atau mengarah ke "brain Washing" seperti di negeri-negeri Komunis. Atau sebaliknya juga tidak terlalu sempit, kecendrungan mana kita lihat akhir-akhir ini. Masalahnya memang tidak segampang yang diucapkan. Ini tentunya membawa implikasi, terutama dalam hal didaktik dan metodik.

Dikatakan kelewat sempit, dapat dilihat misalnya bahan-bahan pelajaran PSPB mutlak diharuskan sesuai dengan apa yang terdapat yang ada. Akibatnya para pengajar atau guru tidak dapat mengembangkan kreatifitas untuk menambah atau mengurangi mana yang dianggap penting atau perlu sesuai dengan lingkungan sosio-kultural anak didik. Guru kadang-kadang tidak lebih hanya sebagai "robot" karena harus mengikuti buku paket, sehingga pelajaran sejarah menjadi monoton, menjemukan dan tidak menarik. Ini sangat tidak menguntungkan bagi anak didik, dan bahkan terkadang guru sejarah diberi julukan

yang bukan-bukan seperti 'tukang lawak' atau "bapak pithecantrops uerectus"

Di samping itu keseragaman (uniformitas) tidak dituntut. Ini justru menyulitkan, sempit, dan picik. Sebagai contoh cara mengajar di Yogyakarta tidak usah sama dengan cara mengajar sejarah di Manado. Di Yogyakarta, guru dapat memulai dengan membicarakan Budi Utomo, Dr. Soetomo, Dr. Wahidin, sebagai orang Yogyakarta tentunya lebih menarik bagi anak didik. Sebaliknya di Manado anak didik kurang tertarik, Budi Utomo bagi anak didik di Manado sangat sukar dimengerti, malahan akan menjemukan anak didik dan pelajaran sejarah menjadi tidak menarik. Akan lebih baik pelajaran di Manado diawali dengan memperkenalkan tokoh pergerakan Dr. Samratulangi, yang lebih akrab dengan lingkungan sosio-kultural Sulawesi Utara.

Demikian juga mengajar sejarah di jurusan non sejarah seperti misalnya di Fakultas Ekonomi harus lebih banyak dihubungkan dengan sejarah perekonomian Indonesia. Misalnya tanam paksa yang pernah dijalankan di Indonesia ternyata memiskinkan sebagian rakyat Indonesia. Hapusnya sistem tanam paksa diikuti dengan masuknya modal asing Belanda atau asing lainnya sesudah tahun 1870, justru membuat perekonomian berorientasi keluar.⁶

Dalam lapangan ekonomi keadaan bangsa kita sangat menyedihkan sekali. Rata-rata bangsa Indonesia hidup hanya dengan 2½ sen sehari. Perekonomian sepenuhnya berada di tangan bangsa asing dengan modal-modal besar berupa perkebunan-perkebunan tembakau, tebu, karet, dan teh. Bangsa kita hanya menjadi kuli dan sering menjadi korban dari pada rentenir-rentenir tuan tanah bangsa asing. Politik pengisapan (drainage) ini telah dijalankan sejak zaman VOC. Dikuasailah seluruh perdagangan, perdagangan, perindustrian, perkebunan, perkapalan, dan sektor-sektor kehidupan lainnya. Setiap tahun berjuta-juta rupiah mengalir keperbendaharaan negeri Belanda. Demikian juga pada Fakultas pertanian diberikan pengertian kepada para

mahasiswa bahwa di Indonesia juga beroperasi perkebunan-perkebunan milik bangsa asing.⁷ Tanam paksa dalam bidang pertanian yang dijalankan, menghasilkan kekayaan yang bermilyar-milyar gulden bagi Belanda. Selama berpuluh-puluh tahun politik ekonomi dan politik agraris ini telah dijalankan dan ternyata menambah sengsara rakyat.

Hal semacam ini sangat diperlukan dan harus dipikirkan oleh para pengajar akan muncul untuk menambah atau mengurangi bahan yang ada atau memilih mana yang tepat dan tidak perlu dituntut uniform.

Pada suatu pertemuan antara guru-guru, pengajar sejarah, sarjana sejarah, dan para sejarawan di Yogyakarta sekitar bulan September 1984 hal ini sudah dibicarakan. Dalam pertemuan ini dengan pembicara tunggal Drs. Abdurachman Surjomihardjo, sejarawan LIPI, itu para peserta berbicara secara blak-blakan mengatakan bahwa pelajaran PSPB terlalu mengikuti buku paket sehingga terlalu sempit dan kaku. Ini menjadi keluhan problematis yang menjadi masalah prinsip dalam proses belajar mengajar PSPB ini dan perlu dicarikan pemecahannya.

Terlalu sempit juga berarti materi PSPB sering diganti dan dirubah. Mula-mula materinya diambil dari zaman kuno sampai zaman Modern. Kemudian diganti lagi mulai dari periode pergerakan (1908) sampai Zaman modern (kini). Hal yang paling mengejutkan dan mengherankan dimulai dari tahun 1945 sampai kini, yaitu dari Proklamasi Kemerdekaan sampai kini. Kelihatan dan kecendrungan seperti mau "menggelapkan" episode suatu babakan sejarah Indonesia. Ini tentunya mengkhawatirkan kita kalau anak didik sebagai generasi penerus nantinya hanya menerima hal-hal yang sepihak dan tidak utuh.

Disamping itu apakah dengan bahan-bahan periode yang singkat ini (setelah 1945) dapat dengan cukup menanamkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Justru sebaliknya pada masa-masa sebelum proklamasi kita banyak mendapatkan contoh-contoh peristiwa sejarah, atau perbuatan tokoh-tokoh sejarah Indonesia yang kita idealkan dan patut dicontoh. Bagai-

mana Soekarno berjuang memperjuangkan kemerdekaan ini dengan keluar-masuk penjara. Bagaimana Mohammad Hatta berjuang di Negeri Belanda dengan perhimpunan Indonesia-nya. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa Indonesia di negeri Belanda yang masih sangat muda usia masih peduli dan sempat memperhatikan nasib tanah air di samping belajar. Nama "Indonesia" saja pada waktu itu masih tabu untuk diucapkan. Bagaimana seseorang yang menjadi anggota PNI saja bisa dicopot dari pemerintahan. Banyak pula contoh para pejabat generasi pertama kali rumah saja tidak punya. Berbeda dengan sekarang, rumah bukan lagi semata-mata untuk tempat tinggal, tetapi sebagai akumulasi kapital.⁸ Hal-hal semacam inilah yang perlu ditanamkan pada anak didik, dan contoh-contoh seperti ini banyak kita jumpai dalam periode pergerakan Nasional.

Terlalu sempit pula kalau setiap minggu siswa harus mempelajari sejarah dari tahun 1945 saja, apakah mereka tidak jenuh dan bosan dengan bahan yang itu-itu saja. Lebih celaka lagi kalau guru atau pengajar sebagai pelaksananya kurang menguasai metode mengajar, seperti kebanyakan pengajar sejarah sekarang yang asal jadi atau jalan saja.

Penting juga untuk diperhatikan, fungsi sejarah yang akan diajarkan ataupun ditulis. Apakah sejarah sebagai konstruksi (sifatnya tentu ilmiah), didaktis atau pragmatis. Tidak sembarang guru bisa mengajar dan mengetahui fungsi sejarah yang akan diajarkan. Sejarah yang berfungsi ilmiah diajarkan di Jurusan sejarah untuk ahli sejarah yang profesional. Hal ini akan berbeda dengan sejarah dalam fungsi didaktis-pragmatis atau inspiratif seperti halnya PSPB ini. Hal seperti ini sangat menyolok ditemui mata kuliah PSPB di perguruan Tinggi non Sejarah yang diasuh oleh dosen atau pengajar yang kurang memperhatikan fungsi-fungsi ini. Mata kuliah PSPB di fakultas seperti ini kadang-kadang diberikan sama dengan di Jurusan sejarah. Dalam arti bahan-bahannya sangat luas diambil dari zaman kuno sampai zaman Orde Baru tanpa memberikan penekanan pada episode-episode tertentu. Itu akan terbentur pada masalah waktu yang tidak cukup, karena yang tersedia hanya satu semester.

Barangkali dapat disamakan dengan mata kuliah Kapita selekta Sejarah Indonesia di Jurusan Sejarah pada semester akhir. Misalnya diberikan juga pergerakan petani, Involusi pertanian, pergerakan Sosial, masalah pengguntingan uang pada masa-masa setelah kemerdekaan. Hal semacam ini terasa kurang kena apabila diberikan di fakultas-fakultas non Sejarah, dan bahkan kalau boleh dikatakan sakaprah.

IV

Sejarah nasional yang diajarkan bukan hanya untuk mengenang masa lampau saja, atau memberikan informasi kesejarahan saja, tetapi ada fungsi politik-pragmatisnya. Di samping itu fungsi untuk mengenalkan apa? kepada generasi berikutnya. PSPB tentunya mempunyai tujuan didaktis-pragmatis. Dengan demikian, bentuknya harus sesuai dengan tujuannya, sehingga betul-betul memberikan inspirasi kepada anak didik. Ada nilai pendidikannya seperti yang dianjurkan oleh sejarawan Amerika Herbert Butterfield,⁹ atau ada pertimbangan *moral* atau *judgement* seperti yang dianjurkan oleh John Dewey.¹⁰

Nilai pendidikan atau pertimbangan moral misalnya ada pahlawan yang dijadikan model atau panutan, yang tentunya lebih banyak mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kata-kata seperti ini sekarang banyak diucapkan, tetapi contoh yang demikian justru banyak kita jumpai pada periode pergerakan nasional seperti disebutkan di atas. Bagi orang sejarawan atau pengajar sejarah, melekat tanggung jawab moral. Kalau direnungkan lebih dalam tidak gampang mengajar sejarah. Tidak hanya asal jalan saja, tetapi banyak segi yang perlu dipertimbangkan.

Melaksanakan tanggung jawab moral, tentunya tidak gampang yang diucapkan. Bisa saja sejarawan atau pengajar sejarah berbohong kepada anak didik, yang putih dapat dibilang merah dan juga sebaliknya. Ini tentunya sangat berbahaya. Di sini kalau boleh dikatakan, maju-mundurnya bangsa banyak ditentukan oleh sejarawan atau pengajar sejarah pada setiap tingkat

atau jenjang Pendidikan. Kearsah mana bangsa akan dibawa, ke arah merah atau putih. Itulah sebabnya kebijaksanaan pemerintah sangat perlu memperhatikan masa lampau. Sekarang memang ada kecenderungan untuk membongkar gedung-gedung bersejarah seperti bekas gedung Harmoni di Jakarta dan juga tempat-tempat lainnya. Kebijakan seperti ini tentunya tidak mempunyai perspektif sejarah.

Dalam hubungan ini, tentunya kisah-kisah masa lampau tidak utuh sampai kepada kita. Ia hanya akan meninggalkan bekas-bekas, baik yang tertulis maupun yang monumental. Tetapi monumen yang sampai pada kita tidak hanya seonggok bekas bangunan saja atau sejenisnya. Sumber monumental akan dapat lebih menghidupkan, lebih dapat memberi arti dan rasa hayat. Tentunya setelah dipertanyakan oleh sejarahwan. Misalnya monumen apa? bekas dari zaman mana? dan pertanyaan sejenisnya. Dengan demikian akan dapat menggugah setiap warga negaranya memupuk rasa cinta tanah air dan cinta bangsa.

Kembali masalah didaktik-metodik tentunya harus sesuai dengan kemampuan anak didik dan ini harus dapat perhatian. Kemudian diperlukan teknik penyajian yang cocok dalam pengajaran dan juga memperhatikan kondisi psikologis; tidak perlu seragam, akan tetapi memperhatikan lingkungan sosial-budaya. Dengan demikian, memasyarakatkan PSPB memang tidak gampang, tidak cukup hanya orang di belakang meja saja.

Catatan.

1. Proses dan faktor integrasi dianggap sedemikian pentingnya digunakan sebagai dasar periodisasi sejarah Indonesia sudah dikemukakan oleh Sartono Kartodirdjo tahun 1957. Lihat Sartono Kartodirdjo, dalam Seminar Sejarah, Yogyakarta, 1957, laporan lengkap acara I dan II tentang konsepsi filsafat sejarah dan periodisasi sejarah Indonesia, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 1957.
2. Lihat Kompas 29 Januari 1990.
3. J. Pluvior, *Overzich Van de Out Wikkeling der nationalistich beweging in Indonesia in de jaren 1930-1942*. Den Haag-Bandung, 1953, Hlm. 66.
4. Lihat buku *Babon: Sejarah Nasional Indonesia yang 6* (enam) Jilid, Balai Pustaka, 1984.
5. Hans Kohn, *Nasionalisme, arti dan sejarahnya*, Jakarta: Pustaka Sarjana, 1963.
6. Joko Surjo, *sekitar masalah kemiskinan di pedesaan*, Yogyakarta : PPSK-UGM, 1984, hlm. 1-17.
7. H. Boeke dan D.H. Burger, *Ekonomi Dualistis : Dialog Antara Boeke dan Burger*. Jakarta : Bhratara, 1973, hlm. 56-57.
8. I Putu Gede Suwitha, tanah Dan Problematiknya : pendekatan sosial-kemanusiaan, dalam Suara Karya, 5 Oktober 1985.
9. Hana Mayerhoff (ed). *The Philosophy of History in our Time* (1954).
10. Ibid.

HASIL SEMINAR SEJARAH NASIONAL V

A. Pengantar

Seminar Sejarah Nasional V diselenggarakan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah telah berlangsung di Semarang dari tanggal 27 sampai 30 Agustus 1990. Seminar yang diadakan dalam rangka Pengkajian Sejarah 45 Tahun Indonesia Merdeka bertemakan *Peranan Sejarah dalam Pembangunan Era Lepas Landas*, dihadiri oleh ± 400 peserta yang terdiri atas para peneliti, penulis, pengajar, pengabdian masyarakat, dan peminat sejarah. Para peserta berasal dari berbagai lembaga penelitian, pendidikan, pelayanan masyarakat, dan perorangan dari seluruh Indonesia. Setelah membaca, menyimak, dan membahas bahan masukan baik yang berupa ceramah umum makalah yang disajikan (lihat lampiran), maupun diskusi yang berlangsung selama Seminar, peserta Seminar sampai pada kesimpulan akhir sebagai berikut :

B. Simpulan Ceramah Umum dan Makalah

1. Peran Sejarah semakin penting dan tinggi nilai strateginya membangun bangsa dan negara dalam masa pembangunan menuju era lepas landas.

2. Oleh karena alasan tersebut butir 1, *penulisan* sejarah baik sebagai ilmu pengetahuan maupun bahan pendidikan tidak dapat diabaikan lagi dan perlu ditunjang dengan :
 - a. pemutakhiran data dan penggalian sumber sejarah melalui kegiatan penelitian baik lapangan maupun kepustakaan;
 - b. Penerapan holistik dan pendekatan antar bidang dalam kegiatan penelitian dan penulisan sejarah;
 - c. Pengembangan cara kerja dan sistematika pengungkapan yang disesuaikan dengan setiap tujuan penelitian dan penulisan sejarah;
 - d. Perluasan lingkup dan orientasi ranah perhatian peneliti dan penulis sejarah (gerakan masyarakat, pedesaan, tokoh, dsb);
 - e. Penggunaan gaya bahasa dan cara penyajian yang disesuaikan dengan sasaran masyarakat pembaca.
3. Di bidang *pengajaran* sangat disadari pentingnya hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. hakikat dan tujuan pengajaran sejarah;
 - b. jenjang pendidikan;
 - c. perumusan GBPP dan penjabarannya;
 - d. pemilihan cara/metod pengajaran sesuai dengan jenjang pendidikan ;
 - e. bahan dan sarana pengajaran;
 - f. kualifikasi pengajar.
4. Di bidang *kajian sejarah tematis dan kewilayahan* perlu dicatat hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. *Sejarah perjuangan* adalah perjuangan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dalam mencapai harkat kebangsaan (dan kemanusiaan) yang lebih tinggi; pengertian ini terutama dalam kaitannya dengan perjuangan

penduduk Indonesia setelah berhadapan dengan kolonialism sebagai suatu sistim;

- b. *Perkembangan Industri* yang menimbulkan dampak di segala bidang kehidupan masyarakat, khususnya (terutama) ekonomi dan masyarakat dan nilai-nilai budaya;
 - c. *Penulisan Sejarah Kesenian*, yang hingga sekarang kurang mendapat perhatian dan menarik minat para sejarawan, sangat diperlukan untuk pembangunan bangsa.
5. *Kajian Jalan Sutera* merupakan salah satu kajian yang meluas keluar wilayah dan masyarakat Indonesia, sangat penting artinya untuk memahami kedudukan dan peran Indonesia dalam pergaulan antar bangsa di masa lampau dan memahami kemajemukan serta keanekaragaman kebudayaan bangsa yang berkembang di kepulauan Nusantara. Hasil kajian sejarah itu juga penting sebagai sumber ilham yang dapat merangsang kebanggaan kreativitas bangsa Indonesia dan pembangunan.

C. Saran dan Rekomendasi

1. Para sejarawan dituntut agar senantiasa meningkatkan kemampuan ilmiah dengan banyak melakukan pengkajian dan penulisan, disamping memperdalam ilmunya agar tidak tertinggal oleh kemajuan ilmu pada umumnya, dan penulisan sejarah bangsanya.
2. Para pengajar sejarah dituntut agar senantiasa meningkatkan kemampuan dengan memperbanyak bacaan secara vertikal (ilmiah, ketrampilan), dan mengembangkan cara/metod pengajaran yang tepat demi efektivitas upaya penghayatan nilai-nilai yang terkandung dalam bahan pengajaran.
3. Para pengabdian masyarakat di bidang kesejarahan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kepekaan dalam mengikuti peristiwa-peristiwa bersejarah di sekitarnya dengan memperbanyak bacaan dan mengikuti perkembangan sejarah sebagai disiplin ilmu maupun riwayat peristiwa di masa lampau.

4. Para sejarawan diharapkan dapat mengembangkan jaringan kerjasama, baik melalui jalur organisasi profesi maupun perorangan sehingga dapat memperlancar tukar menukar pengalaman, pemikiran dan mengikuti perkembangan sejarah sebagai disiplin ilmu.
5. Kerjasama yang baik antar lembaga yang berkaitan dengan kesejarahan baik pemerintah maupun masyarakat selama ini, hendaknya dibina dan ditingkatkan.
6. Masyarakat Sejarawan Indonesia sebagai organisasi profesi dituntut untuk meningkatkan peranannya, dan menjalin kerjasama dengan organisasi profesi dan lembaga-lembaga yang berkaitan lainnya.

Semarang, 29 Agustus 1990

Seminar Sejarah Nasional V

Lampiran 1.**DAFTAR PEMBAWA MAKALAH****A. Subtema Umum**

1. Prof Dr. Haryati Soebadio
Beberapa Catatan Tentang Kesetiakawanan Sosial dan Sejarah Perkembangan Bangsa.
2. M. Kharis Suhud
Sejarah Sebagai Sarana Pewarisan Nilai 45.
3. Ismail
Peranan Sejarah dalam Pembangunan, Suatu Uraian Tentang Wawasan Jati Diri, Sejarah dan Pembangunan.
4. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo
Fungsi Sejarah dalam Pembangunan Bangsa, Kesadaran Sejarah, Identitas dan Kepribadian Nasional.

B. Subtema Sejarah Perjuangan

1. Drs. Agust Supriyono, MA.
Kegagalan Pakubuwana V dalam mempertahankan Wilayah Kerajaan Surakarta tahun 1930.
2. Drs. Yuwono Dwi Priyantono
Jaman Jepang di Jakarta (Suatu aktivitas Pemuda).
3. Drs. Agrar Sudrajat
Legitimasi Monopoli Penggunaan Kekerasan Fisik dalam Tatanan Masyarakat Kolonial.
4. Dra. Chusnul Hayati
Afdeling B: Gerakan Rahasia di Priangan Timur Tahun 1919.
5. Dra. Endang Susilowati
Politik Kooperasi MH Thamrin dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia.
6. Prof. Dr. Hamid Abdullah
Revolusi 1945 dan Pembangunan Nasional.

7. Drs. Eka Bhuwana Putra
Djawa Sinbun Kai. Situasi Persurat Kabar di Jawa pada masa Pendudukan Jepang 1942–1945.
8. Drs. Zulfikar Ghazali
Hisbullah: Salah satu cikal bakal TNI.
9. Dra. Ietje Marlina
KH. Z. Mustofa dalam Perlawanan Santri Terhadap Jepang tahun 1944.
10. Dra. GA Manilet Ohorella
Perlawanan Nuku di Tidore (1980–1805).

C. Subtema Pengajaran Sejarah

1. Dr. Said Hamid Hassan
25 tahun Pendidikan Sejarah.
2. Dr. Sri Jutmini Rahardjo
Metode Penemuan sebagai Proses untuk mewarisi Nilai-Nilai Bangsa.
3. Dr. Abu Su'ud
Pengajaran Sejarah.
4. Drs. I Putu Gde Suwitha, SU.
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (Sebuah Pengalaman Mengajar).

D. Subtema Penulisan Sejarah

1. Dra. Mona Lohanda
Pandangan Holistik terhadap Sumber Sejarah.
2. Dr. Abdurachman Suryomiharjo
Masa Revolusi Indonesia: Suatu Tinjauan Historiografi.
3. Drs. Iman Hilman
Permasalahan Penulisan Sejarah Pedesaan.
4. Drs. Ridwan Melay
Riau dan Sastra tulisnya; Pendekatan Filologi dalam Historiografi.

5. Drs. Ida Bagus Sideman
Dan Hyang Nirartha dan Kawangsa di Bali.
6. Drs. Sugeng Priyadi
Tinjauan Awal tentang Serat Babad Banyumas sebagai Sumber Sejarah.
7. Dra. Darmiati
Dari Sela-sela Arsip antara Penulisan dan Fakta.
8. Dra. Tiurma Tobing
Pelaksanaan Pemerintahan Militer di SWK. I/III lewat Arsip-arsip yang ada Juni 1948 – Juni 1949.

E. Subtema Sejarah Kesenian

1. Dr. Kuntowijoyo
Sejarah Kebudayaan.
2. Drs. Tengku Luman Sinar, SH.
Sejarah Seni Musik dan Tari Melayu di Sumatera Utara.
3. Dra. Yulianti Parani
Sejarah Kesenian Moderen Dinamika Argumentatif dari Kebangkitan Kesenian.
4. Dra. Ratnaesih Maulana
Hubungan Lukisan Gua-Gua Prasejarah dan Tradisi Masyarakat Dani Baliem di Jayawijaya.

F. Subtema Sejarah Industrialisasi

1. Dra. Tri Wahyuning M.I.
Pedagang sebagai Dampak Industrialisasi di dalam Masyarakat: Satu Kajian Awal.
2. Dr. Djuliati Suroyo
Industri Perkebunan dan Dampaknya pada Masyarakat Perkebunan Kopi di Karesidenan Kedu.
3. Dr. Suhartono
Agro Industri dan Subsistensi Multikultur, Pajak, dan Kerja Wajib di Vorstenlanden (1850–1900).

4. Drs. Suharso
Sejarah Industri Rokok Kretek Kudus: Survivalisme dalam Jeratan Struktur.
5. Drs. JR. Chaniago
Industri Sukabumi sehabis Perang: Potret Samar sebuah Perkembangan Fisik.
6. Dr. Suyatno Kartodirdjo
Industrialisasi dan Dampaknya terhadap Masyarakat Indonesia.
7. Drs. Aminuddin Kasdi, MS
Pengaruh Modernisasi Teknologi Pertanian Padi terhadap Masyarakat Pedesaan.

G. Silk Roads

1. Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian
Samudra Pasai Bandar Dagang dan Pusat Budaya.
2. Dr. Hasan M. Ambary
Peranan Beberapa Bandar Utama di Sumatera Abad 7 – 16 M Dalam Jalur Jalan Sutra Melalui Lautan.
3. Drs. Uka Tjandrasasmita
Perkembangan Kota Banten Lama Hubungannya dengan Jalan Sutra.
4. Dra. Inajati Adrisijanti M. Romli
Ragam Rias Pesisir-Pesisir Sekitar Abad XVI.
5. Dr. Mukhlis P.
Makassar (Somba Opu) dalam Jaringan Perdagangan di Indonesia Bagian Timur.
6. Prof. Drs. Suwardi, MS.
Warisan Bahari di Sepanjang Selat Malaka.
7. Dr. Edi Sedyawati
Data Awal Mengenai Interaksi Antar Golongan Dalam Sastra Pesisir.

Lampiran 2

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 0303/F/CJ/90**

Tentang :

**PEMBENTUKAN PANITIA
SEMINAR SEJARAH NASIONAL DALAM RANGKA
PENGKAJIAN 45 TAHUN INDONESIA MERDEKA
(SEMINAR SEJARAH NASIONAL V)**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 1990/1991 adalah mengadakan Seminar Sejarah Nasional V di Semarang.
- b. Bahwa untuk dapat tercapainya tertib kerja yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan Seminar tersebut, maka perlu membentuk "Panitia Seminar Sejarah Nasional V".
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- Nomor 44 tahun 1974;
 - Nomor 237/M tahun 1978;
 - Nomor 15 tahun 1984;
 - Nomor 29 dan 30 tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0222e/0/1990 tanggal 11 September 1990;
 - b. Nomor 0170/P/1990 tanggal 20 Maret 1990;
3. Surat pengesahan DIP tahun anggaran 1990/1991 tanggal : 592/XXIII/3/90.

Menetapkan :

- PERTAMA** : a. Membentuk Panitia Seminar Sejarah Nasional V yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut "Panitia Seminar" dengan tugas mempersiapkan melaksanakan serta menyelesaikan seminar Sejarah Nasional V di Semarang.
- b. Panitia Seminar terdiri dari :
1. Panitia Pengarah;
 2. Penanggung Jawab Panitia Penyelenggara;
 3. Panitia Pengarah Seminar Bandar Pelabuhan Jalan Sutra.
- KEDUA** : Susunan/keanggotaan Panitia Seminar tersebut pada pasal "Pertama" seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Memberi wewenang kepada penanggung jawab Panitia Penyelenggara untuk membentuk Panitia Penyelenggara pusat dan daerah.
- KEEMPAT** : "Panitia Seminar" harus telah menyelesaikan tugasnya pada akhir bulan Agustus 1990 dan mewajibkan ketua Panitia menyampaikan Laporan tertulis tentang penyelenggaraan dan hasil seminar serta pertanggung jawaban keuangan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

- KELIMA** : Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Juni 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
A.n.b.
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

ttd.

DRS. GBPH. POEGER
NIP : 130.204.562.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Semua Menteri Koordinator;
4. Semua Menteri Negara;
5. Semua Menteri;
6. Semua Menteri Muda;
7. Sekretariat Jenderal Depdikbud;
8. Inspektorat Jenderal Depdikbud;
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Depdikbud;
10. Kepala Balitbang Dikbud;
11. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman;
12. Semua Sekretaris Ditjen, Irjen dan Balitbang Dikbud dalam lingkungan Depdikbud;
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Depdikbud di Propinsi;

14. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektorat dan Perusahaan Negara dalam lingkungan Depdikbud;
15. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
16. Semua Universitas/Institut/Sekolah tinggi&Akademi dalam lingkungan Depdikbud;
17. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
19. Direktorat Jenderal Anggaran;
20. Direktorat Jenderal Pajak;
21. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
22. Bappenas;
23. Ketua DPR. RI;
24. Komisi IX DPR.RI;
25. Pengurus Pusat Korpri;
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tanggal: 3 Juni 1990

Nomor: 0303/F/CJ/90

Daftar Susunan/Keanggotaan Panitia Seminar Sejarah Nasional V :

- I. Pelindung : 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. DR. Fuad Hasan.
2. Direktur Jenderal Kebudayaan Drs. GBPH. POEGER
- II. Penasehat : 1. Prof. DR. Haryati Soebadio (Menteri Sosial RI).
2. Prof. DR. Harsya W. Bachtiar (Kabalitbang Dikbud)
3. H.M. Ismail (Gubernur KDH TK. I Prop. Jawa Tengah).

III. Panitia Pengarah :

- Ketua : Prof. DR. S. Budhisantoso
Wakil Ketua : DR. Abdurachman Suryomihardjo
Sekretaris : Drs. Anhar Gonggong
Anggota : 1. Prof. DR. T. Ibrahim Alfian.
2. Prof. DR. Hamid Abdullah.
3. DR. AB. Lopian.
4. Drs. Bastomi Ervan.
5. DR. Edi Sedyawati.
6. Drs. RZ. Leirissa, MA.

IV. Penanggung Jawab Panitia Penyelenggara :

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional

Dra. Sutjiatiningsih.

V. Panitia Pengarah Seminar Bandar Pelabuhan Jalan Sutra (Silk Roads)

- Ketua** : Prof. DR. S. Budhisantoso
Wkl. Ketua : DR. AB. Lopian.
Sekretaris : Drs. Anhar Gonggong.
Anggota : 1. Drs. Bastomi Ervan.
 2. Drs. Uka Tjandrasasmita.
 3. Drs. Bambang Sumadio.
 4. FX. Soetopo.
 5. DR. Hasan Muarif Ambari.

**MENTERI PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN**

A.n.b.

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

ttd.

DRS. GBPH. POEGER

NIP : 130.204.562.

